

KERANGKA ACUAN KERJA
APBD TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah bersama masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang secara spesifik mengatur bahwa pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di sisi lain masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi, penyediaan, perdagangan, dan distribusi sekaligus sebagai konsumen.

Pengembangan ketahanan pangan bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani/peternak/pekebun/petani hutan/nelayan. Lebih dari itu, pengembangan ketahanan pangan adalah sebuah cara hidup bagi sebagian terbesar masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, membahas mengenai sektor dan sistem pangan harus menempatkan subjek petani sebagai pelaku secara utuh, termasuk dimensi ekonomi, sosial dan spiritual. Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial budaya lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi dan budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan ketahanan pangan.

Dengan jumlah penduduk yang besar, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan penting yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu: (i) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia; (ii) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup

untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.

Terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu sistem dan unsur-unsur yang merupakan subsistem yang saling berinteraksi yaitu subsistem (1) ketersediaan pangan, (2) distribusi pangan, (3) konsumsi pangan, dan (4) keamanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pengembangan 4 (empat) subsistem tersebut.

Tujuan dalam program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan TA. 2015 ini, antara lain untuk:

- 1 Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan
- 2 Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
- 3 Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/ bencana
- 4 Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- 5 Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan
- 6 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan
- 7 Meningkatkan panganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
- 8 Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

II.

ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2015 untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar **Rp. 32.569.819.000,-** yang terbagi menjadi:

A. BELANJA LANGSUNG	Rp. 19.058.502.000,-
▪ Belanja Pegawai	Rp. 1.834.184.000,-
▪ Belanja Barang dan Jasa	Rp. 16.299.497.000,-
▪ Belanja Modal	Rp. 924.821.000,-
B. BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 13.511.317.000,-
▪ Belanja Pegawai	Rp. 13.511.317.000,-
▪ Subsidi	-
▪ Bantuan Sosial	-

Tabel 1. Nama Program, Kegiatan, Anggaran dan Sasaran

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan	Ket.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Sekretariat	42.800.000	Administrasi persuratan lancar selama 1 tahun	
	2. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat BPCP	5.000.000	Administrasi persuratan lancar selama 1 tahun	
	3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat	357.287.000	Kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik selama 1 tahun	
	4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BPCP	34.200.000	Kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik selama 1 tahun	
	5. Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	85.000.000	a. 1 paket bangunan b. 13 kendaraan roda 4 c. 16 kendaraan roda 2	
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor/rumah dinas	115.000.000	Kebersihan Gedung kantor dan fasilitas pendukung selama 1 tahun	
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat	225.000.000,-	Kebutuhan Alat tulis kantor selama 1 tahun	
	8. Penyediaan Alat Tulis Kantor BPCP	15.000.000,-	Kebutuhan Alat tulis kantor selama 1 tahun	
	9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat	200.000.000	barang cetak dan penggandaan untuk keperluan administrasi kantor selama 1 tahun	

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan	Ket.
	10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPCP	15.000.000	barang cetak dan penggandaan untuk keperluan administrasi kantor selama 1 tahun	
	11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat	25.000.000	Kebutuhan komponen listrik/penerangan selama 1 tahun	
	12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BPCP	3.000.000	Kebutuhan komponen listrik/penerangan selama 1 tahun	
	13. Penyediaan Peralatan rumah Tangga Sekretariat	95.000.000	Kebersihan dan kesehatan lingkungan kantor selama 1 tahun	
	14. Penyediaan Peralatan rumah Tangga BPCP	10.477.000,-	Kebersihan dan kesehatan lingkungan kantor selama 1 tahun	
	15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat	40.000.000,-	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk 1 tahun	
	16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan BPCP	2.580.000,-	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk 1 tahun	
	17. Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat	36.000.000,-	Kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu untuk kegiatan kantor selama 1 tahun	
	18. Penyediaan Makanan dan Minuman BPCP	5.425.000,-	Kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu untuk kegiatan kantor selama 1 tahun	
	19. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Sekretariat	900.000.000,-	Koordinasi pegawai BKP dengan instansi lain di luar kantor baik di dalam daerah maupun di luar daerah selama 1 tahun	
	20. Penyediaan jasa pelayanan Perkantoran Sekretariat	697.052.000,-	Jasa pelayanan perkantoran selama 1 tahun	
	21. Biaya Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat	20.000.000,-	Publikasi dan dokumentasi selama 1 tahun	

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan	Ket.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	400.000.000,-	Peningkatan Jumlah Kendaraan Dinas	
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	90.000.000,-	Terpeliharanya bangunan gedung tempat perkantoran selama 1 tahun	
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPCP	20.000.000,-	Terpeliharanya bangunan gedung tempat perkantoran selama 1 tahun	
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	540.000.000,-	Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara selama 1 tahun	
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPCP	37.500.000,-	Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara selama 1 tahun	
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat	100.000.000,-	Perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir	20.000.000,-	Meubeleir Kantor selama 1 tahun	
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat	200.000.000,-	Peralatan kantor dan rumah tangga kantor selama 1 tahun	
	9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPCP	5.000.000,-	Peralatan kantor dan rumah tangga kantor selama 1 tahun	
	10. Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan	5.000.000,-	Buku perpustakaan dan bahan bacaan selama 1 tahun	
	11. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat	329.581.000,-	Sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun	
	12. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPCP	185.000.000,-	Sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	65.000.000,-	Kebutuhan 122 pegawai BKP berupa PDH dan pakaian olahraga	

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan	Ket.
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000,-	Pendidikan dan pelatihan fomal/ kursus singkat pegawai BKP (untuk 35 orang)	
5.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
	1. Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	1.580.000.000,-	- Tersedianya cadangan pangan provinsi Jawa Tengah khususnya pangan pokok (beras)dalam penanggulangan rawan pangan transien	
	2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	540.000.000,-	Adanya perencanaan ketahanan pangan yang sinergis dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota	
	3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	1.000.000.000,-	Meningkatnya stabilitas harga gabah	
	4. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	329.450.000,-	Mempertahankan angka ketersediaan energi minimal 2200 kkal/kap/hari dan angka ketersediaan protein 57 gr/kapita/hari	
	5. Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	2.964.000.000,-	Meningkatnya kemandirian pangan di desa mandiri pangan	
	6. Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	1.047.000.000,-	1) Tersusunnya laporan harga pangan strategis; 2) Padat karya pangan	
	7. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	967.550.000,-	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi	
6.	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan			
	1. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	1.950.000.000,-	Jumlah kelompok wanita tani (KWT) pekarangan yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan	

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program/Kegiatan	Ket.
			yang B2SA	
	2. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	991.500.000,-	Jumlah KWT pengolah pangan alternatif yang difasilitasi dalam pengembangan pangan alternatif	
7.	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			
	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	850.000.000,-	1) Fasilitasi sarana prasarana kantin sekolah; 2) Fasilitasi sarana prasarana peningkatan mutu dan keamanan pangan pada kelompok usaha; 3) Fasilitasi sarana prasarana retail pangan; 4) penghargaan untuk lomba pra bintang; 5) Sosialisasi, pelatihan dan koordinasi peningkatan mutu dan keamanan pangan	
	2. Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar	882.500.000,-	Jumlah Sertifikasi Prima 3 dan Nomor Pendaftaran PSAT terhadap produk pangan segar	
8	Program Pendidikan Non Formal dan Informal			
	2. Pendidikan Kemasyarakatan	1.000.000.000,-	Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan SDM dalam mewujudkan ketahanan pangan	

III.

DASAR PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 17 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014, tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014, tentang Pedoman, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
6. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 /SPD/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

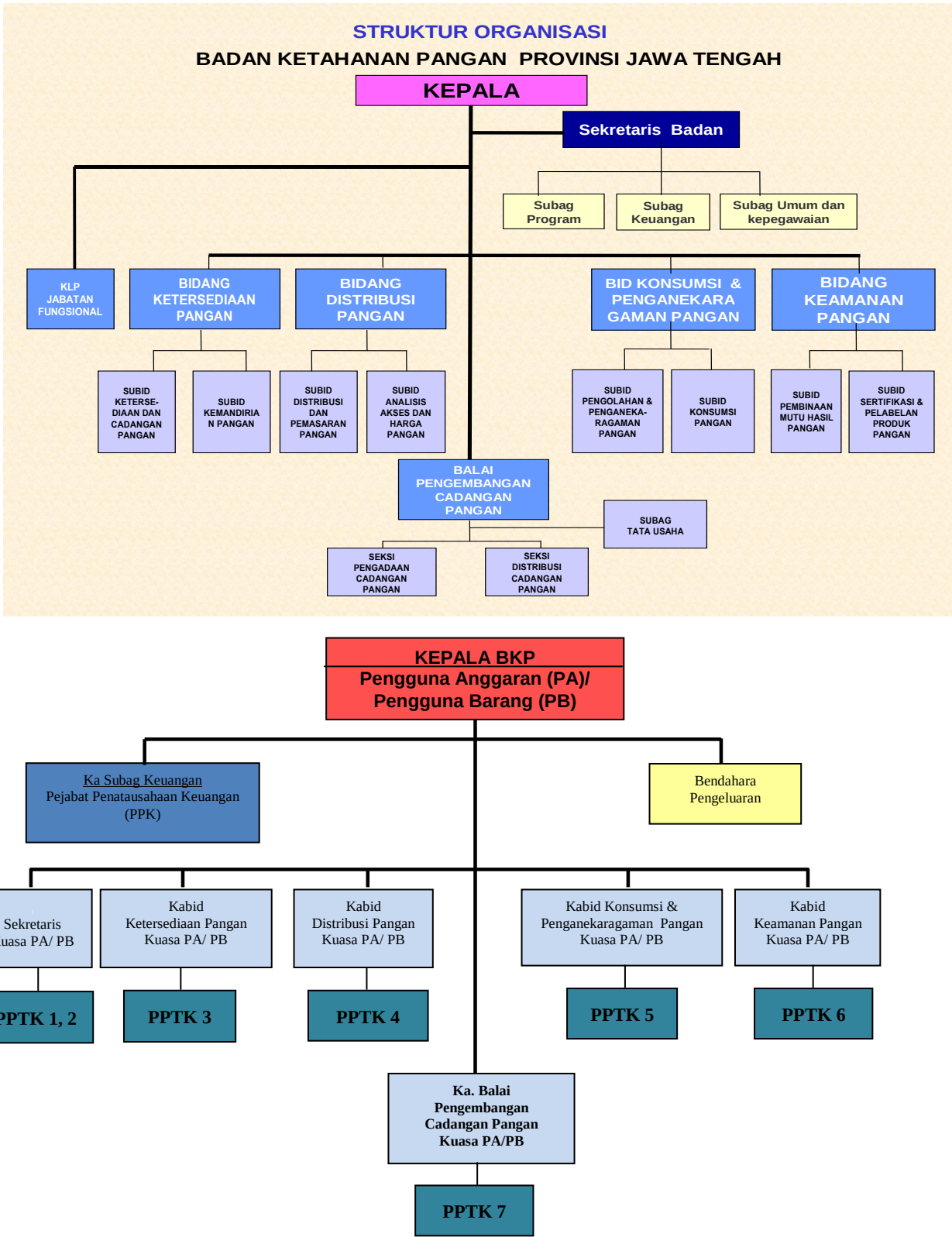
IV.

TUJUAN PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN

- a. Merencanakan dan Menjabarkan kegiatan Anggaran dan Belanja Daerah pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b. Meningkatkan tertib administrasi sesuai dengan plafon anggaran yang telah direncanakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
- c. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan mulai dari input sampai dengan output agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

V.

STRUKTUR DAN ORGANISASI



Keterangan:

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yaitu Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- c. Bendahara Pengeluaran yaitu Pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu yaitu Pegawai yang ditunjuk untuk membantu fungsi bendahara penerimaan pada SKPD, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Pegawai yang ditunjuk untuk membantu fungsi bendahara pengeluaran pada SKPD, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- f. Pejabat yang berwenang mengesahkan SPJ yaitu Pejabat penatausahaan keuangan ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan SPJ pada SKPD masing-masing.
- g. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu Pejabat yang melaksanakan tata usaha keuangan pada SKPD, meliputi fungsi perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Pejabat yang mengendalikan pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program pada SKPD yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

VI. PELAKSANAAN

A. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

1. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Sub Kegiatan:

a. Pelatihan Pengolahan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang serta Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal

i. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumberdaya manusia dan kehidupan masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh keadaan gizinya. Keadaan gizi pada dasarnya ditentukan oleh konsumsi pangan (keragaman pangan) dan kemampuan tubuh untuk menggunakan zat gizi. Oleh karena itu, maka pemerintah menyelenggarakan sistem pangan yang memungkinkan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat dalam berbagai aspek yaitu kualitas, kuantitas, keamanan, keterjangkauan dan

keberlanjutannya.

Indikator penganekaragaman konsumsi pangan antara lain tergambar pada skor PPH. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah ditinjau melalui pola pangan harapan (PPH), menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi pangan penduduk Jawa Tengah periode 2013 – 2014 mengalami kenaikan dari 90,35 menjadi 91,78. Kenaikan mutu konsumsi pangan penduduk menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman semakin meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut ditunjukkan oleh menurunnya konsumsi energi kelompok padi-padian meski masih harus diturunkan lagi sesuai standar. Sementara itu, konsumsi pangan yang perlu dinaikkan konsumsinya yaitu, umbi-umbian, pangan hewani serta buah dan sayur. Sedang yang perlu diturunkan adalah konsumsi beras dan lemak serta minyak.

Dari uraian tersebut diatas serta dalam rangka menindaklanjuti Perpres No. 22 tahun 2009 dan Pergub No. 41 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal maka perlu upaya terus menerus dan berkesinambungan serta terprogram dalam mengembangkan diversifikasi konsumsi pangan.

Salah satu upaya untuk mendukung percepatan Diversifikasi konsumsi pangan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah dengan melaksanakan Pelatihan Pengolahan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman bagi UKM bidang pangan, maupun catering dari Kabupaten/kota se Jawa Tengah.

ii. Permasalahan.

- Belum optimalnya keberagaman konsumsi masyarakat;
- Masih kurangnya ketrampilan, wawasan, pengetahuan dan minat masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal guna memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi keluarga.
- Masih terbatasnya hasil pangan olahan yang dikenali oleh masyarakat luas
- Dalam pengolahan pangan, UKM bidang pangan

membutuhkan teknologi tepat guna untuk memperbaiki kualitas maupun kuantitas produksinya.

iii. Tujuan Dan Sasaran

- Tujuan.

Tujuan dari pelatihan ini adalah percepatan diversifikasi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang serta aman sesuai dengan potensi setempat yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam mewujudkan gizi seimbang bagi masyarakat.

Secara khusus tujuan ini dapat dirinci sebagai berikut :

- Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan peserta terhadap pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- Meningkatkan ketrampilan tentang pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal.

- Sasaran.

Sasaran pelatihan pengolahan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal adalah meningkatkan kesadaran dan membudayakan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. Kelompok sasarannya adalah UKM bidang pangan serta Catering.

iv. Waktu, Tempat Dan Peserta Pelatihan.

Pelatihan Pengolahan Pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan sebanyak 3 angkatan dengan jumlah masing-masing angkatan peserta 40 orang dari unsur UKM bidang pangan serta catering pada bulan Februari, April dan Agustus 2015. Tempat pelaksanaan di Kabupaten.

v. Output

Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal untuk UKM bidang pangan maupun catering sejumlah 120 orang, 3 angkatan (1 angkatan 40 orang).

vi. Outcome

Meningkatnya ketrampilan UKM bidang pangan, catering untuk mengolah pangan lokal menjadi olahan siap saji yang bisa bersanding dengan pangan siap saji yang lain.

vii. Penutup

Pengolahan pangan lokal dengan teknologi tepat guna,

dengan memperhatikan kaidah beragam, bergizi seimbang serta aman merupakan langkah yang harus dicoba pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jawa Tengah.

Dengan disusunnya petunjuk pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Pangan Beragam Bergizi Seimbang serta Aman berbasis sumberdaya lokal Tahun 2015, diharapkan dapat menjadi acuan petugas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan harapan operasionalisasi kegiatan dapat berjalan lancar, dan pada gilirannya sasaran penerima manfaat (UKM bidang pangan serta Catering) serta masyarakat sekitarnya mengkonsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman serta pemanfaatan pangan lokal semakin meningkat.

b. Pelatihan Kenali Potensi Pekarangan sebagai sumber Pangan B2SA

i. Latar Belakang

Pemanfaatan pekarangan secara insentif untuk usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) akan memberikan kontribusi pendapatan dan pangan yang mempunyai nilai gizi yang tidak kecil dari keluarga yang menghuninya. Dalam upaya pengembangan pemanfaatan pekarangan, diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan keluarga melalui perbaikan gizi yang mencakup makan beragam, bergizi seimbang dan aman ditingkat rumah tangga.

Pekarangan bagi keluarga mempunyai manfaat beragam tergantung dari tujuan keluarga : bisa sebagai lumbung hidup, warung hidup, apotik hidup dan tabungan keluarga. Dengan demikian maka fungsi pekarangan mempunyai tujuan akhir dapat mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan keluarga.

ii. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dalam mengelola pekarangan sebagai sumber pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), baik sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

iii. Sasaran/Peserta

Anggota Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, mempunyai beberapa pekarangan yang masih bisa di kembangkan. Jumlah peserta 120 orang terdiri dari 3 angkatan.

iv. Lokasi

Lokasi pelatihan kenali potensi pekarangan sebagai sumber pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), pelaksanaanya di kabupaten yang mempunyai potensi pekarangan, potensi SDM yang masih bisa dikembangkan.

v. Waktu Dan Tempat

Pelatihan kenali potensi pekarangan sebagai sumber pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA),dilaksanakan pada bulan Februari, Mei dan September 2015. tempat pelaksanaan di Kabupaten.

vi. Out Put

- Terlaksananya pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk kelompok tani dan kelompok wanita tani sejumlah 120 orang, 3 angkatan (1 angkatan 40 orang).

vii. Out Come

- Meningkatnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

viii. Penutup

Masih banyak pekarangan yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Diharapkan setelah dilaksanakan pelatihan kenali potensi pekarangan ini, potensi pekarangan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

Apabila pekarangan dikelola dengan baik akan menghasilkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang sangat diperlukan keluarga. Menu sehat tidak selalu mahal, dengan memanfaatkan pekarangan kebutuhan gizi keluarga bisa terpenuhi. Dengan sentuhan teknologi, hasil pekarangan akan dapat meningkat nilai jual dan muaranya akan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

c. Pelatihan Penanganan Produk Pangan Segar Menuju Sertifikasi Prima 3

i. Latar Belakang

Meningkatnya permintaan akan produk pertanian pada era globalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap daya saing suatu produk. Fokus perhatian dalam perdagangan komoditas pangan hasil pertanian adalah aspek keamanan dan mutu produk karena hal tersebut dapat menentukan daya saing produk dalam perdagangan baik domestik maupun internasional.

Pemerintah terkait pelabelan dan iklan pangan serta keamanan, mutu dan gizi pangan. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa mutu dan keamanan pangan harus transparan dan diinformasikan dengan baik melalui pelabelan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan memudahkan dalam pengawasan.

Kemampuan untuk menghasilkan produk pertanian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keunggulan kompetitif usaha agribisnis yang dikembangkan serta perlu didukung dengan pengembangan standarisasi untuk memberikan jaminan mutu produk pertanian yang sesuai dengan preferensi konsumen.

Meningkatnya taraf hidup dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan, menyebabkan semakin tingginya tuntutan produk pangan berkualitas dan yang aman dikonsumsi, ditandai dengan pemberian label atau sertifikat.

Dalam rangka memfasilitasi penerbitan sertifikasi Prima-3 kepada kelompok tani produsen buah dan sayuran, Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2015 mengadakan Pelatihan Pendidikan Kemasyarakatan Penanganan Produk Segar Menuju Prima 3, dengan harapan, agar sejak dini petani/pelaku usaha pada umumnya telah menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian dengan berdasar konsepsi GAP, dan SOP dalam melaksanakan usaha taninya dan dapat lebih

meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu.

ii. Tujuan

- Peningkatan kemampuan petani/pelaku usaha dalam penerapan GAP, SOP, SLPHT, Registrasi Kebun;
- Peningkatan pemahaman pentingnya Sertifikasi dan Pelabelan pada pelaku calon penerima sertifikat.

iii. Sasaran

Petani/pelaku usaha komoditas unggulan dan komoditas yang diprioritaskan untuk mendapatkan sertifikat prima 3 (buah dan sayur segar).

iv. Waktu Kegiatan

Kegiatan Pelatihan Penanganan Produk Segar Menuju Sertifikasi Prima 3 akan dilaksanakan 3 kali yaitu Maret, Juli, dan Oktober 2015 dengan peserta 120 orang (3 angkatan) terdiri dari petani/pelaku usaha buah dan sayur segar.

v. Output

- Terlaksananya Pelatihan Penanganan Produk Segar Menuju Sertifikasi Prima 3 untuk petani/pelaku usaha komoditas unggulan (buah dan sayur segar) sejumlah 120 orang, 4 angkatan (1 angkatan 40 orang).

vi. Outcome

- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani/pelaku usaha dalam menangani produk segar menuju Sertifikat Prima 3.

vii. Penutup

Dengan adanya Pelatihan Penanganan Produk Segar Menuju Sertifikasi Prima, diharapkan kualitas hasil pangan segar akan semakin baik dan dapat diproses menuju sertifikasi Prima 3 sehingga dapat meningkatkan daya saing serta sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi para petani.

Mengingat pentingnya kegiatan Pelatihan Penanganan Produk Segar Menuju Sertifikasi Prima, maka didalam

pelaksanaannya diperlukan komitmen, prakarsa dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder yang ada baik terkait langsung maupun tidak langsung.

d. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

i. Latar Belakang

Anak usia sekolah merupakan investasi bangsa, karena anak sekolah adalah generasi penerus. Kualitas bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas anak-anak saat ini. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilakukan sejak dini, sistematis dan berkesinambungan. Tumbuh kembangnya anak usia sekolah yang optimal tergantung pemberian asupan zat gizi dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Namun, pemberian makanan pada anak tidak selalu dilaksanakan dengan baik, yang dapat mengakibatkan gangguan pada organ-organ dan sistem tubuh anak (Judarwanto 2006).

Masa usia sekolah merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa remaja sehingga asupan zat gizi yang cukup dan keamanan makanan yang dikonsumsi sangat penting untuk diperhatikan, salah satunya adalah makanan jajanan. Makanan jajanan sangat banyak dijumpai di lingkungan sekitar sekolah dan umumnya dikonsumsi oleh anak sekolah. Kebiasaan mengonsumsi makanan jajanan sangat populer di kalangan anak-anak sekolah. Mengonsumsi makanan jajanan yang tidak aman dan tidak sehat dapat menyebabkan anak terkena penyakit dan dapat menurunkan status gizi anak (Haryanto 2002).

Selain masalah BTP, perilaku penjaja PJAS juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Masalah yang sering timbul mulai dari proses persiapan, pengolahan dan pada saat penyajian makanan dilokasi jualan. Selain itu juga kebiasaan penjual makanan jajanan yang patut mendapat perhatian adalah penggunaan bahan tambahan non pangan seperti pemanis, pewarna, pengeras dan lain-lain yang digunakan hampir pada setiap makanan. (Fardiaz & Fardiaz 1994).

ii. Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penjaja PJAS tentang pentingnya keamanan makanan jajanan yang sehat dan bebas dari penggunaan BTP yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah.

iii. Sasaran

- Pelaku Usaha/Penjaja PJAS sebanyak 80 orang.

iv. Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS rencananya akan dilaksanakan bulan Januari dan September 2015 di Provinsi Jawa Tengah.

v. Output

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS sebanyak 2 kali (1 angkatan 40 orang).

vi. Outcome

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha/penjaja PJAS dalam mengolah bahan pangan menjadi olahan pangan yang bermutu, aman dan bebas dari BTP yang dilarang Pemerintah.

e. Pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Berbahan Hewani

i. Latar Belakang

Maraknya peredaran pangan olahan berbahan dasar hewani di masyarakat baik produk pangan olahan tradisional maupun pangan olahan modern, menunjukkan semakin ketatnya persaingan dalam perdagangan produk pangan. Untuk dapat bersaing dengan produk pangan modern maka pengolah pangan tradisional skala kecil/rumah tangga mencoba mencari cara untuk dapat tetap bertahan di pasaran.

Hendaknya dalam proses pengolahan pangan berbahan dasar hewani harus memperhatikan mutu dan keamanan

pangannya, mengingat banyaknya kasus keracunan pangan yang terjadi di masyarakat karena mengkonsumsi produk pangan hewani.

Sistem pengelolaan keamanan pangan yang sudah diakui dan diterapkan secara internasional adalah sistem HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) yang menekankan pada pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhi bahan, produk, dan proses. Sistem ini bersifat proaktif, ilmiah, rasional, dan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang mungkin timbul selama rangkaian proses pengolahan makanan.

Saat ini kita telah memasuki era perdagangan bebas yang memaksa produsen secara langsung dan tidak langsung memasuki persaingan dengan banyak produsen lain ditingkat global. Produk-produk pertanian tidak hanya bersaing dengan produk-produk pertanian luar negeri di pasar global tetapi juga di pasar domestik. Dalam pasar global terbuka suatu negara tidak boleh mengenakan proteksi dan hambatan tarif terhadap komoditi yang masuk kewilayahnya. Dalam kondisi demikian persaingan menjadi semakin sengit dan ketat, produsen kuat bersaing dengan produsen lemah, akibatnya produsen yang kalah bersaing akan semakin termarginalkan.

ii. Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok usaha pangan hewani dalam proses pengolahannya agar bebas dari cemaran biologi, kimia dan fisik.
- Mengembangkan wawasan petani dalam pengemasan pangan hewani yang aman.

iii. Sasaran

Petani dan kelompok usaha pangan sebanyak 40 orang (1 angkatan).

iv. Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan berbahan hewani akan dilaksanakan bulan April 2015 di Provinsi Jawa Tengah.

v. Output

Terlaksananya Pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan berbahan hewani sebanyak 1 kali (1 angkatan 40 orang).

vi. Outcome

- Meningkatnya keterampilan produsen pangan dalam pengolahan pangan berbahan hewani dengan mengaplikasikan Good Manufacturing Practices (GMP);
- Meningkatnya ketrampilan produsen pangan hewani dalam meningkatkan nilai tambah produk dengan menerapkan sistem jaminan mutu sesuai tuntutan konsumen ;
- Meningkatnya pengetahuan produsen tentang manajemen mutu pangan;
- Meningkatnya pengetahuan produsen tentang penggunaan bahan tambahan pangan yang aman.

f. Pelatihan Manajemen Pemberdayaan Lumbung Pangan

i. Latar belakang.

Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketersediaan pangan dibangun untuk menyediakan pangan bagi semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, distribusi maupun cadangan pangan. Pengelolaan atau manajemen stok (cadangan) pangan secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan.

Cadangan pangan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Keberadaan cadangan pangan pemerintah tidak menghapuskan pentingnya cadangan pangan masyarakat dan sebaliknya. Keduanya harus sama-sama eksis dan saling melengkapi satu sama lainnya. Cadangan pangan yang dikelola masyarakat (rumah tangga) sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga, ditujukan untuk meningkatkan

akses pangan masyarakat khususnya pada daerah miskin dan rawan bencana yang dapat terisolasi pada waktu-waktu tertentu.

Kelembagaan cadangan pangan menjadi penting mengingat produk pertanian sebagai sumber pangan utama memiliki karakteristik bersifat musiman yang membawa konsekuensi pada kestabilan jumlah produksinya. Pada musim panen jumlah produksi berlimpah sebaliknya pada musim paceklik jumlahnya menurun cukup drastis. Kondisi ini menyiratkan adanya perbedaan produksi pangan antar waktu. Upaya menstabilkan ketersediaan pangan di masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pengembangan lumbung pangan/desa.

Lumbung desa telah lama dikenal masyarakat Jawa Tengah sebagai institusi cadangan pangan di pedesaan dan sebagai penolong petani di masa paceklik. Dengan fungsi konvensional, lumbung desa telah membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam skala kecil. Sayangnya, sepanjang periode orde baru, akibat kebijakan pangan (beras) murah, terjangkau semua orang dan tersedia setiap saat, institusi yang sebetulnya hidup dan dipelihara turun-temurun itu lenyap ditelan waktu. Masyarakat merasa tidak perlu lagi menysihkan dan menyimpan sebagian panennya di lumbung desa. Untuk itu menghidupkan kembali lumbung pangan yang ada di perdesaan perlu menjadi program prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan dan memerlukan dukungan dari semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat, swasta dan semua elemen masyarakat yang ada.

Membangun lumbung pangan berarti meningkatkan fungsi lumbung yang tidak hanya berfungsi sosial yaitu untuk penyediaan pangan masyarakat tetapi lumbung harus berfungsi ekonomi yaitu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan lumbung pangan sangat strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, lumbung pangan ini berfungsi untuk menyediakan cadangan pangan melalui kegiatan penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam rangka

pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengurus lumbung. Kekurangan tersebut disebabkan karena selama ini lumbung pangan masih berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosial, sedang lumbung pangan modern diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi ekonomi.

Sehubungan dengan permasalahan itu maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan latihan peningkatan kualitas SDM bagi pengurus dalam rangka pemberdayaan lumbung pangan.

ii. Tujuan.

- a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus lumbung didalam upaya pemberdayaan lumbung pangan.
- b. Meningkatkan kinerja lumbung pangan masyarakat.
- c. Meningkatkan cadangan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat.

iii. Sasaran

Pengurus lumbung pangan masyarakat.

iv. Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan manajemen pemberdayaan lumbung pangan akan dilaksanakan 3 kali, pada bulan Maret, Juni dan Oktober 2015 di Provinsi Jawa Tengah.

v. Output

Terlaksananya Pelatihan manajemen pemberdayaan lumbung pangan sebanyak 3 kali (1 angkatan 40 orang).

vi. Outcome

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus lumbung pangan dalam memberdayakan lumbung pangan.
- Meningkatnya cadangan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat.

g. Pelatihan Peningkatan Kualitas Cadangan Pangan Masyarakat.

i. Latar Belakang.

Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah desa/kalurahan dan masyarakat sesuai dengan kondisi spesifik daerah. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing. Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat.

Pangan yang berfungsi sebagai cadangan pangan tentulah sedapat mungkin bersifat tahan lama sampai batas waktu tertentu. Hal ini menyebabkan kualitas pangan yang disimpan pun harus memenuhi syarat tertentu sehingga masih layak ketika akan dikonsumsi. Untuk itu perlu diadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas cadangan pangan masyarakat.

ii. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas dan jaminan mutu pangan, sehingga mampu merencanakan dan melaksanakan proses produksi pangan sesuai kaidah / pedoman teknis yang ada sehingga pangan yang dihasilkan berkualitas atau mempunyai jaminan mutu, seperti : tidak tercemar bahan berbahaya, penampilan bagus, rasa yang enak, gizi yang tinggi, aman bagi konsumen secara konsisten atau produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan tahan lama dalam penyimpanan.

iii. Sasaran:

Sebanyak 120 orang peserta yang terbagi menjadi 3 angkatan (@ 40 orang), terdiri dari :

- Pengelola CPPD;

- Pembina/Ketua/Anggota Pokja III TP PKK Kabupaten/Kota.

iv. Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan Peningkatan Kualitas Cadangan Pangan Masyarakat akan dilaksanakan pada bulan Februari, April dan Agustus 2015. Tempat pelaksanaan di Provinsi Jawa Tengah.

v. Output :

- Terselenggaranya pelatihan peningkatan kualitas cadangan pangan masyarakat sebanyak 3 kali (3 angkatan) yang diikuti oleh 120 orang peserta.

vi. Outcome :

- Tersediannya cadangan pangan masyarakat yang berkualitas;
- Terwujudnya deversifikasi Cadangan pangan masyarakat yang layak dikonsumsi dan tahan lama dalam penyimpanan;
- Teridentifikasinya permasalahan yang timbul dalam peningkatan kualitas cadangan pangan masyarakat.

h. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Ketahanan Pangan

i. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, diperlukan proses P (*Planning*), O (*Organizing*), A (*Actuating*), dan C (*Controlling*). Demikian pula untuk terwujudnya ketahanan pangan, diperlukan proses-proses tersebut. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian tak akan dapat berjalan. Dengan perencanaan maka dapat ditetapkan tujuan pembangunan, siapa sasarannya, apa saja kegiatannya serta waktu pelaksanaannya.

Secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah,

mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Pendekatan yang ditempuh dalam membangun ketiga subsistem tersebut adalah koordinasi dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Oleh karena itu dalam perencanaan Ketahanan Pangan perlu adanya keterlibatan berbagai pihak, tidak terkecuali Tim Pangan Desa dan Pengurus KWT yang mengelola pemanfaatan pekarangan, sehingga perlu dilakukan Pelatihan Perencanaan Partisipatif Ketahanan Pangan bagi Tim Pangan Desa dan Pengurus KWT Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

ii. Tujuan

- Memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya Tim Pangan Desa Mandiri Pangan dan Pengurus KWT Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara partisipatif agar nantinya dapat diaplikasikan dan dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan di wilayahnya masing-masing.
- Menggali informasi wilayah, pengidentifikasian potensi, masalah sampai pada penentuan skala prioritas pembangunan ketahanan pangan masing-masing desa di lokasi Desa Mandiri Pangan dan Pemanfaatan Pekarangan secara khusus.

iii. Sasaran:

- Tim Pangan Desa, Gapoktan LDPM, Pengurus KWT Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan kelompok pengolah pangan lokal.

iv. Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan Perencanaan partisipatif Ketahanan Pangan akan dilaksanakan pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Oktober 2015.

v. Output :

- Terselenggaranya pelatihan Perencanaan partisipatif Ketahanan Pangan yang diikuti oleh 40 orang peserta (per angkatan) berasal dari Kabupaten/Kota lokasi kegiatan BKP Prov. Jawa Tengah.

vi. Outcome :

- Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan Tim Pangan Desa, Gapoktan LDPM, Pengurus KWT Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan kelompok pengolah pangan lokal dalam membuat perencanaan partisipatif.

i. Pelatihan Manajemen Pemberdayaan LKD

i. Latar belakang.

Desa Mandiri Pangan adalah suatu desa/kelurahan masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub sistem Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan, untuk mendukung program aksi tersebut, perlu adanya Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang berfungsi untuk mengelola keuangan sebagai sumber permodalan. Sehingga perlu adanya peningkatan ketrampilan pada pengelolaan LKD.

ii. Tujuan.

Tujuan kegiatan Pelatihan Manajemen Pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa adalah meningkatkan pengetahuan peranan dan fungsi Lembaga Keuangan Desa dengan manajemen usaha yang baik

iii. Sasaran

Pengurus Lembaga Keuangan Desa di Desa Mandiri Pangan

iv. Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan manajemen pemberdayaan lumbung pangan akan dilaksanakan 3 kali, pada bulan April, September dan November 2015 di Provinsi Jawa Tengah

v. Output

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pemberdayaan LKD sebanyak 3 kali (1 angkatan 40 orang).

vi. Outcome

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM pengurus LKD dalam mengelola keuangan.

j. Pelatihan Manajemen Pemberdayaan LDPM

i. Latar belakang

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan Gapoktan di wilayah sentra produksi padi agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi pangannya di saat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saat paceklik. Pada umumnya di saat panen raya bersamaan dengan datangnya musim hujan, dimana petani mengalami kesulitan untuk mengeringkan gabah sehingga mereka menjual kepada pelepas uang dengan harga yang sangat murah. Dampaknya harga gabah/beras di tingkat petani jatuh sehingga petani sebagai produsen pangan selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sedangkan di sisi lain, di saat mereka tidak mempunyai panen (saat paceklik), petani akan menjadi konsumen, dimana mereka membutuhkan akses terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.

Mengingat petani selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan khususnya dalam menghadapi panen raya maupun menghadapi paceklik, Pemerintah memberikan fasilitas yang memotifasi petani agar mereka tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi membangun kebersamaan dalam bentuk kumpulan petani dalam satu wadah kelompok tani (Poktan) ataupun bergabung dalam wadah gabungan kelompok tani (Gapoktan). Terbentuknya wadah Gapoktan merupakan keinginan sendiri atas dasar adanya kesamaan kepentingan dan kesamaan masalah yang dihadapi, sehingga dengan bergabung mereka akan mempunyai kekuatan yang sama untuk meningkatkan posisi tawar khususnya dalam mendistribusikan hasil panen pada saat panen raya maupun mengembangkan jejaring pemasaran dengan mitra usahanya sehingga dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi Gapoktan dan anggotanya.

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat / LDPM, merupakan kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha distribusi / pemasaran / pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses

terhadap sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah sentra pangan selama 5 tahun untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani;

Kelompoktani/Gapoktan sering dihadapkan pada berbagai masalah antara lain : Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan penyimpanan dan pemasaran serta pengembangan cadangan pangan. Selain itu pada saat panen raya harga pangan kecenderungan selalu jatuh, dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk mendistribusikan keluar wilayahnya, menurunnya kualitas produksi, minimnya fasilitas pengolahan dan penyimpanan. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka pemberdayaan gapoktan dalam rangka peningkatan kemampuan gapoktan dalam usaha pengelolaan dan pemasaran maka diperlukan pelatihan manajemen pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

Penguatan LDPM dimaksudkan untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani pada saat menghadapi panen raya serta mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani pada saat musim paceklik dengan kegiatan-kegiatan : a) Pengembangan unit-unit usaha (distribusi/ pemasaran/ pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan), b) Pembangunan sarana penyimpanan milik Gapoktan. Hal ini dimaksudkan agar Gapoktan dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Stabilisasi harga dilakukan untuk membantu memecahkan masalah jatuhnya harga produk petani yang biasanya terjadi pada saat panen raya karena melimpahnya pasokan (produksi). Situasi tersebut biasanya dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga berdampak merugikan petani produsen.

Dalam rangka menjaga stabilisasi harga tersebut, maka Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan akan menggunakan dana Bansos Kegiatan Penguatan-LDPM untuk melakukan kegiatan usaha jual-beli gabah/beras setelah total dana Bansos yang di terima oleh Gapoktan dikurangi untuk biaya pembuatan/rehabilitasi gudang dan pengadaan/pembelian gabah/beras untuk cadangan pangan, Pembelian gabah/beras diutamakan dari petani anggota Gapoktan

minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selanjutnya Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan dapat secara profesional memasarkan gabah/beras tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang optimal untuk meningkatkan pendapatan anggota Gapoktan.

Dengan adanya pelatihan manajemen, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu membangun sarana untuk mampu mengembangkan usaha di bidang pemasaran pangan, dan mampu menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan pokok, sehingga mampu meningkatkan jejaring kemitraan antara gapoktan maupun pengusaha lain di luar Gapoktan sehingga terjadi perbaikan pendapatan di tingkat petani anggotanya dan memperkuat kemampuan Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu mendekatkan akses pangan anggotanya saat menghadapi paceklik.

Dana Bansos Kegiatan Penguatan-LDPM yang sudah dialokasikan untuk Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan usaha jual-beli gabah/beras dengan tujuan untuk : (a) menciptakan stabilisasi harga di tingkat petani di wilayah Gapoktan, (b) meningkatkan pemasaran produksi hasil petani anggota Gapoktan dan (c) meningkatkan pendapatan petani anggota Gapoktan.

ii. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam menghimpun dan mengembangkan / memupuk dana yang dikelola oleh masing-masing unit usaha Gapoktan dari usaha bisnis yang dikelolanya
2. Meningkatkan pemahaman Gapoktan sehingga mampu melaksanakan menyusun perencanaan teknis dalam rangka mengembangkan suatu usaha, dan cara melakukan perencanaan keuangan dalam rangka pengembangan usaha;
3. Gapoktan memahami dan dapat menjelaskan kepada Gapoktan batasan-batasan dalam pengelolaan dana Bansos Penguatan-LDPM untuk kegiatan usaha jual-beli gabah/beras;
4. Meningkatkan keterampilan administrasi Gapoktan sehingga mampu melakukan pencatatan yang dapat menyajikan data dan

informasi seluruh transaksi keuangan dan kondisi barang yang dimiliki selama satu periode pembukuan tertentu ke dalam Laporan Keuangan Laporan fisik (Barang), hal ini penting dilakukan sebagai wujud dari akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang, karena dengan melakukan pembukuan seluruh transaksi akan diketahui penggunaannya dengan baik.

lii. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Ketua/Pengurus Gapoktan.

iv. Lokasi

Lokasi pelaksanaan pelatihan Manajemen Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) diselenggarakan di Kabupaten di Jawa Tengah.

v. Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Kabupaten di Jawa Tengah
- Waktu : Bulan Mei, dan November 2015.

vi. Output

- Terlaksananya pelatihan Manajemen Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- Terlatihnya Ketua/Pengurus Gapoktan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dalam Manajemen pengelolaan dan pemasaran produk.

vii. Outcome

- Meningkatnya pemahaman peserta terhadap Manajemen pengelolaan dan pemasaran produk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
- Meningkatkan pendapatan dan permodalan gapoktan dalam unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

k. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Akses Pangan.

i. Latar belakang

Permasalahan akses pangan terutama yang berakibat pada keadaan yang bersifat kronis di Indonesia merupakan hal penting yang memerlukan perhatian. Sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan masalah tersebut maka dilakukan kegiatan analisis

akses pangan yang kegiatannya meliputi pemantauan, analisis, dan evaluasi faktor-faktor penyebabnya, dilanjutkan dengan perumusan strategi dan penyusunan program sebagai landasan kebijakan yang dioperasionalkan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah.

Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam mengatasi masalah akses pangan selain faktor fisik seperti jalan dan kemampuan finansial. Pengetahuan dan ketrampilan sangat diperlukan oleh masyarakat desa guna mengakses pangan yang ada di wilayahnya. Tanpa pengetahuan dan ketrampilan yang baik akan sulit meningkatkan ketahanan pangan wilayah.

ii. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam menghimpun dan mengembangkan serta akses pangan yang ada di wilayahnya.
- Meningkatkan semangat gotong-royong dan kekeluargaan diantara masyarakat desa.
- Meningkatkan perekonomian dan memantapkan ketahanan pangan di wilayah desa.

iii. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah warga masyarakat/desa di lokasi kegiatan padat karya pangan.

iv. Lokasi

Lokasi pelaksanaan pelatihan Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan akses pangan diselenggarakan di Jawa Tengah.

v. Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Kabupaten di Jawa Tengah
- Waktu : Bulan Maret, Mei, November 2015.

vi. Output

- Terlaksananya pelatihan Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan akses pangan.
- Terlatihnya masyarakat desa dalam mengakses pangan yang ada di wilayahnya.

B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat

i. Latar Belakang

Dalam rangka Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (pasal 23 ayat 1) yang mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional”. Selanjutnya (Pasal 23 ayat 2) dijelaskan bahwa “Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat”

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan/dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah, mutu, keamanan dan merata serta terjangkau. Dari sisi konsumsi adanya kemampuan setiap rumah tangga mengakses pangan yang cukup bagi masing-masing anggotanya untuk tumbuh sehat produktif dari waktu ke waktu, maka diperlukan sistem distribusi yang efisien dan efektif yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan ke seluruh golongan masyarakat. Ketahanan pangan suatu wilayah tercermin dari ketersediaan pangan secara nyata, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Evaluasi ketersediaan pangan berdasarkan ARAM 2 tahun 2014 bahwa Jawa Tengah menunjukkan **Jawa Tengah sangat tahan pangan**, beberapa komoditas pangan mengalami surplus yaitu beras 2,188,121 ton, jagung 2.634,557 ton, ubi kayu 3,467,947 ton, ubi jalar 131,565 ribu ton, kacang tanah 98,275 ton, kacang hijau 86,529 ton, daging 74.427 ribu ton, telur 73.457 ribu ton, susu 13.594 ton, gula 24.068 ton, Ikan 291.114 Ton, Akan tetapi masih ada satu komoditas yang masih kurang yaitu: **kedelai minus 217,092 ton**. Meskipun satu komoditas masih mengalami defisit yaitu kedelai. Tapi dengan adanya surplus beberapa komoditas pangan ini, Jawa Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Berdasarkan NBM tahun 2014, Dari sisi ketersediaan energi dan protein sudah berada di atas angka kecukupan, dari perhitungan NBM tahun 2014 (data tahun 2013) ketersediaan energi sebesar 4.099. Kkal/ kap/hari, protein 93.42 gr/kap/hari.

Ketersediaan pangan perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang.

Penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan hanya dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk dalam negeri.

Pada daerah terisolasi seperti di kepulauan karimunjawa sering muncul permasalahan pada penduduknya yaitu: terkait ketersediaan pangan karena aksesibilitas menuju Kepulauan ini sangat bergantung pada kondisi pelayaran. Sehingga seringkali bila terjadi gangguan pelayaran yang disebabkan oleh gangguan cuaca, wilayah Kepulauan ini mengalami permasalahan yang kompleks, terutama dalam hal penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi warganya. Masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya pasokan bahan makanan, sehingga seringkali warga terancam kelaparan, melambungnya harga sembako dan lain sebagainya.

Pulau Kemujan dengan luasan 1.501 ha memiliki lahan produktif pertanian seluas 210 ha, sedangkan Parang (termasuk Nyamuk) dengan luasan 690 ha, sebagian besar lahannya produktif untuk pertanian, yakni 400 ha. Lahan pertanian produktif tersebut di luar lahan konservasi yang harus dijaga dan dilindungi.

Agar ketersediaan pangan dapat diketahui perkembangannya setiap saat, maka perlu dilakukan pelaporan secara rutin dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu ditempuh dalam mengembangkan ketersediaan pangan pada setiap saat adalah dengan mengembangkan cadangan pangan baik cadangan pangan pemerintah maupun cadangan pangan masyarakat dengan cara melaporkan perkembangannya setiap saat.

ii. Tujuan

Tujuan pengembangan ketersediaan dan cadangan pangan di masyarakat adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat ketersediaan pangan di masyarakat berdasarkan indikator yang telah ditentukan;
2. Mengetahui tingkat kelancaran aliran komoditas pangan sepanjang tahun, terutama pada hari-hari besar keagamaan nasional;
3. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada terkait ketersediaan pangan dan akses pangan di masyarakat;
4. Memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui peningkatan pendapatan petani/keluarga;
5. Meningkatkan ketersediaan pangan di Karimunjawa.

iii. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengembangan ketersediaan dan cadangan pangan adalah :

1. Meningkatnya profesionalisme petani dalam memproduksi hasil pertanian;
2. Terpantaunya ketersediaan pangan di daerah/provinsi;
3. Pengembangan Ketahanan Pangan di Kepulauan Karimunjawa dengan hasil tersedianya cadangan pangan dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan melalui Pengiriman bahan pangan (beras) sebanyak 2 tahap dengan biaya paket @ Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

iv. Indikator

1. Input

- Tersedianya dana Rp. 329.450.000,-
- Tersedianya data perkembangan ketersediaan dan cadangan pangan di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Tersedianya SDM Pelaksana ketersediaan dan cadangan pangan Provinsi Dan kabupaten/Kota.
- Meningkatkan ketersediaan pangan di Karimunjawa

2. Keluaran (Out put)

- Terlaksananya pertemuan pemantauan ketersediaan pangan;
- Terlaksananya pemantauan Ketersediaan Pangan menjelang HBKN.
- Terlaksananya Penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- Sosialisasi pengembangan Cadangan pangan di Karimunjawa;
- Bantuan Pangan ke Masyarakat Karimunjawa.

4. Hasil (Out come)

- Tersedianya data ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat;
- Tersedianya data ketersediaan pangan menjelang HBKN;
- tersedianya analisis ketersediaan pangan jawa tengah tahun 2015;
- tersedianya cadangan p;angan di karimunjawa;

5. Manfaat (Benefit)

Diketahuinya kantong-kantong ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat;

6. Dampak (Impac)

Meningkatnya kualitas data ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat.

v. Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat bersumber dari dana APBD Jawa Tengah TA 2015 sebesar Rp.329.450.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralokasi di Provinsi dan kabupaten.

A. Rencana Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan cadangan Pangan didukung oleh dana APBD Tahun Anggaran 2015 dengan kegiatannya meliputi :

1. Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan;
2. Pemantauan Ketersediaan Pangan Menjekang HBKN.
3. Pemantauan ketersediaan Pangan;
4. Penyusunan NBM.
5. Analisis Keterediaan Pangan.
6. Pengadaan bahan pangan untuk kepulauan Karimunjawa.
7. Apresiasi Penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM);

B. Pelaksanaan Kegiatan.

1. Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Cadangan pangan;

Kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil pengembangan Cadangan Pangan dan situasi dan kondisi produksi pangan dari masing-masing subsektor sekaligus untuk menghitung ketersediaan pangan di Jawa Tengah. Ini perlu dilakukan dengan maksud agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang timbul dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat sekaligus untuk mengadakan pembinaan, pengembangan alternatif peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan.

Pertemuan akan diselenggarakan di tingkat Provinsi dengan peserta sebanyak dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, kegiatan ini ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2015.

2. Pemantauan Keterdsediaan Pangan Menjelang HBKN.

Rapat Koordinasi Pemantauan Ketersediaan pangan menjelang HBKN Hari Raya Idul Fitri 1436/2015. kegiatan ini dimaksudkan untuk tingkat kecukupan ketersediaan pangan khususnya menjelang hari raya idul fitri, karena pada saat ini ada kenaikan antara *Deemand and Suply* terhadap semua kebutuhan pokok masyarakat, hasil dari kegiatan ini berupa rekomendasi kecukupan pangan atau kekurangan pangan di tingkat

masyarakat, apabila ada potensi minus terhadap salah satu komoditi pangan, maka ada kebijakan untuk mendatangkan pangan dari luar

Pertemuan akan diselenggarakan di tingkat Provinsi dengan peserta sebanyak 45 orang berasal dari 35 kabupaten/kota dan Dinas/Instansi terkait tingkat provinsi. Pertemuan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan minggu akhir bulan Juni 2015.

3. Pemantauan Ketersediaan Pangan;

Kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan cadangan pangan di Jawa tengah tahun 2015, hasil pemantauan ketersediaan pangan berupa kondisi surplus atau minus terhadap semua komoditi pangan, kegiatan ini diikuti oleh kepala Badan/Kantor/Unit Kerja ketahanan pangan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan SKPD terkait di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, semua kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli 2015.

4. Penyusunan NBM.

Penyusunan NBM dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui penggunaan serta ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk maupun perubahannya di suatu wilayah pada waktu tertentu (setiap tahun), memperoleh gambaran detail tentang tingkat ketersediaan pangan (defisit atau surplus). Penyusunan NBM akan dilaksanakan di provinsi yang akan berkoordinasi dengan Dinas/Intansi yang terkait dengan data Neraca Bahan Makanan (NBM). Kegiatan penyusunan NBM direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2015.

5. Analisis Ketersediaan pangan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisa ketersediaan pangan, dari data-data ketersediaan pangan kabupaten/kota untuk digunakan sebagai tolok ukur mengetahui seberapa lama ketersediaan pangan bisa mencukupi untuk semua konsumsi pangan masyarakat di Jawa Tengah, kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan September 2015.

6. Pengadaan bahan pangan untuk cadangan pangan masyarakat di Karimunjawa.

Pemberian stimulan kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat di kepulauan karimunjawa diharapkan untuk

meningkatkan stok cadangan pangan sebagai antisipasi keterdiaan pangan pada musim baratan, dimana musim tersebut semua akses masuk akan terganggu. kegiatan ini berupa pemberian stimulant dari pemerintah yang digunakan untuk cadangan pangan masyarakat berupa bahan pangan (Beras) di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara sebanyak 2 paket pengiriman, rencana pengiriman bulan April 2015 dan bulan September 2015, biaya perpaket sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Apresiasi Penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sarana memberikan koreksi, penilaian, kritik saran, dan saran terhadap hasil penghitungan NBM yang dilakukan di tingkat Provinsi, sebelum di publikasikan terlenih dahulu dilakukan finalisasi penghitungan, apabila dari masing-masing instansi atau sumber data sudah dinyatakan benar, final maka hasil akhir sementara bisa dipublikasikan, kegiatan ini direncnakana pada bulan Oktober 2015.

2. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah

i. Latar Belakang

Arah kebijakan peningkatan sistem cadangan pangan, pada prinsipnya adalah Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;

- Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan cadangan pangan;
- Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam cadangan pangan pangan
- Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan cadangan pangan;
- Mendorong pengembangan cadangan pangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam cadangan pangan pangan
- Mendorong sinkronisasi pembiayaan program antara APBN,

APBD, dan dana masyarakat dalam pengembangan cadangan pangan;

- Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan;
- Mendorong pembentukan cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota)
- Mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi, rawan pangan, miskin, defisit produksi, terisolir, dan atau terpencil;
- Memantau cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Pentingnya pengembangan cadangan pangan disebabkan beberapa hal sebagai berikut : (a) masih banyak penduduk miskin dan rawan pangan, berdasarkan hasil Susenas 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,66 persen dan penduduk rawan pangan yang Angka Kecukupan Gizi (AKG) dibawah 70 persen sebesar 17,41 persen; (b) situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat yang telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan) sehingga menurut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan; (c) masa panen dan tidak panen yang mencolok mengharuskan adanya cadangan

pangan, untuk mengatasi distribusi pangan antar waktu; (d) cadangan pangan dapat dijadikan instrumen untuk stabilisasi harga khususnya untuk mengatasi pola pangan musiman, serta mengantisipasi goncangan dari pasar internasional; (e) banyaknya kejadian darurat sehingga memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah.

Pentingnya pengembangan cadangan pangan juga dikarenakan kondisi sebagai berikut : (a) masih banyaknya penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan perlindungan jaminan kecukupan pangan; (b) banyak kabupaten yang termasuk kategori rawan pangan; (c) banyak daerah yang rentan terhadap bencana alam; dan (d) masih banyak daerah yang terisolir, khususnya pada periode tertentu seperti pada saat kekeringan, ombak tinggi dan banjir.

Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat perlu dilakukan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pengembangan ini akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap cadangan pangan pemerintah pusat.

Adanya ledakan penduduk perlu diimbangi dengan ketersediaan pangan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk menyediakan pangan yang cukup dibutuhkan lahan yang cukup dan produktif. Sedangkan disisi lain, ledakan penduduk juga menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, kondisi paradoxal ini juga melanda Jawa Tengah.

Produksi pangan/cadangan pangan antara daerah satu dengan lainnya tidak sama maka untuk mewujudkan ketahanan pangan salah satunya dengan peningkatan distribusi cadangan pangan, dengan kegiatan ini diharapkan akan mengurangi kesenjangan ketersediaan pangan/cadangan pangan antara daerah Kabupaten/Kota.

Ketersediaan pangan yang cukup baik antar waktu maupun

antar daerah sangat diperlukan untuk menghadapi adanya bencana alam (kekeringan, banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin, serangan hama penyakit pada tanaman padi) yang selalu terjadi setiap tahun di Jawa Tengah, maka untuk menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah tersebut diperlukan adanya cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi, maupun cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat.

Untuk itu diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan tanggungjawab dan kemampuannya masing-masing.

Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan Nasional. Sedangkan pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan, fasilitasi, dan advokasi. Selanjutnya karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan petani dengan skala usaha kecil oleh masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ketahanan Pangan disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat, Secara bertahap pemerintah provinsi Jawa Tengah mulai tahun anggaran 2009, telah mengadakan cadangan pangan pemerintah provinsi, serta mendistribusikannya ke kab/Kota yang membutuhkannya. Untuk Tahun anggaran 2015 nanti direncanakan sebanyak 267 Ton gabah .

Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan kondisi spesifik daerah cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing.

Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat.

Cadangan pangan Pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan, serta mengantisipasi terjadinya kekurangan dan keadaan darurat.

ii. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah mengembangkan cadangan pangan baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya untuk cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan cadangan pangan masyarakat. Untuk itu sasaran masing-masing sub kegiatan adalah:

1. Pengadaan dan Pengembangan Cadangan Pangan

- a. Pengadaan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah
- b. Apresiasi pengembangan cadangan pangan dan distribusi cadangan pangan dengan peserta dari provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak 1 kali
- c. Pertemuan Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat.
- d. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas cadangan pangan.

2. Distribusi dan Pengelolaan Cadangan Pangan

- a. Distribusi cadangan pangan di Kabupaten/Kota yang membutuhkan pangan dalam keadaan darurat untuk mengatasi rawan pangan kronis dan atau rawan pangan transien.
- b. Rakor Distribusi Cadangan Pangan;
- c. Apresiasi Pengelolaan Cadangan Pangan;

- d. Pembinaan distribusi cadangan pangan untuk di kabupaten/kota Jawa Tengah

3. Administrasi, Perencanaan, dan Monitoring Evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan cadangan pangan adalah pelaksana kegiatan.

iii. JENIS KEGIATAN

A. SUB KEGIATAN PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN.

Sub kegiatan pengadaan dan pengembangan cadangan pangan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain ;

- a. Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 267 ton Gabah;
- b. Apresiasi pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pertemuan dalam rangka peningkatan kualitas Cadangan Pangan;
- d. Pembinaan kualitas dan kuantitas CP dalam rangka pengembangan cadangan pangan

a. Sub Sub Kegiatan : Pengadaan Cadangan Pangan

a) Tujuan

Menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah (gabah). Provinsi Jawa Tengah gabah untuk daerah rawan bencana /rawan pangan (rawan pangan transient) diwilayah Jawa Tengah.

b) Sasaran

Masyarakat yang terkena bencana alam maupun masyarakat rawan pangan transient.

c) Lokasi

Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang.

d) Output

Terlaksananya pengadaan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah sebanyak kurang lebih 267 ton GKG kurang lebih setara dengan 150 Ton beras untuk antisipasi dan pemberian cadangan pangan pada daerah rawan pangan transient dan rawan bencana di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang membutuhkan, melalui lelang sederhana LPSE.

b. Sub Sub Kegiatan Apresiasi Pengembangan Cadangan Pangan

a) Tujuan

- 1) Mewujudkan persamaan persepsi antara petugas kabupaten/kota dan provinsi di dalam melaksanakan program ketahanan pangan khususnya dalam pengembangan cadangan pangan;
- 2) Membahas berbagai permasalahan, hambatan, tantangan dan upaya yang dilakukan dalam pengembangan cadangan pangan di wilayah, sebagai bahan masukan/pertimbangan perbaikan program kegiatan yang akan datang.

b) Sasaran

Petugas yang menangani ketahanan pangan dari kabupaten/kota di Jawa Tengah dan para pemangku kepentingan yang berjumlah 40 orang.

c) Output

Terselenggaranya rapat koordinasi yang diikuti oleh petugas yang menangani ketahanan pangan sesuai tugas dan fungsinya yang berasal dari petugas provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 40 orang.

d) Outcome

Didapatnya persamaan persepsi antara petugas kabupaten/kota dan provinsi di dalam

melaksanakan program ketahanan pangan, khususnya dalam pengembangan cadangan pangan, dan terpecahkannya hambatan dan permasalahan yang ada.

a. **Sub Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Cadangan Pangan Masyarakat.**

a) **Tujuan**

- 1) Mewujudkan persamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah di dalam melaksanakan program ketahanan pangan khususnya dalam memberdayakan cadangan pangan masyarakat;
- 2) Membahas berbagai permasalahan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi serta cara pemecahannya, dalam memberdayakan cadangan pangan masyarakat, sebagai bahan masukan/ pertimbangan perbaikan program kegiatan yang akan datang.

b) **Sasaran**

Masyarakat (Petani, kelompok tani, ibu rumahtangga, pengurus dan Pembina PKK, pelaku usaha pangan) yang menangani ketahanan pangan ditingkat rumahtangga atau masyarakat, berjumlah 40 orang .

c) **Output**

Terselenggaranya pertemuan dalam rangka pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas cadangan pangan masyarakat yang diikuti oleh masyarakat , sebanyak 40 orang, dan pembinaan secara langsung ke masyarakat/ instansi.

d) **Outcome**

Outcome yang diperoleh adalah meningkatnya kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat pelaku kegiatan serta tersedianya tenaga kerja khususnya tenaga kerja dari ibu-ibu yang biasa mengolah makanan tersebut, untuk membantu pekerjaan para suami serta meningkatnya

kualitas hidup dari masyarakat.

B. SUB KEGIATAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

a. Sub Sub Kegiatan : Distribusi Cadangan Pangan

a) Tujuan

Meningkatkan distribusikan cadangan pangan dari gudang cadangan pangan provinsi ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan yaitu tempat-tempat yang mengalami rawan pangan transien (rawan pangan akibat bencana alam) harus terdistribusi dengan cepat, aman dan sampai di lokasi kejadian atau mendistribusikan dari daerah / wilayah yang kelebihan pangan kepada wilayah yang kurang pangan sehingga antar wilayah dan antar waktu terjadi keseimbangan kebutuhan dan persediaan pangan sehingga tidak terjadi gejolak.

b) Sasaran

- Penduduk yang menderita rawan pangan kronis
- Penduduk yang menderita rawan pangan transien (rawan pangan akibat bencana alam)
- Prosedur pengajuan bantuan adalah :
 - Terjadinya rawan pangan transien di masyarakat akibat adanya bencana alam (banjir, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, gunung meletus, gagal panen, kekeringan, dll)
 - Petugas Desa/Kelurahan melaporkan ke BKP/KKP Kabupaten/Kota atas terjadinya bencana tersebut dan mengajukan bantuan bahan pangan (beras) untuk tanggap darurat.
 - Badan/Kantor Ketahanan Pangan

Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan menginventarisasi ke lokasi bencana untuk menghitung kerugian sekaligus menghitung kebutuhan bantuan cadangan pangan.

- Selanjutnya Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan permohonan bantuan cadangan pangan ke Pemerintah Provinsi Cq. Badan Ketahanan Pangan, dengan tembusan surat ke Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP) Provinsi Jawa Tengah . Surat pengajuan ditandatangani oleh Bupati/Walikota, dengan disertai data jumlah KK yang mengalami bencana/ rawan pangan, dan jumlah bantuan yang diajukan;
- Setelah mendapat persetujuan dari Ka. BKP, Ka. BPCP atas perintah Ka. BKP mengeluarkan cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh BPCP dari gudang penyimpanan untuk didistribusikan;
- Untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, BPCP berkoordinasi dengan petugas BKP/KKP Kabupaten/Kota

c) Lokasi

Provinsi / Kabupaten / Kota di Jawa Tengah

d) Output

Terlaksananya distribusi cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah sebanyak kurang lebih 150 ton beras untuk antisipasi dan pemberian cadangan pangan pada rawan pangan transient di Kabupaten /

Kota di Jawa Tengah yang membutuhkan.

e) **Out Come**

Tersedianya cadangan pangan pemerintah yang siap salur untuk digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat secara cepat dan tepat, baik saat bencana maupun pasca bencana.

b. **Sub Sub Kegiatan : Pembinaan dan Rakor Distribusi Cadangan**

a) **Tujuan**

- 1) Meningkatkan distribusi cadangan pangan pemerintah provinsi untuk bantuan tanggap darurat maupun pasca bencana dan mendistribusikan dari daerah / wilayah yang kelebihan pangan kepada wilayah yang kurang pangan sehingga antar wilayah dan antar waktu terjadi keseimbangan kebutuhan dan persediaan pangan sehingga tidak terjadi gejolak.
- 2) Pembinaan dan pengembangan distribusi cadangan pangan masyarakat.

b) **Sasaran**

Petugas yang menangani ketahanan pangan dari kabupaten/kota di Jawa Tengah dan para pemangku kepentingan yang berjumlah 40 orang.

c) **Output**

Terselenggaranya rapat koordinasi yang diikuti oleh petugas yang menangani ketahanan pangan sesuai tugas dan fungsinya yang berasal dari petugas provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 40 orang.

d) **Outcome**

Didapatnya persamaan persepsi antara petugas kabupaten/kota dan provinsi di dalam melaksanakan dalam pendistribusian cadangan

pangan untuk tanggap darurat dan pasca bencana, dan terpecahkannya hambatan dan permasalahan yang ada dalam pendistribusian cadangan pangan.

c. Sub Sub Kegiatan : Pengelolaan Cadangan Pangan

a) Tujuan

Meningkatkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar distribusi berjalan lancar.

b) Sasaran

Rakor pengelolaan Cadangan Pangan adalah Petugas yang menangani distribusi Cadangan pangan dari kabupaten/kota di Jawa Tengah dan para pemangku kepentingan yang berjumlah 40 orang.

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Balai Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

c) Output

Terselenggaranya rapat koordinasi yang diikuti oleh petugas yang menangani ketahanan pangan sesuai tugas dan fungsinya yang berasal dari petugas provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 40 orang

Terpeliharanya cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

d) Lokasi :

Rakor di Provinsi;

Pengelolaan Cadangan Pangan di desa Krincing, Kecamatan Secang, Kab. Magelang.

e) Outcome

Adanya persamaan persepsi antara petugas kabupaten/kota dan provinsi di dalam melaksanakan dalam pengelolaan cadangan pangan, dan

terpecahkannya hambatan dan permasalahan yang ada dalam pendistribusian cadangan pangan.

Terjaganya mutu dan kualitas cadangan pangan pemerintah Jawa Tengah yang ada di Balai pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

C. SUB KEGIATAN UMUM, ADMINISTRASI DAN PERENCANAAN

a) Tujuan

- 1) Tujuan Perencanaan adalah dapat mencapai efektivitas dan efisiensi, dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan setiap tahapan apakah terjadi penyimpangan atau ketidak-sesuaian dengan perencanaan yang telah disusun sehingga jika ada penyimpangan atau ketidak-sesuaian dapat segera diperbaiki, sedangkan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan yang telah selesai sesuai atau tidak dengan perencanaan. Apakah kegiatan berhasil atau tidak, ada manfaat atau tidak sehingga kegiatan selanjutnya perlu diteruskan atau diberhentikan
- 3) Tersedianya Sarana, prasarana dan SDM untuk operasional RMU, Distribusi Cadangan Pangan

b) Sasaran

- 1) Sasaran kegiatan adalah 2 sub kegiatan pengembangan cadangan pangan yang dikelola oleh Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP/ Provinsi Jawa Tengah) yang masing-masing adalah kegiatan ;
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengadaan Cadangan Pangan dan Sub-sub kegiatannya.
- 3) Sub Distribusi cadangan pangan dan Sub-sub kegiatannya.

c) **Output**

- 1) Tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan rencana yang tersusun;
- 2) Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah Pelaporan Kegiatan yang berisikan Hasil pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tertentu yang menyajikan permasalahan, Pemecahan Masalah sampai apakah kegiatan tersebut benar atau tidak, perlu dilanjut untuk tahap selanjutnya dan lain sebagainya.

d) **Out Come**

- 1) Out Come dari kegiatan perencanaan, terlaksanannya kegiatan dengan efisien dan efektif, tepat sasaran;
- 2) Terlaksanannya kegiatan distribusi dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah;
- 3) Monitoring dan Evaluasi kegiatan adalah tersedianya data dan informasi yang akurat dan keputusan akan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan atau tidak berkaitan dengan manfaat dan permasalahan yang ada.

iv. Pembiayaan

Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersumber dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.580.000.000,-

3. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

v. Latar Belakang

Lumbung pangan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan sebagai penyedia cadangan pangan melalui kegiatan penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

Lumbung pangan salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat telah lama berperan dalam pengadaan pangan

terutama dalam musim paceklik. Peranan lumbung di masa lalu lebih bersifat sosial dan sebagai tempat untuk masyarakat di musim paceklik. Peranan lumbung ini pernah diupayakan untuk digantikan oleh kelembagaan alternatif dengan mengintegrasikan seluruh lembaga sosial pedesaan dalam suatu organisasi modern. Namun kelembagaan alternatif tersebut ternyata mengalami kegagalan dan menyebabkan petani selalu berada dalam posisi lemah Sesuai dengan Visi Gubernur Jawa Tengah yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran,
3. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
4. Memperkuat Parisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat,
6. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat merupakan salah satu sarana penunjang ketahanan pangan, yang perlu direvitalisasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan cadangan pangan dan kebutuhan sosial masyarakat. Upaya kelembagaan pangan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan, karena keberadaan lumbung pangan pada masa lalu dipandang cukup efektif dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Revitalisasi tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.

Melalui kelembagaan lumbung pangan diharapkan beberapa kegiatan pasca panen dapat dilakukan, tidak hanya menampung hasil sebagai cadangan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan

kualitas dan mengolah gabah serta memasarkan produk pada saat yang dikehendaki (fungsi tunda jual), sehingga lembaga yang bersangkutan bisa memperoleh nilai tambah bagi anggotanya.

vi. Tujuan

1. Meningkatkan peran kelembagaan lumbung pangan selain berperan sebagai fungsi sosial dalam penyediaan cadangan pangan masyarakat diharapkan juga berperan sebagai fungsi ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar desa sasaran.
2. Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan di masyarakat selain beras dipandang perlu dikembangkan tanaman umbi-umbian yang bervariasi unggul.
3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tambah dengan pengolahan menjadi tepung-tepungan dan pangan olahan lain.

vii. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Pengembangan lumbung pangan masyarakat adalah . Kelompok lumbung pangan masyarakat sebanyak 40 kelompok yang berada di 20 kabupaten dan 1 (satu) Kota.

viii. Indikator Keberhasilan (Output)

- 1 Tersedianya fisik lumbung pangan.
- 2 Berkembangnya organisasi, administrasi dan jaringan usaha lumbung pangan.
- 3 Terisinya lumbung pangan di masyarakat.
- 4 Berkembangnya usaha produktif.

ix. Pelaksanaan:

Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan lumbung pangan masyarakat bersumber dari dana APBD Jawa Tengah TA 2015 sebesar Rp. 967.550.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

A. Rencana Lokasi kegiatan

Rencana kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan lumbung pangan masyarakat Tahun Anggaran 2015 diantaranya adalah untuk bantuan stimulan berupa pengisian bahan pangan (gabah) sebagai bentuk fasilitasi lumbung pangan masyarakat yang dibina Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, APBD Tahun Anggaran 2015. adapun jumlah kelompok yang akan diberikan stimulan bahan pangan (gabah) sebanyak 40 kelompok yang tersebar di 20 kabupaten dan 1 (satu) kota, daftar nama-nama kelompok dan lokasinya sebagai berikut:

No	Kab.	Kec.	Desa	No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok
1	Rembang	Bulu	Mantingan	1	Karyatani	Kaswadi
		Sluke	Langgar	2	Jati Makmur	Darsono
2	Banyumas	Somagede	Somagede	3	Tani Bangkit	Kusmono
		Sokaraja	Lemberang	4	Gotongroyong	Aziz Muslim
3	Boyolali	Kemusu	Wonoharjo	5	Sejahtera	Cipto Hartono
		Andong	Pranggong	6	Setyo Mulyo	Sukardi
4	Kendal	Ringin Arum	Ringin Arum	7	Ringin Makmur	M. Sukardi
		Gemuh	Taman Gede	8	Makmur Tani	Sunardi.
5	Purbalingga	Kemangkon	Bakulan	9	Sri Rejeki	Sutomo.
		Kemangkon	Gambarsari	10	Sri Lestari	Sumarto
6	Pekalongan	Siwalan	Tenggeng Wetan	11	Sidodadi	Caram
		Bojong	Pantianom	12	Sukses Jaya	Sugeng
7	Pemalang	Ulujami	Bumirejo	13	Tani makmur	Wahyu
		Bantarbolang	Sarwodadi	14	Sejahtera	Djabidi
8	Demak	Guntur	Gaji	15	Mangudi Lestari	Maskuri
		Demak	Mulyorejo	16	Sido Mulyo Murni.	Sugiono
9	Sragen	Masaran	Krikilan	17	Pandanwangi	Pardono
		Gemolong	Purworejo	18	Sumber Urip	Kaelani
10	Wonogiri	Jatisrono	Jatisrono	19	Rukun Tani	Sukirno
11	Magelang	Secang	Pirikan	20	Ngudi Rejeki	Anwari
		Kajoran	Bumiayu	21	Jaya Makmur	Achmad Mudd
12	Batang	Gringsing	Kebondalem	22	Subur Makmur	Mahroji.
		Banyuputih	Kalibalik	23	Amrih Rahayu	H. Suyanto
13	Tegal	Adiwarna	Pecangakan	24	Adimakmur	Sunaryo
		Dukuhwaru	Selapura	25	Sumberpangan	Sukardi
14	Kebumen	Bulus Pesantren	Sidomoro	26	Sri Lestari	Ishadi
		Karanggayam	Kebakalan	27	Sidomakmur	Busro Karim
15	Semarang	Bancak	Lembu	28	Bariklana	Kastin
16	Wonosobo	Selomerto	Bumitirto	29	Margomulyo	Mulyanto
		Selomerto	Semayu	30	Langgeng	Nurahmad
17	Jepara	Pakis Aji	Plajan	31	Ngudi Makmur	Ngardi.

		Batealit	Mindahan Kidul	32	Tani Makmur	Khamdi.
18	Kudus	Jekulo	Gondoharum	33	Tani Makmur	Santoso
		Mejobo	Hadiwarno	34	Sido Makmur.	Imam Sudjono
19	Brebes	Ketanggungan	Buara	35	Sri Lestari.	Hardi
		Banjarharjo	Sukareja	36	Aman Abadi	Nurli
20	Cilacap	Dayehuluhur	Panulisan Timur	37	Karyatani	Emon Rasman
		Patimuan	Bulupayung	38	Bulukencana	Samingun
21	Kota Salatiga	Sidorejo	Pulutan	39	Makmur 3	Wahkidun
		.Tingkir	Tingkirol	40	Tani Sri Mulih	Lantip

Kriteria kelompok sasaran calon penerima bantuan stimulant bahan pangan antara lain:

1. Sudah mempunyai kelembagaan yang mantap;
2. Mempunyai kelengkapan organisasi;
3. Memiliki manajemen administrasi dan keuangan yang baik, transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai tabungan kelompok dan mempunyai usaha kelompok.

B. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Pengembangan lumbung pangan masyarakat didukung oleh dana APBD Tahun Anggaran 2015 dengan kegiatannya meliputi :

1. Identifikasi lokasi 40 lokasi kelompok;
2. Konsolidasi lumbung pangan, bagi petugas Kabupaten dan ketua kelompok
3. Pengadaan bahan pangan (Gabah) dan distribusi sampai di 40 lokasi titik bagi kelompok lumbung pangan.
4. Monitoring dan evaluasi meliputi: aspek manfaat, pengelolaan, pemberdayaan kelompok dan peningkatan stok cadangan pangan di lumbung pangan;

1. Identifikasi lokasi;

Identifikasi Lokasi pangan dilaksanakan oleh provinsi bersama kabupaten di 40 lokasi kelompok. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2015 dengan tujuan untuk validasi dan kebenaran kelompok, kelembagaan, kepengurusan dan tingkat dukungan aparat desa, agar tidak salah saran, sehingga bantuan stimulant akan tepat sasaran.

2. Konsolidasi lumbung pangan

Konsolidasi lumbung pangan dilaksanakan di provinsi dengan peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari kabupaten calon lokasi penerima stimulant. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2015 selama 1 hari dengan tujuan untuk menyamakan persepsi pengelolaan lumbung pangan, memantapkan dan meningkatkan Sumberdaya Manusia pengurus kelompok calon penerima stimulant dalam pengelolaan lumbung pangan.

3. Pengadaan bahan pangan (Gabah);

Kegiatan pengadaan bahan pangan (Gabah) melalui lelang umum yang dilaksanakan dengan metode LPSE, dengan tujuan untuk menjaga netralitas aparat pemangku kegiatan, sekaligus distribusi kepada kelompok. Sebelum pelaksanaan lelang terlebih dahulu dilaksanakan rapat persiapan pengadaan. Stimulan yang akan diberikan kepada kelompok calon penerima berupa bahan pangan berupa gabah untuk 40 kelompok dengan anggaran biaya keseluruhan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau anggaran biaya per kelompok sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di berikan kelompok lumbung berupa bahan pangan (gabah), pelaksanaan pengadaan direncanakan mulai bulan Juni, Juli, Agustus 2015.

Kelompok yang akan mendapatkan stimulan mengajukan usulan dalam bentuk Proposal ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang tembusannya dikirim ke Kantor/intansi yang menangani ketahanan pangan dari kabupaten dengan melengkapi rencana usaha kelompok (RUK) yang sudah diajukan satu tahun sebelumnya 2014. (T-1);

4. Pembinaan Monitoring dan evaluasi Lumbung.

Maksud dilaksanakannya Pembinaan, monitoring dan Evaluasi pengembangan lumbung pangan adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan termasuk pemanfaatan bantuan stimulant, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan dan solusi pemecahannya, agar kegiatan berjalan secara efektif sekaligus untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan pengembangan lumbung pangan, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi

direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2015 selama 1 hari dengan diikuti 50 peserta dari kelompok lumbung dan petugas kabupaten

5. Keterkaitan dengan kegiatan tahun 2014;

Kegiatan Pengembangan lumbung pangan masyarakat Tahun Anggaran 2015 merupakan kelanjutan dari program kegiatan tahun 2014 sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk terus memajukan dan meningkatkan ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat, dengan memberikan stimulan kepada kelompok lumbung pangan masyarakat melalui APBD Prov Jateng, yang sudah dilaksanakan:

- Tahun 2009 diberikan kepada 9 lumbung pangan di 9 kabupaten, masing-masing senilai Rp. 10.000.000,-
- Tahun 2010 diberikan kepada 20 lumbung pangan di 16 kabupaten, masing-masing sebesar 7.850 Kg GKG
- Tahun 2011, diberikan kepada 20 kelompok lumbung pangan di 16 kabupaten, masing-masing sebesar 6.200 Kg GKG dan peralatan penunjang kegiatan lumbung.
- Tahun 2012, diberikan kepada 20 kelompok lumbung di 20 kabupaten, masing-masing sebesar 5.150 Kg GKG dan peralatan penunjang kegiatan lumbung.
- Tahun 2013, diberikan kepada 25 kelompok lumbung di 20 kabupaten, masing-masing sebesar 6.400 Kg GKG dan peralatan penunjang kegiatan lumbung.
- Tahun 2014, diberikan kepada 40 kelompok lumbung di 20 kabupaten, masing-masing sebesar 3.750 kg GKG;
- Tahun 2015, diberikan kepada 40 kelompok lumbung di 20 kabupaten dan 1 (satu) kota untuk pengisian lumbung pangan masyarakat.

x. Pembiayaan

Kegiatan Pengembangan lumbung pangan masyarakat bersumber dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 967.550.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) alokasi bantuan

pengisian lumbung kepada kelompok lumbung pangan masyarakat sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan alokasi perkelompok Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sebanyak 40 kelompok lumbung pangan masyarakat yang tersebar di 20 Kabupaten, dan 1 (satu) kota, diberikan dalam bentuk bahan pangan (gabah), mekanisme pengadaan gabah dilakukan melalui Unit Pelayanan Pengadaan (ULP).

4. Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat

i. Latar Belakang

Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal.

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy* yaitu :

- 1) *Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan*
- 2) *Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.*

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan menerapkan kedua strategi tersebut melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga.

Apabila pelaksanaan ini dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya ditahun 2015.

Angka rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) (kurang dari 70 % AKG adalah sangat rawan pangan). Pentingnya mengetahui kondisi pangan dan gizi di suatu daerah menjadikan pemantauan terhadap kondisi pangan dan gizi di daerah menjadi satu hal yang perlu dilakukan.

ii. Tujuan

- a. meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat
- b. menganalisis situasi pangan dan gizi; (2) meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi; dan (3) mengantisipasi terjadinya rawan pangan.

iii. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Tujuan

I. Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri Pangan.

Tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat

II. Kegiatan Penanganan Kerentanan Pangan.

Tujuan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi tahun 2014 adalah untuk : (1) menganalisis situasi pangan dan gizi; (2) meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi; dan (3) mengantisipasi terjadinya rawan pangan.

B. Sasaran

I. Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri Pangan.

Sasaran kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa rawan pangan dengan Kepala Keluarga Miskin > 30 % .

II. Kegiatan Penanganan Kerentanan Pangan.

Sasaran kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi tahun 2014 adalah untuk : (1) menganalisis situasi pangan dan gizi; (2) meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi; (3) mengantisipasi terjadinya rawan pangan.

C. Indikator Keberhasilan

I. Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri Pangan.

Indikator keberhasilan Desa Mandiri Pangan sebagai berikut :

1. Indikator Output

- a. Terbentuknya cadangan pangan masyarakat.
- b. Terbentuknya lembaga layanan kesehatan dan gizi masyarakat pedesaan.

2. Indikator Outcome

- a. Meningkatnya usaha kelompok, teknologi pengolahan, penyimpanan dan pemasaran.
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana pedesaan.
- c. Meningkatnya layanan kesehatan dan gizi masyarakat pedesaan.
- d. Meningkatnya cadangan pangan masyarakat pedesaan.
- e. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

3. Indikator Impact

- a. Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat
- b. Serta berkembangnya modal usaha kelompok.

II. Kegiatan Penanganan Kerentanan Pangan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi tahun 2015 antara lain :

1. Indikator Output : tersedianya analisis situasi pangan dan gizi.
2. Indikator Outcome : terlaksananya investigasi dan penanggulangan rawan Pangan.
3. Indikator Impact : teratasinya kerawanan pangan di wilayah yang telah dilakukan intervensi penanganan kerawanan pangan.

iv. Pelaksanaan Kegiatan

A. Kegiatan Umum

I. Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri Pangan.

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri Pangan pada tahun 2015 merupakan desa yang terfokus pada Tahap Persiapan, adapun kegiatan diarahkan pada: 1) sesuai lokasi sasaran; 2) Penetapan Pendamping; 3) Penetapan Kelompok, TPD; 4) Penumbuhan Kelompok; 5) sosialisasi kesiapan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan tahun 2014 dilanjutkan sesuai dengan capaian tahapan masing-masing desa pelaksanaan kegiatan sampai tahap kemandirian.

Fokus kegiatan pada **tahap penumbuhan (tahun kedua)** diarahkan untuk pengembangan usaha kelompok, melalui : (1) pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan ketrampilan masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat; (2) penumbuhan usaha melalui peningkat teknologi pengolahan, penyimpanan dan pemasaran; (3) pengembangan sistem ketahanan pangan melalui pembangunan sarana cadangan pangan; (4)

koordinasi lintas sektor dan subsektor untuk dukungan sarana prasarana pedesaan. **Tahap Pengembangan (tahun ketiga)** diarahkan untuk pengembangan sarana dan prasarana pedesaan, melalui : (1) pengembangan akses permodalan; (2) pengembangan skala usaha dan jejaring pemasaran; (3) pengembangan sistem ketahanan pangan melalui percepatan diversifikasi dan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal; (4) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dengan Dinas PU dalam wadah Tim Asistensi dan advokasi Provinsi dan Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota. Tahap **Kemandirian (tahun keempat)** diarahkan untuk peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui : (1) pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan layanan kesehatan dan gizi; (2) pengembangan sistem ketahanan pangan melalui diversifikasi, akses, dan jaringan pemasaran; (3) pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pedesaan; (4) peningkatan layanan dan gizi masyarakat melalui koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program dengan Dinas Kesehatan dalam wadah Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi dan Tim Koordinasi Teknis kabupaten/kota.

II. Kegiatan Penanganan Kerentanan Pangan.

Peran pemerintah bersama masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerentanan pangan dan gizi. Pemerintah dalam upaya mencegah kejadian rentan pangan dan gizi melakukan langkah-langkah berikut : (a) Pengamatan dan kajian dengan menggunakan beberapa indikator yang sesuai urutan kejadian, sebagai bahan untuk mengambil keputusan tindakan preventif dan kuratif; (b) Meningkatkan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan kerentanan pangan dan gizi melalui pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dengan menetapkan Pokja SKPG secara berjenjang.

Terkait dengan peran dan tugas Pokja SKPG dalam pengelolaan SKPG baik adalah : (a) Melakukan pertemuan koordinasi teknis serta konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara reguler setiap bulan dan akhir tahun; (b) Menemukan secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi; (c) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi bulanan dan tahunan untuk : aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan serta data spesifik lokal lainnya; (d) Melakukan analisis hasil SKPG untuk mengetahui situasi pangan dan gizi di suatu wilayah, hasil analisis SKPG yang menunjukkan rawan, mengindikasikan bahwa beberapa rumah tangga di wilayah tersebut tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya dalam waktu yang cukup lama, atau di wilayah

tersebut mengalami kondisi rawan pangan kronis, serta hasil analisis SKPG ditunjukkan dengan warna merah (rawan, kuning (waspada), dan hijau (aman); (e) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi setiap tiga bulan (triwulan) dan tahunan; (f) Melaporkan hasil analisis bulanan dan tahunan kepada ketua DKP secara berjenjang melalui Sekretaris DKP baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (g) Melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan : informasi yang mengemuka, hasil analisis bulanan, dan merumuskan langkah-langkah intervensi.

B. Pelaksanaan Kegiatan

I. Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri Pangan

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan dalam waktu satu tahun dengan kegiatan mempersiapkan aparat pelaksana dan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan pendampingan; penetapan desa pelaksana dan penyusunan data base RTM sasaran dan potensi desa.

Lokasi desa mandiri pangan tahap persiapan pada tahun 2015 adalah 11 kabupaten, 44 desa.

Lokasi desa mandiri pangan tahap persiapan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa Replikasi	Nama Kelompok
1	2	3	4	5
1	Kebumen	Karanggayam	1 Ds. Kalirejo, 2 Ds. Kebakalan	1 Kel. Giri makmur Kel. Margo 2 makmur Kel. Ngudi 3 makmur 4 Kel. Ngudi Subur
2	Klaten	Wedi	1 Desa Melikan 2 Desa Sukorejo	Kel. Keluarga 1 Sejahtera Kel. Keluarga 2 mandiri 3 Kel. Gemah ripah 4 Kel. Barokah
3	Banyumas	Cilongok	1 Ds. Sokawera 2 Ds. Sambirata	1 Kel. Maju Jaya 2 Kel. Krida Makmur Kel. Keloterbing 3 02 4 Kel. Tela Sari
4	Pemalang	Pulosari	1 Ds. Pulosari 2 Ds. Gambuhan	1 Kel. Margi Lestari Kel. Ngudi 2 Rahayu Kel. Sumber 3 Usaha 2

				4 Kel. Karya Bakti
5	Rembang	Sale	1 Ds. Mrayun 2 Ds. Sale	1 Kel. Ma'ana 2 Kel. Makmur Kel. Glung 3 Raharjo Kel. Kumolo 4 Mendo Raharjo
6	Wonosobo	Kertek	1 Ds. Kapencar 2 Ds. Reco	1 Kel. Al-Barokah Kel. Sumber 2 Rejeki 3 Kel. Tani Maju 4 Kel. Bina Huma
7	Brebes	Tanjung	1 Ds. Sengon Ds. Kemurang 2 wetan	1 Kel. Darul Gufron 2 Kel. Tani Jaya 3 Kel. Maju Jaya 4 Kel. Harapan Jaya
8	Boyolali	Wonosegoro	1 Ds. Banyusri 2 Ds. Garangan	Kel. Pamuji 1 Rahayu Kel. Pangudi 2 Luhur 3 kel. Getas Krikil 4 kel. Tani Mulyo I
9	Grobogan	Tawangharjo	1 Ds. Godan 2 Ds. Tarub	1 Kel. Tanjung Tani 2 Kel. Mekar Tani 3 Kel. Al- Hidayah Kel. Mugi Rahayu 4 II
10	Demak	Dempet	1 Ds. Kunir 2 Ds. Brakas	1 Kel. Handayani 2 Kel. Nur cahyo 3 Kel. Mardi Rahayu 4 Kel. Tani Mulyo
11	Purbalingga	Kemangkon	Ds. 1 Kedungbenda 2 Ds. Plumutan	1 Kel. Harja tani 2 Kel. Mardi Tani 3 kel. Karya tani Kel. Rawa 4 Kandang

Seleksi Lokasi Sasaran

1). Kabupaten/Kota

Syarat: (a) memiliki unit kerja ketahanan pangan, (c) terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, dan (d) adanya partisipasi masyarakat/Pemerintah Daerah setempat untuk pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan replikasi Model Desa Mandiri Pangan.

2). Kecamatan

Syarat: (a) adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dll), dan (b) memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung pelaksanaan program.

3). Desa

Syarat: (a) desa rentan pangan (minimal RTM 30 persen /PPLS tahun 2011 dari penduduk desa) berdasarkan Survei, (b) memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan, (c) aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi dan kesediaan menerima program yang diwujudkan dengan memberikan dukungan terhadap Proksi Desa Mapan. Desa yang telah terpilih ditetapkan oleh SK. Bupati / SK Kepala Badan Ketahanan Provinsi

b. Pendampingan

Tenaga pendamping pada desa baru berasal dari sarjana pendamping, dua inti sedangkan pendamping desa lama melanjutkan kegiatan pendampingan sebelumnya.

Tugas Pendampingan pada tahap persiapan: (a) menumbuhkan dan mengembangkan kelompok afinitas, kelompok wanita yang berasal dari anggota dasa wisma, lumbung pangan, (b) mengembangkan dinamika kelompok afinitas, (c) membina kelompok-kelompok afinitas dalam merencanakan usaha produktif, (d) menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan Tim Pangan Desa dan kelompok-kelompok afinitas.

c. Sosialisasi Program

Sosialisasi program dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, untuk mendapatkan dukungan kegiatan Instansi lintas sektor. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada desa sasaran program.

d. Penyusunan Data Dasar

Penyusunan database berupa karakteristik rumah tangga, pemetaan potensi wilayah desa lokasi kegiatan, profil kelompok, profil desa.

e. Pelatihan

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Proksi Desa Mapan dilaksanakan pelatihan teknis kepada: petani/kelompok afinitas dan pengurus kelembagaan petani.

f. Pemberdayaan Kelompok Afinitas

Kelompok afinitas adalah anggota kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan keluarga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara bersama-sama. Anggota kelompok afinitas adalah RTM, yang dibina melalui program Aksi Desa Mandiri Pangan. Pemberdayaan kelompok afinitas dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.

g. Penyaluran Paket Bantuan Ternak kambing/domba dan Alat Pengolahan Pangan

Bantuan Paket Ternak Kambing/domba dilaksanakan oleh Provinsi untuk 44 kelompok afinitas masing-masing kelompok sebanyak 30 dengan rincian 27 ekor betina dan 3 ekor jantan, dalam mendukung usaha kelompok-kelompok afinitas, sedangkan pemberian bantuan alat pengolahan pangan untuk 44 kelompok dengan masing-masing sebanyak 1 paket untuk pengembangan usaha kelompok dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha produktif

melalui pemanfaatan pangan lokal.

2. Tahap Penumbuhan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan tahap penumbuhan meliputi : a) pemberdayaan masyarakat, b) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan c) pengembangan sarana dan prasarana.

Lokasi desa mandiri pangan tahap penumbuhan adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	Desa / Kecamatan	Nama Kelompok
1	2	3	4
1	Kebumen	Kec. Mirit 1. Desa Selotumpeng 2. Desa Wergonayan	1. Kelp. Karya Utama 2. Kelp. Tegal Dadi 3. Kelp.Maju 4. Kelp.Ternak Unggul
2	Demak	Kec. Kebonagung 1. Desa Tlogosih 2. Desa Solowire	1. Kelp. Subur 1 2. Kelp. Subur 2 3. Kelp. Tani Makmur 1 4. Kelp. Tani Makmur 2
3	Purworejo	Kec. Loano 1. Desa Kebon Gunung 2. Desa Loano	1. Kelp. Ngudi Makmur II 2. Kelp. Muji Subur I 3. Kelp. Ngudi Mulyo 4. Kelp.Mulyo Lumintu
4	Jepara	Kec. Keling 1. Desa Bumiharjo 2. Desa Tunahan	1. Kelp. Mugi Rahayu I 2. Kelp. Mugi Rahayu II 3. Kelp.Mugi Lestari I 4. Kelp.Mugi Lestari II
5	Cilacap	Kec. Sidareja 1. Desa Margasari	1. Kelp.Afinitas Lestari 2. Kelp.Afinitas Sumber Rejeki
		2. Desa Kunci	3. Kelp. Afinitas Karya Sejati 4. Kelp.Afinitas Kondang Mulya
6	Wonosobo	Kec. Kalikajar 1. Desa Simbang 2. Desa Kwadungan	1. Kelp.Afinitas Jaya Lestari 2. Kelp.Makmur Abadi 3. Kelp.Afinitas Hargo Mulyo 4. Kelp.Afinitas Hargo Lestari
7	Boyolali	Kec. Klego 1. Desa Sanggo 2. Desa Sendangrejo	1. Kelp.Afinitas Sangge 1 2. Kelp.Afinitas Sangge 2 3. Kelp.Afinitas Sendangrejo 1 4. Kelp.Afinitas Sendangrejo 2
8	Blora	Kec. Blora 1. Desa Kamolan 2. Dukuh Nglaban Desa Wonorejo	1. Kelp. Wanita Tani (KWT) 2. Kelp. Subur Makmur 3. Kelp. Subur 4. Kelp. Subur Tani

9	Wonogiri	Kec. Kismantoro 1. Kel. Gesing 2. Desa Gambiranom	1. Kelp. Sido Mulyo
			2. Kelp. Srilanggeng
			3. Kelp. Ngesti Widodo
			4. Kelp. Mekar Sari
10	Brebes	Kec. Ketanggungan 1. Desa Dukuh Tengah 2. Desa Dukuhturi	1. Kelp. Mekar
			2. Kelp. Melati
			3. Kelp. Sumber Pangan
			4. Kelp. Suka Tani

a. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan, pelatihan-pelatihan, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan. Pada Tahap penumbuhan pendampingan dilakukan untuk : (1) mengembangkan dinamika kelompok afinitas, (2) menumbuhkembangkan usaha produktif kelompok afinitas, meliputi usaha *on farm dan off farm*, (3) Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah rawan pangan pangan, meliputi: akses informasi, sarana prasarana, teknologi, permodalan, pasar dll dapat dilakukan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait yang dapat memberikan peluang dan kesempatan berusaha kepada masyarakat melalui proses pendampingan, pembinaan dan penyuluhan.

b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan

Pengembangan sub sistem ketahanan pangan pada tahap penumbuhan berfokus pada sub sistem ketersediaan pangan untuk peningkatan produksi dan pengembangan cadangan pangan masyarakat. Pada sub sistem distribusi, dilakukan melalui penumbuhan usaha-usaha perdagangan, pemasaran, sistem informasi harga pangan oleh anggota kelompok di tingkat desa. Sedangkan sub sistem konsumsi, dilakukan melalui peningkatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal, perbaikan pola konsumsi keluarga melalui pembinaan dasa wisma, pemanfaatan pekarangan, perbaikan layanan gizi bagi anak balita, ibu hamil dan menyusui melalui Posyandu serta pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan olahan.

c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perbaikan sarana, prasarana dan fasilitas yang dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan Desa Mapan melalui integrasi program kerja lintas sektor.

3. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan tahapan ketiga pelaksanaan Proksi Desa Mapan. Pada tahap pengembangan merupakan penguatan dan pengembangan dinamika dan usaha produktif kelompok afinitas, pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usaha tani, dan lain-lain. Pada tahap ini sudah terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir masyarakat, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

Lokasi desa mandiri pangan pada tahap pengembangan tahun 2013 sebagai berikut:

NO	KABUPAT EN	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK AFINITAS
1	Purworejo	Bagelan	Hargorojo	- Serba Usaha - Wana Jaya
			Semono	- Harapan Makmur - Beringin
2	Wonogiri	Sidoharjo	Sembukan	- Nawangsari - Ngudi Mulyo
			Ngabeyan	- Ngudi Rejeki - Ngudi Rahayu

4.Tahap Kemandirian

Tahap kemandirian merupakan tahapan keempat atau (tahun IV) dalam pelaksanaan Proksi Desa Mapan. Kemandirian ditunjukkan adanya perubahan pola pikir, aktivitas dan perbaikan usaha kelompok-kelompok afinitas yang anggotanya Rumah Tangga Miskin, kelompok wanita dan kelompok lumbung pangan. Terdapat perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman serta berfungsinya cadangan pangan masyarakat. Berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi dan pemasaran pertanian. Tingkat kemandirian pangan juga ditunjukkan oleh bekerjanya sistem ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang dan aman sampai tingkat rumah tangga. Kemandirian pangan tingkat desa memerlukan dukungan program lintas sektor untuk pembangunan wilayah pedesaan dan pembangunan sarana prasarana pedesaan. Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat maupun fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa sekitarnya.

Lokasi desa mandiri pangan tahap kemandirian adalah sebagai berikut:

N	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK AFINITAS
1	Batang	Wonotunggal	Sodong	- Nakula - Sadewa
2	Jepara	Bangsri	Papasan	- Sidomakmur - Sidorejo
3	Purbalingga	Kejobong	Langgar	- Sidomukti - Sidomakmur
4	Banyumas	Wangon	Jurang Bahs	- Mukti Binangun 1 - Mukti Binangun 2
5	Wonogiri	Pracimantoro	Joho	- Ngudi Makmur - Ngudi Rejeki
6	Temanggung	KaloraN	Kalimanggis	- Mardi Utomo 1 - Mardi Utomo 2 - Bahagia
			Kaloran	- Sido Maju - Lancar

II. Kegiatan Penangan Kerentanan Pangan

a. Pembentukan Pokja SKPG

Pembentukan Pokja SKPG di provinsi ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi, yang berada dibawah koordinasi Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan selaku Sekretaris DKP Provinsi. Anggota Pokja berasal dari perwakilan instansi : Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi, Bappeda, Sekretaris/Asisten dari unsur Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Statistik, Satuan Kerja Pemerintah Daerah Keluarga Berencana (SKPD KB), Dinas Sosial, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Divre Perum Bulog, Kepolisian Daerah.

Untuk Pembentukan Pokja SKPG di kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai Ketua DKP kabupaten/kota, yang berada dibawah koordinasi Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan selaku Sekretaris DKP kabupaten/kota. Anggota Pokja berasal dari perwakilan instansi: Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota, Bappeda, Sekretaris/Asisten dari unsur Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Bapermasdes kab./kota, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Statistik, SKPD KB kab./kota, Dinas Sosial, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Divre Perum Bulog, Kepolisian Resort.

b. Analisis Data SKPG

Analisi data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Analisis data SKPG bulanan ditunjukkan dengan nilai persentase ketersediaan pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir pada luas tanam dan luas puso, serta diperkuat dengan analisis data luas panen dan cadangan pangan pada komoditas pangan utama seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Analisis data akses pangan bulanan ditunjukkan dengan membandingkan harga pada bulan berjalan dengan rata-rata data harga tiga bulan terakhir pada komoditas pangan utama dan strategis seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur. Analisis data pemanfaatan pangan bulanan dapat ditunjukkan oleh status gizi balita dengan menghitung angka balita naik berat badan, angka balita yang tidak naik berat badan dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan dibawah garis merah dibandingkan angka balita yang ditumbang pada bulan terakhir.

Untuk analisis data SKPG tahunan, data yang dianalisis : (1) ketersediaan pangan dengan menghitung rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif; (2) akses pangan yaitu dengan menghitung persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, serta diperkuat dengan analisis terhadap harga komoditas pangan utama dan strategis, IPM dan NTP; dan (3) pemanfaatan pangan dengan menilai prevalensi gizi kurang pada balita.

c. Investigasi

Investigasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis SKPG yang direkomendasikan Pokja Pangan dan Gizi kepada Ketua DKP melalui Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota maupun laporan yang diterima mengenai kondisi rawan pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Investigasi dilakukan untuk mengetahui: (1) akibat kejadian bencana pada ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah yang masyarakatnya tidak mampu mengatasinya tanpa bantuan dari pihak lain; (2) tipe bantuan / intervensi yang diperlukan; (3) sasaran penerima manfaat; (4) besaran bantuan; (5) waktu pelaksanaan intervensi; (6) letak lokasi sasaran; (7) mekanisme intervensi; dan (8) upaya penanganan melalui bantuan : pemerintah, badan usaha, swasta nasional, atau internasional.

Pembentukan Tim Investigasi di provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Badan/Dinas/Unit kerja ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota pada saat diperlukan, untuk menangani indikasi rawan pangan hasil analisis SKPG/laporan pemantauan, dan dapat dibubarkan setelah tugas Tim Investigasi minimal 5 (lima) orang dari instansi terkait, anggota Pokja SKPG yang mempunyai keahlian di bidangnya atau dari pejabat, dan staf lingkup Badan/Kantor/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi atau kabupaten/kota.

d. Intervensi

Hasil investigasi dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan jenis

intervensi yang akan diambil untuk menanggulangi kerawanan pangan, sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebelum intervensi dilakukan, terlebih dahulu perlu ditetapkan sasaran penerima manfaat (kelompok atau rumah tangga), tipe bantuan/intervensi yang diperlukan, besaran bantuan, waktu intervensi, mekanisme, durai, dan skala intervensi.

Berdasarkan waktu dan jenis bantuan yang diberikan, intervensi penanganan daerah rawan pangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Intervensi Jangka Pendek, terdapat dua jenis intervensi jangka pendek : (a) intervensi jangka pendek hasil pengamatan dan prakiraan kemungkinan kejadian kerawanan pangan disuatu wilayah atau masyarakat, melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); dan (b) intervensi jangka pendek untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang menimbulkan rawan pangan transien dan rawan pangan kronis.
2. Intervensi Jangka Menengah dilakukan untuk menangani rawan pangan resiko tinggi. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan intervensi dilakukan monitoring dan evaluasi. Apabila permasalahan yang dihadapi belum selesai, akan ditindaklanjuti dengan program intervensi jangka panjang.
3. Intervensi Jangka Panjang diarahkan untuk upaya penanggulangan rawan pangan kronis melalui pemberian bantuan program/kegiatan dalam kurun waktu diatas satu tahun. Intervensi dilakukan secara terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan program/kegiatan subsektor dan sektor. Jenis intervensi jangka panjang yang akan diambil. Dapat berupa intervensi non pangan, intervensi pangan, atau kombinasi keduanya.

v. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat tahun 2015 :

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Identifikasi lokasi Desa Mandiri Pangan	Januari	Melaksanakan identifikasi ke lapangan lokasi DMP oleh Badan Ketahanan Pangan Prov. Jateng.
2	Sosialisasi Program DMP di 11 Kab, 22 Desa.	Maret	Sosialisasi untuk desa baru 22 desa, dilaksanakan oleh Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten masing-masing lokasi.
3	Rakor Monev.	Januari & Juni	Pelaksanaan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi.
4	Penyaluran Stimulan Bantuan Pangan	Maret, Juni, September	Pelaksanaan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi ke

	beras (4 kali)	dan Desember	daerah rawan pangan sebanyak 4 lokasi.
5	Rakor Rawan Pangan	Juni dan Nopember	Pelaksanaan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi.
6	Pengadaan alat/perengkapan pengolah pangan 8 kelompok, 16 unit.	Agustus	Pelaksana pengadaan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Jawa Tengah
7	Pengadaan ternak kambing/domba untuk 44 kelompok di 22 desa.	September	Pelaksana pengadaan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Jawa Tengah

vi. Pembiayaan

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana masyarakat dan swasta serta bantuan luar negeri. Dana APBD berasal dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk mendukung Proksi Desa Mapan, dana masyarakat dalam bentuk tabungan kelompok, sedangkan dana yang berasal dari swasta dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) /PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) . Sedangkan dukungan dana pembangunan wilayah pedesaan untuk Proksi Desa Mapan yang berasal dari instansi lintas sektor diatur menurut ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/lembaga.

vii. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus terhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangka waktu. Dua ciri utama dari sistem monitoring: *pertama*, monitoring adalah bagian integral dari siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) kegiatan pembangunan, dan *kedua* monitoring adalah suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan pembangunan. Seperti halnya monitoring, evaluasi juga sangat penting dilakukan karena dapat menyediakan sarana untuk mengukur efektivitas intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka membuat keputusan-keputusan manajemen jangka pendek dan jangka panjang serta untuk menilai apakah misi yang ditetapkan telah tercapai atau tidak.

B. Evaluasi

Evaluasi adalah untuk mengetahui secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Evaluasi kegiatan dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun, dengan tujuan mengetahui perkembangan dan tingkat keberhasilan program melalui pencapaian indikator tiap-tiap tahapan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Proksi Desa Mapan diukur pada setiap tahap kegiatan.

1. Tahap Persiapan

Indikator keberhasilan pada tahap persiapan meliputi: (1) ditetapkannya lokasi desa pelaksana Proksi Desa Mapan, (2) meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Proksi Desa Mapan, (3) terbentuknya kelompok afinitas di lokasi sasaran, (4) terpilihnya tenaga pendamping.

2. Tahap Penumbuhan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat pada tahap penumbuhan adalah: (1) meningkatnya kinerja kelompok afinitas, lembaga pangan dan gizi di pedesaan, (2) meningkatnya modal usaha kelompok afinitas.

Indikator keberhasilan pengembangan sistem ketahanan pangan pada tahap penumbuhan adalah: (1) meningkatnya diversifikasi produksi pangan, (2) berkembangnya intensifikasi usaha, (3) meningkatnya pemasaran hasil secara kolektif di desa, (4) meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya wilayah, (5) tersedianya teknologi pengolahan dan produk pangan, (6) meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan, (7) meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.

3. Tahap Pengembangan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat pada tahap pengembangan adalah: (1) meningkatnya keterampilan teknis anggota kelompok afinitas, (2) meningkatnya akses kelompok afinitas terhadap permodalan, dan pemasaran, dan (3) berkembangnya usaha kelompok-kelompok afinitas yang mampu meningkatkan pendapatan.

Indikator keberhasilan pengembangan sistem ketahanan pangan pada tahap pengembangan adalah: (1) termanaftkannya lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, (2) adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, (3) terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pemantauan, deteksi dan respon dini kerawanan pangan. Indikator keberhasilan pengembangan sarana dan prasarana adalah tersedianya dukungan pembangunan sarana prasarana dari instansi terkait.

4. Tahap Kemandirian

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat tahap kemandirian: (1) efektifnya peran TPD dalam pendampingan masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan desa, (2) tumbuhnya usaha-usaha produktif yang dikelola kelompok afinitas khususnya dan masyarakat desa pada umumnya, (3) terjalinnya jaringan usaha dan pemasaran produk lokal dengan mitra usaha/koperasi/investor, (4) meningkatnya peran masyarakat dalam aspek ketersediaan dan distribusi pangan.

Indikator keberhasilan pengembangan sistem ketahanan pangan tahap kemandirian adalah: (1) meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan, (2) meningkatnya akses pangan rumah tangga, (3) berkembangnya usaha produktif, (4) meningkatnya pola konsumsi pangan 3B dan aman, (5) teratasinya masalah pangan tingkat wilayah, (6) terlayannya masyarakat dalam akses permodalan, layanan kesehatan dan sarana usaha.

Indikator keberhasilan pengembangan sarana dan prasarana tahap kemandirian adalah: berfungsinya prasarana pengairan, jalan desa, jalan usahatani, sarana penerangan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

C. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Desa melaporkan pada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi pangan dan cadangan pangan desa serta perkembangan pelaksanaan Proksi Desa Mapan dengan formulir yang telah disepakati. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke kabupaten/kota dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan form yang telah disepakati.

Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan desa dan kecamatan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan umpan balik kepada desa dan kecamatan serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan sesuai dengan format yang disepakati. Selanjutnya propinsi memberikan *feedback* kepada kabupaten/kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat provinsi.

Pelaporan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan realisasi keuangan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Periode pelaporan dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan pada akhir tahun.

5. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan

Sub Kegiatan:**a. Sinkronisasi Operasional Kegiatan (SOK) Program Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2015****i. Latar Belakang**

Sinkronisasi Operasional Kegiatan Program Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah di awal tahun anggaran. Dengan pelaksanaan Sinkronisasi Operasional Kegiatan, instansi Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyesuaikan kegiatan di Kabupaten/Kota dengan kegiatan provinsi, kaitannya dengan kegiatan BKP Provinsi yang dialokasikan pada kabupaten terkait. Dan bila belum ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan kegiatan pembangunan ketahanan pangan di provinsi yang membutuhkan dana pendamping/dana penunjang dari kabupaten, maka masih dapat dianggarkan pada saat perubahan anggaran kabupaten/kota, begitu pula sebaliknya. .

ii. Tujuan :

- Mensinkronkan prioritas kegiatan program pembangunan ketahanan pangan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan pemberdayaan aparat dalam penyelarasan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang semua subsistem ketahanan pangan, yaitu subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

iii. Sasaran :

- 85 aparat yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada bagian perencanaan baik teknis maupun anggaran.

iv. Pelaksanaan

- Waktu : Bulan Januari 2015
- Lokasi : Provinsi
- Peserta : Instansi yang menangani Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota

v. Output :

- Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten/kota (APBD II) yang sesuai dengan program dan kegiatan BKP Provinsi Jawa Tengah dan

APBN.

vi. Out Come :

- Terlaksananya program pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2015 secara efektif dan efisien.

b. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

i. Latar Belakang

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai wadah yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah agar dapat melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan pada setiap subsistem ketahanan pangan.

Maksud dari dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Sedangkan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan ketahanan pangan menjadi hal penting mengingat beberapa hal berikut : Pertama, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak ada substitusinya. Kedua, adanya peningkatan jumlah penduduk yang disadari atau tidak mendorong peningkatan permintaan pangan. Ketiga, adanya penurunan daya dukung lingkungan yang mempengaruhi produktivitas dan produksi pangan. Keempat, globalisasi yang menjadikan batas-batas antar negara menjadi semakin tipis bahkan seolah tanpa batas sehingga permasalahan pangan di suatu negara dengan cepat akan dirasakan oleh negara-negara lain di dunia.

Dengan terselenggaranya Rakor DKP diharapkan dapat menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan perumusan kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan, serta memberikan masukan kepada Gubernur yang berkaitan dengan upaya-upaya Pemantapan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah.

ii. Tujuan

- Melaksanakan koordinasi perumusan bahan kebijakan dengan seluruh *stakeholders* terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pembangunan ketahanan pangan

yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kewaspadaan, kekurangan serta kerawanan pangan; peningkatan produksi ketersediaan pangan dan perbaikan gizi di Jawa Tengah.

- Melaksanakan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah

iii. Sasaran

- Tersusunnya bahan rumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan dalam pembangunan ketahanan pangan.
- Terwujudnya sinergitas kebijakan dalam mewujudkan pemantapan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah .

iv. Pelaksanaan

- Lokasi : Provinsi
- Waktu : April dan November 2015
- Peserta : Anggota DKP Provinsi Jawa Tengah, Tim Teknis DKP Provinsi Jawa Tengah, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah

v. Output

- Terselenggaranya Rapat Koordinasi antara Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
- Rumusan kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah secara berkala selama berjalannya program.

vi. Outcome

- Terkoordinasinya seluruh stake holder yang terlibat dalam program DKP, sehingga dapat memecahkan masalah serta dapat mencapai tujuan program.

c. Penyusunan Regulasi Kedaulatan Pangan

i. Latar Belakang

Keamanan Pangan adalah merupakan hak setiap orang, tidak terkecuali bagi anak-anak sekolah yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kejadian keracunan yang sering terjadi di sekolah-sekolah, maupun di masyarakat hal ini menandakan bahwa pengawasan keamanan pangan yang ada di sekolah dan di masyarakat sangat kurang sekali.

Makanan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena sudah basi atau rusak. Makanan menjadi basi karena tercemar mikroba hewan, manusia, atau benda-benda lain yang tumbuh dan berkembang biak. Apabila mikroba tersebut dari jenis yang berbahaya, maka ini biasa disebut kuman. Dan makanan bisa menjadi sumber penyakit. Jika jumlah kuman dalam makanan banyak, maka mengonsumsi makanan tersebut dapat menyebabkan keracunan. Keracunan pangan pada anak dapat menjadi ancaman yang serius dimana tidak jarang anak meninggal dunia karena keracunan pangan. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi antar stakeholder dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan.

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Produk pangan secara luas baik pangan yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ternak dan ikan akan mudah mengalami penurunan mutu dan keamanan pangan karena proses produksi yang tidak sesuai standart dalam satu system pangan yang diawali dari pra produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan dan teknis penanganan pemasaran (proses distribusi) sampai ketingkat konsumen yang menjadi pangan segar dan bahan pangan untuk proses pengolahan selanjutnya dan sampai penanganan asupan zat gizinya.

SKPT adalah program nasional yang terdiri dari semua lembaga kunci yang terlibat dalam keamanan pangan dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi (from farm to table). SKPT dibangun atas prinsip analisis risiko, dan terdiri dari 3 jejaring yaitu:

1. Jejaring Intelijen Pangan berdasarkan kajian risiko
2. Jejaring Pengawasan Pangan berdasarkan manajemen risiko

3. Jejaring Promosi Keamanan Pangan berdasarkan komunikasi risiko

Pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan bidangnya mengelompokkan diri ke dalam tiga jejaring di atas dan bersinergi satu sama lain untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan yang berkaitan dengan analisis risiko di atas. Satu pihak dapat saja masuk ke dalam lebih dari satu jejaring, sesuai dengan tugas dan bidangnya. Anggota-anggota jejaring bekerja sebagai mitra sejajar (*equal partners*) dengan cara: saling membagi informasi, mendiskusikan permasalahan yang ada, dan memutuskan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan nasional.

ii. Tujuan

- a. Menyusun Pergub tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT).

iii. Sasaran

- *Stakeholders* terkait dengan pembangunan ketahanan pangan lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota se-Jawa Tengah

iv. Pelaksanaan

- Penyusunan Pergub SKPT
Lokasi : Provinsi
Waktu : Mei dan September 2015
Peserta : Tim penyusun Pergub SKPT

v. Output.

- Terselenggaranya Proses penyusunan Pergub SKPT secara tepat waktu dan tepat sasaran.

vi. Outcome

- Semakin optimalnya pelaksanaan SKPT di lingkup Provinsi Jawa Tengah

d. Rapat POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan

i. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat strategis dan harus diperhatikan dengan baik, mengingat pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak ada substitusinya.

Secara makro, situasi ketahanan pangan Jawa Tengah saat ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, Jawa Tengah telah mampu menyediakan pangan secara mandiri untuk penduduk di wilayahnya, bahkan mampu menyuplai kebutuhan pangan wilayah lain dan menjadi penyangga pangan nasional.

Semakin maraknya kasus pangan baik dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi maupun keamanan pangan yang terjadi di Indonesia, Jawa Tengah tak terkecuali, dapat menghambat perwujudan kemantapan ketahanan pangan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perwujudan ketahanan pangan, pemerintah bertugas untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan pangan. Khususnya untuk pangan tertentu yang bersifat pokok seperti beras, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui pengendalian harga, yang dilakukan melalui (1) pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan ; (2) pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan ; (3) penetapan kebijakan pajak dan atau tarif dan (4) pengaturan kelancaran distribusi pangan.

ii. Tujuan

- Sebagai Forum Diskusi bersama antara anggota POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam membahas permasalahan ketahanan pangan dari keseluruhan subsistem mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

iii. Sasaran

- *Stakeholders* terkait dengan pembangunan ketahanan pangan lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Instansi yang menangani ketahanan pangan di Jawa Tengah

iv. Pelaksanaan

- Lokasi : Provinsi

- Waktu : Maret 2015
- Peserta : Anggota POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta *stakeholders* terkait lainnya.

v. Out put kegiatan

- Terlaksananya Rapat POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
- Terumuskannya masalah dan teridentifikasinya masalah dan upaya pecahkannya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

vi. Out come

Terwujudnya koordinasi pemantapan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

e. Rapat Teknis Perencanaan Program Ketahanan Pangan

i. Latar belakang:

Tugas Pokok Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Dalam penyusunan kebijakan tersebut BKP Provinsi Jawa Tengah perlu berkoordinasi dengan Instansi-Instansi yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mensinkronkan kegiatan-kegiatan baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

Rapat Perencanaan Teknis Ketahanan Pangan dilaksanakan di tingkat provinsi bertujuan agar kegiatan-kegiatan pembangunan ketahanan pangan di kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara sinergis mengacu pada kegiatan di pusat dan provinsi yang dalam operasionalnya dapat memperoleh dukungan dana dari APBD I dan APBN.

Potensi di masing-masing wilayah tidaklah sama, dan hal tersebut menimbulkan implikasi dan permasalahan-permasalahan yang berbeda pula. Oleh karena itu maka proses penyusunan perencanaan pembangunan ketahanan pangan serta kegiatan BKP Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan tidak secara *top down*, melainkan berdasarkan aspirasi dari bawah (*bottom up planning*), dengan melihat kondisi ketahanan pangan

kabupaten/kota.

ii. Tujuan:

- Mempertemukan dan menyamakan persepsi antara aparat dalam perencanaan program ketahanan pangan Provinsi/Kabupaten-Kota secara berkala selama berjalannya program.
- Penyampaian program-program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA. 2016.
- Merumuskan dan menilai kinerja perencanaan program ketahanan pangan dengan indikator :
 - Realisasi pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan
 - Realisasi pencapaian terhadap realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama.
 - Permasalahan/informasi yang menghambat atau yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan program.

iii. Sasaran:

- Aparat dan seluruh stake holder yang terlibat dalam perencanaan program ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah

iv. Pelaksanaan Kegiatan

- Lokasi : Provinsi
- Waktu : Bulan Oktober 2015
- Peserta :
 - Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
 - Instansi terkait.

v. Output kegiatan :

- Terselenggaranya Rapat Teknis Perencanaan Program Ketahanan Pangan, penyamaan persepsi dan terumuskannya program ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah secara berkala selama berjalannya program.
- Terkoordinasinya seluruh stake holder yang terlibat dalam perencanaan program ketahanan pangan, sehingga dapat memecahkan masalah yang timbul dan mengantisipasi

munculnya masalah serta dapat mencapai tujuan program.

vi. Out Come :

- Terwujudnya program ketahanan pangan tahun 2015 yang komprehensif, terpadu antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

f. Penghargaan Ketahanan Pangan

i. Latar Belakang

Perubahan dan perluasan pengertian ketahanan pangan tidak hanya dari aspek produksi saja tetapi ke aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam koridor ketahanan pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengapresiasi, serta merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah tetapi juga kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memacu partisipasi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya, pemerintah memberikan **apresiasi** terhadap upaya yang telah dilakukan dalam bentuk **pemberian penghargaan**.

Berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil melaksanakan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga, regional, dan nasional perlu mendapat perhatian untuk mendukung, dan memotivasi, sehingga memberi dampak, baik penerima maupun masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, kepada masyarakat perorangan, kelompok masyarakat/kelembagaan masyarakat, perusahaan/swasta dan pemerintah (aparatur dan lembaga) yang telah memberikan upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang meliputi: aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, perlu diberi

penghargaan tertinggi oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Mengingat penghargaan ketahanan pangan yang diberikan pemerintah tersebut secara rutin disampaikan oleh Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagai penghargaan yang memiliki nilai tinggi dan *prestige*, maka diperlukan mekanisme yang dapat menjaring penerima penghargaan perorangan atau lembaga yang layak dan patut menerimanya. Dengan demikian, penerima penghargaan akan dijadikan contoh kepada masyarakat dan aparat dalam membangun pemantapan ketahanan pangan nasional, wilayah, dan rumah tangga.

ii. Tujuan

Pemberian penghargaan ketahanan pangan dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi pemerintah dan memberikan motivasi, dengan tujuan yaitu:

1. Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan;
2. Memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk memacu daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

iii. Sasaran

Sasaran pemberian penghargaan ketahanan pangan diarahkan untuk:

1. **Masyarakat:** perorangan, perusahaan/swasta, dan kelembagaan masyarakat;
2. **Pemerintah:** aparatur dan lembaga pemerintah.

Penghargaan Ketahanan Pangan yang diberikan, dikelompokkan dalam lima kategori berikut:

1. **Pelopor Ketahanan Pangan.** Calon yang masuk pada kategori Pelopor adalah seseorang atau kelompok yang bukan PNS, bukan tokoh organisasi formal, yang berhasil merintis, dan/atau memelopori, dan/atau menggerakkan pemanfaatan aset (sumberdaya alam, sumberdaya

manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya teknologi, sumberdaya sosial) yang baik secara individual maupun kelompok yang telah melakukan kegiatan nyata di daerah/wilayahnya dalam peningkatan kemandirian pangan, baik di tingkat rumah tangga, dan/atau di tingkat masyarakat.

2. **Pelayanan Ketahanan Pangan.** Calon yang masuk dalam kategori Pelayanan di bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah PNS (Penyuluh, Pembibitan, Kesehatan Hewan, dsb) atau masyarakat (LSM, Organisasi kemasyarakatan), baik individu atau kelompok, yang telah memberikan pengabdian diri dalam mendukung kemandirian pangan yang melampaui tugas pokoknya.
3. **Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan** adalah kelompok/gabungan kelompok masyarakat yang berhasil mengelola kegiatan produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan, atau perakitan teknologi pangan dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
4. **Pemangku Ketahanan Pangan.** Calon yang termasuk kategori Pemangku Ketahanan Pangan adalah tokoh masyarakat, pengusaha, artis, manajer, tokoh agama, dan lainnya, yang mempunyai pengaruh dan prakarsa dalam mengembangkan/mewujudkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan aset dan sumberdaya lokal.
5. **Pembina Ketahanan Pangan.** Calon yang termasuk dalam kategori Pembina Ketahanan Pangan adalah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa) yang berhasil menggerakkan perangkat/satuan organisasi daerah secara sinergi dalam mewujudkan kemandirian pangan.

iv. Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pemberian penghargaan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada Bulan Juli s.d. September 2015.

v.

Output

Terselenggaranya kegiatan penghargaan ketahanan pangan

provinsi Jawa Tengah dari Bulan Juli s.d September 2015.

vi. Outcome

Semakin meningkatnya program ketahanan pangan di Provinsi JawaTengah.

g. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan

i. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yaitu ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan ketahanan pangan, maka penyusunan data statistik semua subsistem tersebut perlu dilaksanakan secara rutin/berkala dengan pemantauan dan koordinasi langsung dengan seluruh SKPD Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dengan tersusunnya data statistik semua subsistem ketahanan pangan, diharapkan dapat menjaga stabilitas ketahanan pangan.

ii. Tujuan

- Menyusun data statistik pada subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan Provinsi Jawa Tengah.

iii. Sasaran

- Tersusunnya data statistik pada subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan Provinsi Jawa Tengah

iv. Pelaksanaan Kegiatan

- Lokasi : Provinsi
- Waktu : Juli dan Desember 2015

v. Output

- Laporan data statistik pangan Provinsi Jawa Tengah.

vi. Outcome

- Sebagai salah satu acuan menentukan arah kebijakan dan penentuan lokasi program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan
- (sesuai dengan kondisi setiap sub sistem)

h. Pemantauan Pelaksanaan Sekretariat Dewan Ketahanan

Pangan

i. Latar Belakang

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah memantapkan ketahanan pangan. Perwujudan ketahanan pangan di tingkat nasional, dicapai secara berjenjang mulai dari tingkat perseorangan, rumah tangga, kabupaten, provinsi, sampai pada tingkat nasional. Perwujudan ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Salah satu wadah koordinasi bagi stakeholder terkait dalam membahas, merumuskan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan.

ii. Tujuan

- Merangkum pelaksanaan kegiatan DKP di Provinsi Jawa Tengah serta Koordinasi dengan DKP Kabupaten/ Kota dan Pusat.

iii. Sasaran

- Terdokumentasi dan terevaluasinya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dewan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah.

iv. Pelaksanaan Kegiatan

- Bulan Mei dan Nopember 2015.

v. Output

- Laporan hasil evaluasi kinerja program DKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

vi. Outcome

- Semakin meningkatnya peran DKP dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah.

i. Monitoring & Evaluasi Kegiatan ketahanan Pangan

i. Latar Belakang

Setiap kegiatan dalam pelaksanaannya membutuhkan

pemantauan sejauh mana hasil yang dicapai dapat bermanfaat bagi sasaran kegiatan. Monitoring atau pemantauan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan evaluasi yaitu suatu proses yang dilakukan secara berkala yang menyangkut relevansi, kinerja efisiensi dan dampak dari kegiatan itu sendiri. Dengan pelaksanaan monitoring langsung pada sasaran kegiatan dan evaluasi secara berkala maka akan memberikan informasi dan dapat mengidentifikasi keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

ii. Tujuan

- Pemantauan hasil kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan baik secara administratif/keuangan maupun fisik
- Mengetahui hal-hal yang dapat menghambat hasil pelaksanaan kegiatan (faktor intern dan faktor ekstern)

iii. Sasaran

- Terpantaunya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah

iv. Pelaksanaan Kegiatan

- Bulan Juni dan Desember 2015 (setelah kegiatan dilaksanakan).

v. Output

- Laporan hasil monitoring dan evaluasi masing-masing kegiatan
- Indikator fisik dan finansial termasuk pengukuran kinerja yang berasal dari rasio biaya dan operasional

vi. Outcome

- Acuan rencana kerja untuk tahun anggaran yang akan datang.

6. Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis

i. Latar Belakang :

Produksi pangan di Indonesia komoditasnya berkaitan erat dengan musim, oleh karena itu mempengaruhi fluktuasi harga dimana apabila musim panen tiba yang ditandai dengan produksi yang tinggi dan ketersediaan pangan juga tinggi akan mempengaruhi harga, sehingga harga cenderung akan turun namun apabila tidak ada musim panen maka harga cenderung akan tinggi.

Distribusi, harga dan akses pangan memberikan manfaat, karena pergerakan distribusi bahan pangan sangat dinamis dari satu wilayah ke wilayah lain (wilayah sentra produksi ke wilayah konsumen).

Harga pangan merupakan salah satu indikasi yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani / produsen dan sebagainya. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan.

ii. Tujuan

1. Tersedianya data dan informasi harga pangan strategis sebagai vahan pengambilan kebijakan.
2. Meningkatkan akses pangan masyarakat.

iii. Sasaran

Pemantauan harga pangan

- a. Pemantauan Harga Pangan Strategis, di 10 Price centre
- b. Padat Karya Pangan/peningkatan akses desa tertinggal

iv. Rencana Kegiatan

- a. Alokasi Anggaran TA. 2015

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 3814/DPA/2015, pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.

1.047.000.000,-

b. Rencana Lokasi kegiatan

- Padat karya pangan pangan di 29 Kabupaten, 30 Desa
- Pemantauan harga pangan strategis di 13 Kabupaten/Kota (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Pati, Brebes, Sragen, Banyumas, Boyolali, Purbalingga, Banjarnegara)
- Pasar murah pangan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten/kota yang siap melakukan kegiatan pasar murah pangan.

c. Kegiatan

- Pemantauan perkembangan harga pangan strategis.
- Peningkatan akses pangan masyarakat melalui pasar murah pangan.
- Peningkatan akses pangan masyarakat melalui kegiatan padat karya pangan di desa tertinggal .
- Rapat Koordinasi HBKN.

d. Rencana pelaksanaan kegiatan

- Pemantauan harga pangan strategis (Januari – Desember).
- Peningkatan akses pangan masyarakat melalui pasar murah pangan (Juni – Juli.)
- Peningkatan akses pangan masyarakat melalui kegiatan padat karya pangan di desa tertinggal (Maret – Mei).
- Rapat Koordinasi HBKN (Juli).

e. Output

- Terlaksananya pemantauan perkembangan harga pangan strategis selama 12 bulan.
- Terselenggaranya pasar murah pangan sebanyak 4 (empat) kali.
- Terlaksananya kegiatan padat karya pangan di 30 lokasi/29 Kabupaten.
- Terlaksananya kekoordinasi instansi terkait dalam rangka HBKN.

f. Outcome

- Tersedianya data perkembangan harga pangan strategis

selama 12 bulan.

- Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan selama menghadapi HBKN (puasa Romadhon, hari raya Iedul Fitri hari raya Natal dan Tahun baru 2015).
- Meningkatnya akses pangan masyarakat didesa tertinggal.
- Terpantaunya ketersediaan, kebutuhan dan harga pangan menjelang HBKN.

g. Penilaian Resiko Kegiatan /Sub Kegiatan

- Pergantian petugas atau mutasi pegawai yang sering terjadi di KabupatenKota.
- Pengiriman data yang sering terlambat.

h. Keterkaitan Dengan Kegiatan Tahun 2014

Kegiatan tahun 2015 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kegiatan tahun 2014.

7. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

i. Latar Belakang

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Masalah yang sering dihadapi oleh petani yaitu di saat menghadapi panen raya maupun menghadapi paceklik dimana mereka sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Disinilah perlu sekali peranan pemerintah untuk memberdayakan petani agar mereka tidak hidup sendiri-sendiri melainkan harus berkelompok sehingga mereka mempunyai posisi tawar yang baik disaat akan memasarkan produknya. Disisi lain wilayah sentra produksi pertanian khususnya padi dan jagung memiliki topografi yang

beragam, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung sektor tersebut (produksi, pengolahan, penyimpanan) bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lain, waktu panen yang tidak bersamaan di beberapa wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen raya, sehingga petani, kelompok tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) selalu dihadapkan pada berbagai masalah diantaranya :

- Rendahnya posisi tawar terutama pada saat panen sehingga terpaksa menjual produknya dengan harga rendah;
- Rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasil pertanian;
- Keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha;
- Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.

Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan, kurangnya semangat memproduksi dan rendahnya kualitas sumberdaya petani. Kondisi ini apabila dibiarkan berkelanjutan akan semakin memperlemah ketahanan pangan rumah tangga petani dan dalam skala yang lebih besar dapat mempengaruhi ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Salah satu cara adalah memperkuat kelembagaan sebagai wadah gapoktan yang melibatkan petani/kelompok tani yaitu dengan melakukan pemetaan kondisi kelompok tani/gapoktan yang sudah ada. Hasil pemetaan akan menjadi arah dalam menguatkan / membangun kelembagaan gapoktan sesuai dengan tujuan kegiatan penguatan LDPM. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan – LDPM) merupakan salah satu kegiatan untuk memperkuat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di desa dalam rangka meningkatkan kapasitas usahanya (stabilitas harga dan akses pangan). Melalui kegiatan penguatan LDPM diharapkan gapoktan di desa (wilayah sentra produksi padi/jagung) mempunyai kemampuan dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan dan melaksanakan stabilisasi harga di tingkat petani melalui pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung milik petani

anggota gapoktan disaat panen raya. Gapoktan membeli komoditas gabah/beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Referensi Daerah untuk jagung. Pemerintah melalui kegiatan penguatan LDPM memberikan dana stimulant berupa dana bantuan sosial (bansos). Dana bansos penguatan LDPM dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas gapoktan dalam kegiatan jual beli gabah/beras/jagung dalam mendorong stabilitas harga pangan dan pengelolaan cadangan pangan pada saat paceklik. Stabilitas harga dilakukan untuk memecahkan masalah jatuhnya harga produk petani yang biasanya terjadi pada saat panen raya karena pasokan yang melimpah. Situasi tersebut biasanya dimanfaatkan para tengkulak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga merugikan petani. Dalam rangka stabilisasi harga tersebut, unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dalam gapoktan mengelola sebagian dana bansos kegiatan penguatan ldpm setelah dikurangi biaya pembuatan/pembangunan /rehab gudang dan cadangan pangan, untuk melakukan jual beli gabah/beras/jagung, terutama dari petani anggota gapoktan. Selanjutnya unit usaha dapat secara profesional memasarkan gabah/beras/jagung tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang optimal untuk meningkatkan pendapatan gapoktan.

Guna mengatasi masalah tersebut, Badan Ketahanan Pangan, mulai tahun anggaran 2011 melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam mengelola kegiatan distribusi agar memperoleh harga yang optimal pada saat panen raya, menghasilkan nilai tambah serta memupuk cadangan pangan. Dengan dukungan tersebut diharapkan anggota gapoktan dapat meningkatkan pendapatannya sekaligus memperkuat akses pangan di saat paceklik. Selanjutnya diharapkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga meningkat dan semangat untuk memproduksi terus berlanjut sehingga memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan wilayah. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada diri manusia, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci pemantapan ketahanan pangan dalam menuju kedaulatan

pangan di tingkat rumah tangga, karena pelaku utama pencapaian kedaulatan pangan masyarakat yang berkelanjutan adalah masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki rumah tangga yang terbatas dengan cara memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi di pedesaan yang telah ada dan dapat dikembalikan di tingkat perdesaan lainnya.

Selanjutnya untuk mendorong dan menumbuhkembangkan peranan gapoktan, kelompok tani dan pelaku usaha bidang pangan di tingkat perdesaan, perlu terus difasilitasi penguatan permodalan, baik melalui kegiatan tunda jual atau kegiatan lainnya. Artinya stabilisasi harga dimanfaatkan untuk menjaga agar harga bahan pangan tidak jatuh dan cadangan pangan untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi petani/masyarakat ketika paceklik atau terjadi kerawanan transien. Oleh sebab itu, dengan semakin berkembangnya gapoktan, kelompok tani dan pelaku usaha bidang pangan di dalam mengatur kestabilan harga pangan dan kecukupan pangan di masing-masing perdesaan, tentunya akan mendorong meningkatnya pendapatan petani sekaligus mendorong peningkatan ketahanan pangan di tingkat petani/masyarakat perdesaan.

ii. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan Gabungan Kelompok Tani untuk mengembangkan unit usaha distribusi hasil pertanian yang mencakup pembelian, penyimpanan, pengolahan dan penjualan hasil pertanian dalam rangka mendorong stabilitas harga pangan strategis;
2. Meningkatkan kemampuan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam mengembangkan unit cadangan pangan untuk menyimpan pangan (gabah/beras) dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya;
3. Meningkatkan kemampuan unit usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha distribusi hasil pertanian atau usaha pemasaran milik gapoktan dalam mengembangkan jejaring distribusi pangan dengan mitra

diluar wilayahnya.

iii. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah 58 Gabungan Kelompok Tani di 29 Kabupaten se Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Batang, Pemalang, Tegal, Pekalongan, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Blora, Grobogan, Semarang, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Wonogiri, Rembang, Temanggung, Magelang, Purworejo, Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Banyumas dan Cilacap.

iv. PERSYARATAN GAPOKTAN CALON PENERIMA LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2015

1. Gapoktan/Kelompok Tani yang sah dan berada didaerah sentra produksi padi;
2. Memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Unit Usaha Distribusi Pangan) dan Sah (Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk);
3. Memiliki unit usaha distribusi hasil pertanian atau unit usaha pemasaran/pengolahan dan unit cadangan pangan;
4. Berpengalaman dalam jual-beli (gabah/beras/jagung), serta pengolahan (pengeringan, pembersihan, penggilingan, pengepakan);
5. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama;
6. Memiliki potensi pengembangan usaha (keinginan untuk memperluas usaha) bagi kepentingan anggota kelompok dan penguatan cadangan pangan secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Bersedia dan sanggup memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan bantuan tunda jual bersama-sama anggota kelompok serta melibatkan masyarakat disekitarnya yang belum tergabung dalam kelompok serta melaporkan kegiatan dan perkembangannya secara periodik ;

B. PERSYARATAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

(GAPOKTAN) BELANJA BAHAN PERAGA BENIH PADI PADA KEGIATAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PANGAN TAHUN 2015

1. Gapoktan yang sah dan berada di daerah sentra produksi padi dan telah mendapat fasilitasi dari dana APBN dan pada tahun 2015 telah memasuki tahap pasca kemandirian;
2. Memiliki unit usaha distribusi hasil pertanian atau unit usaha pemasaran/pengolahan dan unit cadangan pangan;
3. Berpengalaman dalam jual-beli (gabah/beras), serta memiliki unit pengolahan/kerjasama (pengeringan, pembersihan, penggilingan, pengepakan);
4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama;
5. Memiliki potensi pengembangan usaha tani dengan berorientasi pada usahatani ramah lingkungan (menuju pertanian organik);
6. Bersedia dan sanggup memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan bantuan tunda jual bersama-sama anggota kelompok serta melibatkan masyarakat disekitarnya yang belum tergabung dalam kelompok serta melaporkan kegiatan dan perkembangannya secara periodik ;

II. RENCANA KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015

A. Alokasi Anggaran Tahun 2015

Pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui iPenguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tahun 2015 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyat Rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana lampiran 1.

B. Rencana lokasi kegiatan

Rencana Lokasi Kegiatan pada 58 Gabungan Kelompok Tani sesuai usulan Bupati/Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten se Jawa Tengah sebagaimana pada lampiran 2, yang selanjutnya akan diverifikasi persyaratan teknis dan administrasi.

C. Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Sub. Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tahun 2015 sebagaimana Rencana Operasional Kegiatan (ROK) pada lampiran 3. Secara teknis pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Lembaga Distribusi Pangan :

1. Bagi penanggung jawab kabupaten

- Peserta : Penanggung Jawab Kabupaten (Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten) atau petugas yang ditunjuk.
- Direncanakan pada bulan Januari 2015
- Tempat Penyelenggaraan : di Tingkat Provinsi

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) :

1. Pelaksanaan verifikasi usulan kabupaten ditingkat lapangan

- Pelaksana : Tim dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten;
- Direncanakan : Bulan Januari s/d Maret 2015
- Lokasi : Kabupaten se Jawa Tengah

2. Penetapan calon penerima kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

- Pelaksana : Dirumuskan oleh Tim dari BKP Provinsi Jawa Tengah
- Direncanakan : Bulan Pebruari 2015

3. Penyaluran stimulan sistem tunda jual bagi 58 gapoktan di 29 Kabupaten se Jawa Tengah yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

- Pelaksana : PUMK dari BKP Provinsi Jawa Tengah
- Mekanisme : Kegiatan ini diawali dengan identifikasi oleh petugas Kabupaten dan Provinsi untuk menentukan gapoktan calon penerima fasilitasi gabah tunda jual. Dari

hasil identifikasi gapoktan diusulkan oleh kabupaten sebagai calon penerima fasilitasi gabah tunda jual; dari hasil usulan Kabupaten dilakukan verifikasi oleh tim Provinsi terhadap persyaratan gapoktan yang telah diusulkan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebagai penerima fasilitasi gabah tunda jual. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran bantuan : Pengadaan stimulan untuk tunda jual berupa gabah adalah melalui pengadaan Pelelangan. Mekanisme pemberian bantuan adalah pemberian bantuan berupa Gabah Kering Giling (GKG) ke masing-masing Gapoktan/Kelompok penerima stimulan tunda jual yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Stimulan tunda jual adalah berupa Gabah Kering Giling (GKG), dengan ketentuan :

- Varietas : IR-64, Ciherang atau varietas unggul lainnya;
- Kadar air Max : 15 %;
- Kadar Kotoran Max : 5 %, Butir Hampa Max : 5 %
- Persyaratan fisik : Gabah tidak berubah warna, tidak berbau (apek) atau berjamur.
- Harga perpedoman pada HPP dan atau harga umum yang berlaku dipasaran.

- Direncanakan : Bulan April 2015

4. Terselenggaranya pameran produk pertanian melalui Jateng Fair, Soropadan Agro Ekspo, dan Hari Pangan Sedunia (HPS), kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 paket.

- Pelaksana : Tim dari BKP Provinsi Jawa Tengah

- Direncanakan : Bulan April s/d Juni 2015

- Lokasi : Semarang, Soropadan, Malang dan Kabupaten yang ditunjuk.

- Mekanisme kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk pameran dan promosi pemasaran produk pertanian, sehingga produk pertanian ini dapat meningkatkan penjualan dan mempromosikan produk pertanian.

5. Pemberian penghargaan Adhi Karya Ketahanan Pangan kelompok kelembagaan ketahanan Pangan yaitu pada gapoktan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang berprestasi.

- Pelaksana : Tim dari BKP Provinsi Jawa Tengah
- Direncanakan : Bulan September- Nopember 2015
- Lokasi : Gapoktan berprestasi yang berada di Kabupaten se Jawa Tengah.
- Mekanisme : Pemberian hadiah gapoktan berprestasi adalah dengan cara melakukan seleksi terhadap kinerja gapoktan, meliputi pengembangan unit usaha distribusi dan pemasaran (pengembangan kemitraan), administrasi dan pelaporan, serta upaya mensinergikan kegiatan LDPM dengan kegiatan lintas sektor dan sumberdaya yang tersedia di gapoktan. Untuk gapoktan juara I Provinsi akan diajukan ke tingkat pusat mewakili Provinsi Jawa Tengah. Untuk Juara I akan mendapatkan Tabungan Rp.6.500.000,-, Juara II mendapatkan Tabungan Rp.5.000.000,- dan Juara III mendapatkan Tabungan Rp.4.000.000,-.

- d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan :

- Peserta : Penanggung Jawab Kabupaten (Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten) atau petugas yang ditunjuk.
- Direncanakan pada bulan Januari s/d Desember 2015
- Tempat Penyelenggaraan : di Tingkat Provinsi.
- Mekanisme pelaksanaan : Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi monitoring dan evaluasi, dan pembinaan dan monitoring di tingkat lapang.
 - Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi diselenggarakan di Provinsi dengan peserta dari Kabupaten yang berasal dari petugas yang telah ditunjuk. Pada koordinasi ini diupayakan pemaparan pelaksanaan kegiatan LDPM dari masing-masing wilayah yang ditunjuk, sehingga ditemukan antisipasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan LDPM.
 - Pembinaan dan Monitoring di tingkat lapang adalah dengan cara melakukan pembinaan dan kunjungan di lapangan terhadap pelaksana kegiatan LDPM (penerima tunda jual) dan petugas kabupaten, sehingga permasalahan yang muncul di tingkat lapang dapat dipecahkan secara cepat dan dapat ditekan seminimal mungkin.

D. Out Put

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Distribusi Pangan Tahun 2015 terbagi dalam sub kegiatan dengan out put sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat bagi penanggung jawab kabupaten dan bagi petugas pelaksana:

Memasyarakatnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Jawa Tengah.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat :

- Meratanya produk pangan antar waktu dan antar wilayah di 29 Kabupaten se Jawa Tengah
 - Optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam menangani distribusi dan pemasaran hasil pertanian melalui pembelian gabah sebagai stimulan pelaksanaan sistem tunda jual bagi 58 gapoktan di 29 Kabupaten se Jawa Tengah (unit distribusi pangan).
 - Tersedianya hadiah bagi gapoktan pemenang lomba LDPM.
 - Terselenggaranya pemasaran produk pangan melalui pameran Jateng Fair, SAE, HPS dan Penas.
 - Tersedianya sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran pangan.
- c. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan :
- Terlaksananya evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan.
 - Terkoordinasinya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan.

E. Out Come

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Distribusi Pangan Tahun 2015 terbagi dalam sub kegiatan dengan out come sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Distribusi Pangan :

Berkembangnya kegiatan distribusi dan pemasaran di Jawa Tengah.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat :

- Produk pangan merata diseluruh wilayah di Jawa Tengah
- Meningkatnya distribusi dan pemasaran produk pangan melalui pameran Jateng Fair, SAE, HPS dan Penas;

- Masyarakat Optimal dalam mengembangkan distribusi dan pemasaran hasil pertanian.
 - Meningkatnya distribusi dan pemasaran produk pangan di masing-masing wilayah melalui outlet pemasaran;
- c. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan :
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan, sehingga mampu menekan kesalahan-kesalahan di tingkat lapang maupun administrasi.

F. Penilaian Resiko Kegiatan/Sub Kegiatan

- a. Kemungkinan adanya resiko-resiko pelaksanaan kegiatan :
- Pengelolaan fasilitasi gabah sebagai sarana distribusi pangan sebagai sistem tunda jual belum optimal, sehingga diperlukan pembinaan dan pendampingan oleh Kabupaten/Provinsi.
 - Terjadinya keterlambatan-keterlambatan dalam memenuhi persyaratan calon lokasi dan calon peserta ditingkat lapangan.
 - Dampak kegiatan bila dibanding dengan jumlah produksi sangat kecil, namun sudah memberi pengaruh bagi gapoktan pelaksana.
- b. Keterkaitan dengan kegiatan Tahun 2014.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah adalah tahun kelima. Pelaksanaan Tahun 2015 kegiatan ini memberikan output antara lain memfasilitasi sarana prasarana dan permodalan gapoktan dalam mengembangkan unit usaha distribusi dan pemasaran.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 output yang diharapkan dapat mengembangkan sistem tunda jual pada saat panen raya yang biasanya terjadi penurunan harga di bawah HPP yang merugikan petani.

C. Program Pengembangan Diversifikasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

1. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

i. Latar Belakang

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Dari segi fisiologis juga dikatakan, bahwa untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan, sebab tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap zat gizinya selain air susu ibu (ASI).

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah ditinjau melalui pola pangan harapan (PPH), menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi pangan penduduk Jawa Tengah periode 2013 – 2014 mengalami kenaikan dari 90,35 menjadi 91,78. Kenaikan mutu konsumsi pangan penduduk menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman semakin meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut ditunjukkan oleh menurunnya konsumsi energi kelompok padi-padian meski masih harus diturunkan lagi sesuai standar. Sementara itu, konsumsi pangan yang perlu dinaikkan konsumsinya yaitu, umbi-umbian, pangan hewani serta buah dan sayur. Sedang yang perlu diturunkan adalah konsumsi beras dan lemak serta minyak.

Implementasi Pengembangan Diversifikasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal mengingat permintaan beras terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim global, dampak pemberian Raskin semakin mendorong masyarakat yang makanan pokoknya non beras menjadi beras (nasi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal.

Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari kegiatan 2014 diwujudkan dalam 4 sub kegiatan yaitu Model

Pengembangan Pangan Alternatif, Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dan Festival Kuliner Pangan Lokal.

Merujuk pada situasi tersebut, maka Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya adalah Peningkatan Diversifikasi Pangan (Penganekaragaman Pangan) menjadi salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden selama tahun 2009 – 2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Kontrak kerja ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal serta Peraturan Gubernur (Pergub) No. 41 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut menjadi acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal tahun 2015 ini ditetapkan agar dapat menjadi rambu-rambu pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal sesuai dengan hasil yang ditargetkan.

ii. Tujuan

1. Tujuan Umum:

Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh Skor PPH pada tahun 2015 sebesar 95.

2. Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparat pemerintah, penyuluh pertanian dan tokoh/pimpinan kelembagaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- b. Meningkatkan motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan

- kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan budaya makan yang sehat dan benar.
- c. Memberdayakan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya untuk penganekaragaman konsumsi pangan.
 - d. Meningkatkan citra dan nilai jual pangan lokal.

iii. Sasaran

1. Sasaran Program

Mengacu pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran Program Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan adalah:

- a. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang penganekaragaman konsumsi pangan kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi aparat pemerintah, penyuluh pertanian, guru, kelompok wanita, siswa SD/MI, pengusaha pangan lokal dan kelompok masyarakat lainnya.
- b. Terwujudnya pola konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi seimbang, dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH 95 pada tahun 2015; serta menurunnya konsumsi beras sebesar sekitar 1,5% per tahun.

2. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal tahun 2015 merupakan kegiatan lanjutan tahun 2014 berupa pemberdayaan langsung ke masyarakat dengan sasaran kegiatan pada 42 kelompok pengolah pangan pendukung model pengembangan pangan alternatif.

Sasaran kegiatan lainnya adalah masyarakat luas untuk membangun kesadaran akan manfaat konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka mendorong penurunan konsumsi beras 1.5% per tahun.

IV. Rencana Kegiatan/Sub Kegiatan TA : 2015

1.Sub Kegiatan Model Pengembangan Pangan Alternatif

Tujuan :

- 1. Mengurangi konsumsi beras dan terigu
- 2. Mengurangi ketergantungan pada salah satu komoditas (terutama beras dan terigu)
 - a. Alokasi Anggaran :

Alokasi anggaran sub kegiatan Model Pengembangan Pangan Alternatif tahun 2015 : Rp. 442.890.000,-

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi sub kegiatan Model Pengembangan Pangan Alternatif tahun 2015 direncanakan pada 35 Kabupaten/ kota se Jawa Tengah.

c. Pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Pangan Alternatif tahun 2015 diawali dengan :

- Identifikasi CPCL Stimulan Pengembangan Pangan Alternatif,
- Forum Pengembangan Pangan Lokal
- Apresiasi kelompok tani/ UKM bidang pangan,
- Proses pengurusan administrasi pangadaan
- Stimulan Model Pengembangan Pangan Alternatif
- Monitoring dan pembinaan Pengembangan Pangan Alternatif
- Pelaporan

2. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Model Pengembangan Pangan Alternatif tahun 2015 direncanakan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Identifikasi CPCL Stimulan Pengembangan Pangan Alternatif												
2	Forum Pengembangan Pangan Lokal & Apresiasi kelompok tani/ UKM Bidang Pangan												
3	Proses Administrasi Pengadaan												
4	Pemberian Stimulan Alat Pengolahan												

Pemilihan Calon Lokasi Kegiatan:

a. Identifikasi CPCL

- Desa calon lokasi berpotensi menghasilkan pangan lokal;
- Calon lokasi mempunyai akses sosial yang baik;
- Terdapat UMKM bidang pangan yg berpotensi untuk dikembangkan (bukan klp.bentukan baru), UKM tsb. Sudah memproduksi olahan pangan lokal tertentu serta mempunyai pasar tetap. UKM juga sudah mempunyai peralatan pengolah pangan sendiri tetapi masih perlu dikembangkan.

Output :

- Teridentifikasi dan terpilihnya calon penerima dan calon lokasi kegiatan Pengembangan Pangan Alternatif.
- Terlaksananya forum pengembangan pangan lokal dan apresiasi model pengembangan pangan alternatif masing - masing sebanyak 1 kali dalam satu tahun.
- Terlaksananya pemberian Stimulan alat pengolahan pangan lokal masyarakat desa pada kegiatan model pengembangan pangan alternatif sebanyak 40 paket untuk 42 kelompok @ Rp. 5.000.000,- di 35 kabupaten/ kota.
- Terlaksananya Pembinaan dan evaluasi kegiatan secara berkala.
- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan model pengembangan pangan alternatif.
- Meningkatnya kemampuan SDM masyarakat dalam memilih pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

d. Outcome :

Meningkatnya kemampuan SDM masyarakat dalam memilih, menentukan dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

2. Sub Kegiatan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan

Kegiatan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan bertujuan untuk:

- Kegiatan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan bertujuan untuk:
- menyebarluaskan informasi mengenai upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan
 - memasyarakatkan tentang pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, serta pentingnya menurunkan konsumsi beras 1.5 persen per kapita per tahun.

a Alokasi anggaran sub kegiatan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan tahun 2015 : Rp. 257.370.000,-

b. Rencana Lokasi serta waktu Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Lokasi	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)						
			April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Oktob
1	Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan								
a.	Lomba Cipta Menu	Provinsi							

	Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal								
b.	Pameran Pangan Lokal Berbasis Sumberdaya Wilayah	Provinsi							

c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Promosi terdiri dari : Lomba Cipta Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal dan Pameran Pangan Lokal Berbasis Sumberdaya Wilayah.

c.1. Kegiatan Lomba Cipta Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal

- bertujuan untuk :
- bertujuan untuk :
 - Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat pada umumnya dan ibu rumah tangga khususnya dalam memilih, menentukan, menyusun, dan menciptakan menu baru bagi keluarga yang sesuai dengan kaidah menu beragam, bergizi, seimbang dan aman sesuai potensi sumberdaya wilayah.
 - Memasyarakatkan dan membiasakan keluarga untuk mengkonsumsi aneka menu beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan resep makanan khas daerahnya dengan memanfaatkan pekarangan yang ada.
 - Memasyarakatkan berbagai macam masakan khas daerah guna mendukung konsumsi pangan B2SA.
- Sasaran:

Memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam TP PKK untuk menunjukkan atau menampilkan kreativitas resep dan menu bagi keluarga.
- Pembiayaan

Kegiatan Lomba dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2014. Jumlah biaya sebesar Rp. 144.605.000,- (rapat, pelaksanaan lomba tingkat provinsi, perjalanan pembinaan & mensosialisasikan hasil lomba ke kab/kota, rapat persiapan ke Nas dan perjalanan ke Nas).

c.2. Kegiatan Pameran Pangan Lokal Berbasis Sumberdaya Wilayah

- bertujuan untuk :

- Memperkenalkan aneka jenis olahan pangan lokal kepada masyarakat luas
 - Meningkatkan peluang pemasaran hasil produksi pangan olahan lokal kepada masyarakat.
 - Memberikan peluang bagi para UKM bidang pangan untuk meningkatkan produksinya.
- **Sasaran**
- Kegiatan Pameran Pangan Lokal Tahun 2015 mempunyai sasaran yaitu para industri makanan lokal, UKM bidang pangan, Catering, instansi, pemerintah, swasta, pendidikan, perhotelan, Perguruan Tinggi dan masyarakat luas.
- **Pembiayaan**
- Kegiatan Pameran Pangan Lokal Berbasis Sumberdaya Wilayah dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015.
- Jumlah biaya sebesar Rp. 112.765.000,- (rapat, pelaksanaan dan perjalanan pembinaan pangan lokal)

f. **Penilaian Resiko Kegiatan/Sub Kegiatan**

Dalam keadaan *force majeure*, adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang karena diluar kesanggupan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang, misalnya: adanya bencana alam, antara lain : Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, perang, huru hara dan sebagainya yang mengakibatkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, adanya perubahan peraturan Pemerintah dibidang moneter, yang langsung mengakibatkan kenaikan harga bahan dan upah pekerja seperti devaluasi, serta adanya peristiwa lain yang diajukan oleh kelompok yang didukung dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan disetujui/diketahui oleh Badan/Kantor/Instansi Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, maka sub kegiatan Promosi Percepatan penganekaragaman Pangan kemungkinan tidak dilaksanakan.

3. Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

a. **Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran sub Kegiatan Pengembangan Teknologi tepat Guna Olahan Pangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Tahun 2013 sebesar Rp. 82.150.000,-

- b. Lokasi Kegiatan

Lokasi sub Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dilaksanakan di Provinsi, pada bulan Agustus 2015.
- c. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi berupa pameran untuk memasyarakatkan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas olahan pangan
- d. Output

Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan dikenal masyarakat dan dapat diaplikasikan oleh masyarakat untuk lebih meningkatkan olahan pangan secara kualitas dan kuantitas.
- e. Outcome

Kualitas olahan pangan lokal semakin meningkat.
- f. Penilaian Resiko Kegiatan/Sub Kegiatan

Dalam keadaan force majeure, adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang karena diluar kesanggupan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang, misalnya: adanya bencana alam, antara lain : Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, perang, huru hara dan sebagainya yang mengakibatkan terhentinya/ terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, adanya perubahan peraturan Pemerintah dibidang moneter, yang langsung mengakibatkan kenaikan harga bahan dan upah pekerja seperti devaluasi, serta adanya peristiwa lain yang diajukan oleh kelompok yang didukung dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan disetujui/ diketahui oleh Badan/Kantor/Instansi Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, maka sub kegiatan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan kemungkinan tidak dilaksanakan.

Rencana Waktu Kegiatan

NO	URAIAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pameran Produk Inovasi	Provinsi	Agustus

4. Sub Kegiatan Festival Kuliner Pangan Lokal

- bertujuan untuk :
 - 1. Memperkenalkan aneka jenis olahan pangan lokal Jawa Tengah kepada masyarakat luas

2. Meningkatkan peluang pemasaran hasil produksi pangan olahan lokal kepada masyarakat

➤ sasaran :

Festival pangan lokal dibuat dengan sasaran masyarakat luas melalui pameran tingkat provinsi maupun kabupaten sehingga dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat Jawa Tengah. Kelompok pengolah pangan lokal juga dapat mempromosikan produknya secara tidak langsung dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok dengan peningkatan penjualan.

➤ pembiayaan :

Kegiatan Festival Kuliner Pangan Lokal dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015.

Jumlah biaya sebesar Rp. 209.090.000,-

d. Output :

- Terlaksananya kegiatan Festival Kuliner Pangan lokal Berbasis Sumberdaya Wilayah di bulan April ;
- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Pangan

e. Outcome :

Meningkatnya citra pangan lokal serta meningkatkan kesejahteraan UKM bidang pangan pada khususnya dan masyarakat Jawa tengah pada umumnya.

2. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tahun 2014 tersebar di 35 Kabupaten / Kota se Jawa Tengah, dalam pelaksanaan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Verifikasi Calon Penerima Manfaat (Cp-CI).

Calon penerima manfaat kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah : PKK/ Dawis/ Kelompok Wanita Tani yang diusulkan oleh Badan/ Kantor Ketahanan Pangan kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1). Persyaratan/ kriteria calon peserta / calon lokasi

Persyaratan/ kriteria calon peserta / calon lokasi penerima manfaat kegiatan Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Tahun 2014 sebagai berikut :

- Merupakan Kelompok PKK atau Dasa Wisma atau Kelompok Wanita Tani lainnya serta memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan unit usaha lainnya);
- Masing-masing anggota memiliki Lahan pekarangan;
- Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola dan memfasilitasi kegiatan secara berkelompok;
- Memiliki potensi pengembangan usaha/kegiatan kelompok (keinginan untuk memperluas usaha) bagi kepentingan anggota kelompok secara mandiri dan berkelanjutan;

2). Tujuan Verifikasi calon peserta/calon lokasi

Tujuan verifikasi calon penerima manfaat kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan antara lain Untuk memverifikasi persiapan kelompok dalam melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

3). Sasaran

Sasaran kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan kelompok penerima manfaat Tahun 2015 sebanyak 105 kelompok yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

4). Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi pada bulan Januari 2015 oleh tim pembina dan pelaksana tingkat provinsi yang sebelumnya telah diverifikasi oleh tim teknis kabupaten/kota. Lokasi yang sudah diverifikasi dan disetujui sebagai penerima manfaat tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO	KAB./KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK
1	Cilacap	Cilacap Utara	Tritih Lor	Klp Kegiatan RW 6
2		Adipala	Penggalang	Klp Kegiatan RW 6
3		Patimuan	Bulupayung	KWT Melati
4	Banyumas	Somagede	Somagede	KWT Mugi Utama
5		Cilongok	Cilongok	KWT Khisma Krida
6		Pekuncen	Semedo	KWT Makmur Lestari
7	Purbalingga	Mrebet	Serayu Karanganyar	Karya Utami
8		Karangmoncol	Grantung	Srikandi
9		Kaligondang	Sempor lor	berkah lestari
10	Banjarnegara	Pagedongan	Pesangkalan	KWT Sekar Arum
11		Banjarnegara	KL. Kutabanyar	KWT Teratai
12		Sigaluh	Tunggara	KWT Mekarsari
13	Kebumen	Buluspesantren	Sangubanyu	TP PKK Desa Sangubanyu

NO	KAB./KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK
14		Pejagoan	Kuwayuhan	TP PKK Desa Kuwayuhan
15		Karangsambung	Totogan	TP PKK Desa Totogan
16	Purworejo	Ngombol	Kesidan	KWT Pertiwi
17		Kaligesing	Kaligono	KWT Lestari
18		Bener	Kamijoro	KWT Sri Rejeki
19	Wonosobo	Kalibawang	Dempel	KWT Berkah Usaha
20		Kalikajar	Butuh Lor	KWT Kantong Semar
21		Mojotengah	Kalibeber	PKK Ds. Ngebrak
22	Magelang	Candimulyo	Mejing	KWT Mekar Abadi
23		Dukun	Ketunggeng	KWT Sehkar Wangi
24		Candimulyo	Bateh	KWT Ngudi Utomo
25	Temanggung	Temanggung	Kebonsari	KWT Benih Sari
26		Temanggung	Manding	KWT Kemangi
27		Temanggung	Walitelon Selatan	KWT Wijaya Kusuma
28	Kt Magelang	Magelang Utara	Potrobangsari	KWT Manunggal
29		Magelang Tengah	Cacaban	Kelompok Swadaya Masyarakat " Jambon Sari "
30		Magelang Tengah	Gelangan	Kelompok Swadaya Masyarakat " Anggrek Jaya "
31	Boyolali	Mojosongo	Tambakrejo	KWT Delima
32		Sawit	Gombang	KWT Tani Lestari
33		Boyolali	Mudal	KWT Mekarsari
34	Klaten	Tulung	Pucangmiliran	KWT Mawar
35		Prambanan	Kebondalem Kidul	Klp Wanita Tani Kanhtil 3 & 4
36		Klaten	Jonggrangan	Klp Wanita Mekar Tani
37	Sukoharjo	Sukoharjo	Sukoharjo	KWT Melati Makmur
38		Gatak	Jati	KWT Sehati
39		Mojolaban	Dukuh	KWT Sari Rejeki
40	Wonogiri	Slogohimo	Butuh	KWT Butuh
41		Bulukerto	Pondok	KWT Pondok
42		Sidoharjo	Widodo	KWT Bhakti Tani II
43	Karanganyar	Ngargoyoso	Dukuh	KWT Sasmito Tani
44		Colomadu	Bolon	KWT Wanita Mandiri
45		Jatipuro	Jatimulyo	KWT Makmur Lestari
46	Sragen	Miri	Doyong	KWT Guyup Rukun
47		Gondang	Glonggong	TP PKK Glonggong
48		Sragen	Bangunsari	TP PKK Bangunsari
49	Kt Surakarta	Laweyan	Kerten	KWT Sri Kandi
50		Pasar Kliwon	Joyosuran	KWT Nusa Indah
51		Banjarsari	Kadipiro	KWT Ngudi Kawruh
52	Blora	Kunduran	Kedung Waru	TP PKK Desa Kedung Waru
53		Ngawen	Got Putuk	TP PKK Desa Got Putuk
54		Jepun	Bangsri	TP. PKK Desa Bangsri
55	Rembang	Bulu	Sendang Mulyo	KWT Mawar

NO	KAB./KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK
56		Rembang	Ngadem	KWT Ngudi Rahayu
57		Kaliori	Wiroto	KWT Budi Rahayu
58	Pati	Pati	KI Pati Wetan	KWT Surya Mandiri
59		Pati	Parengan	KWT Anggrek 3
60		Margorejo	Penambuhan	KWT Waru
61	Kudus	Dawe	Piji	TP PKK Desa Piji
62		Bae	Dersalam	TP PKK Desa Dersalam
63		Kudus Kota	Kaliputu	TP PKK Desa Kaliputu
64	Jepara	Jepara	Demaan	PKK RT 01 RW 06 Ds. Dermaan
65		Keling	Kaligarang	PKK RT 1 RW 1 Ds Kaligarang
66		Donorojo	Jugo	PKK RT 2 RW 1 Ds Jugo
67	Grobogan	Godong	Klampok	Klp Maju Jaya
68		Purwodadi	Cingkrong	KWT Srikandi
69		Kedungjati	Deras	KWT Ngudi Rahayu
70	Demak	Karanganyar	Tuwang	KWT Nusa Indah
71		Mranggen	Banyumeneng	KWT Makmur Lestari
72		Kebonagung	Sokokidul	KWT Kaswari
73	Semarang	Bergas	Bergas Lor	KWT Dadi Rejo
74		Ungaran Barat	Branjang	KWT Mardi Mulyo
75		Suruh	Ketanggi	KWT Rahayu Lestari
76	Kendal	Limbangan	Ngesrepbalong	KWT Mekar Sari
77		Gemuh	Lumansari	KWT Kuncup Mekar Sari
78		Limbangan	Tamanrejo	KWT Tamansari
79	Kt Salatiga	Tingkir	RT 1 s/d RT 4 RW 10 KI Tingkir	PKK Mutiara
80		Tingkir	Kalibening RT 2 RW 3	Klp Masyarakat Candak Kulak
81		Argomulyo	Ledok	KWT Tunas Makmur
82	Kt Semarang	Tugu	Mangkang Wetan	PKK Kelurahan Mangkang Wetan
83		Tembalang	Sendang Mulyo	KSM Kenanga Makmur
84		Ngaliyan	Podorejo	Kelompok Wanita Mugi Rahayu
85	Batang	Bandar	Binangun	Kartini
86		Blado	Selopajang Barat	Sekar Asih
87		Tersono	Harjowinangun Timur	Mekar Indah
88	Pekalongaan	Bojong	Wangandowo	KWT Subur Makmur
89		Talun	Sengare	KWT Barokah
90		Wonopringgo	Sampih	KWT Sri Rejeki
91	Pemalang	Randudongkal	Tanahbaya	TP PKK Ds Tanahbaya
92		Taman	Sokowangi	TP PKK Ds Sokowangi
93		Bodeh	Kalangdepok	TP PKK Ds Kalangdepok
94	Tegal	Kramat	Mejasem Barat	KWT Kartini Makmur
95		Dukuhwaru	Pedagangan	KWT Mawar Putih
96		Pangkah	Pangkah	KWT Mekar Berseri
97	Brebes	Brebes	Limbangan	KWT Sejati

NO	KAB./KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK
98		Tonjong	Pepedan	KWT Sumber Rejeki
99		Jatibarang	Jatibarang Kidul	KWT Flamboyan
100	Kt Pekalongan	Pekalongan Timur	Klego	Klp Teratai
101		Pekalongan Utara	Krapyak Lor	Klp Barsa
102		Pekalongan Barat	Kebulen	Klp Kamboja
103	Kt. Tegal	Tegal Selatan	Kalinyamatan Wetan	Klp Wanita Tani Makmur
104		Kota Tegal	RT 13, RW 07 KI Panggung	Klp Wanita Hijau Daun
105		Kota Tegal	RT 01, RW 03, KI Muarareja	Klp Wanita Kuncup Mekar

5). In put

In put pelaksanaan verifikasi kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 32.240.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

6). Out Put yang diharapkan

Out put pelaksanaan verifikasi berupa penetapan Hasil verifikasi melalui SK kepala BKP Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima manfaat kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan tahu 2015.

7). Out Come

Out come pelaksanaan verifikasi kegiatan optimalisasi pemanfaatan bahwa kelompok sasaran terpilih merupakan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi

1). Tujuan

Dalam rangka Persiapan pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dilaksanakan Koordinasi di tingkat provinsi dengan tujuan :

- Untuk memasyarakatkan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan antar instansi terkait maupun pelaksana tingkat kabupaten.
- Mempersiapkan pelaksanaan sesuai petunjuk pelaksanaan dan jadwal kegiatan.
- Mensosialisasikan Program P2KP melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan antar Stake Holder dan Pelaksana tingkat Kabupaten/ Kota serta instansi terkait;
- Memonitor pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan secara berkala dan berkelanjutan;

2). Sasaran

- Kepala Badan/Kantor ketahanan Pangan tingkat kabupaten/Kota dan
- Petugas Kabupaten/Kota yang membidangi dari 35 Kabupaten/Kota

3). Pelaksanaan

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pada bulan Januari 2015 dengan mengundang Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan petugas pelaksana ditingkat provinsi.

4). In Put

In put pelaksanaan Koordinasi kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 16.640.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

5). Out Put yang diharapkan

Out put yang diharapkan agar kegiatan ini antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik ditingkat lapangan.
- Memasyarakatnya kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan antar instansi terkait maupun pelaksana tingkat kabupaten.

6). Out Come

Out come Koordinasi pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan terencanaanya pelaksanaan kegiatan dengan baik sesuai maksud dan tujuannya.

c. Apresiasi ditingkat lapangan

Apresiasi pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota penerima manfaat.

1). Tujuan

Tujuan pelaksanaan apresiasi ditingkat kabupaaten/kota sebagai berikut :

- Untuk memasyarakatkan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota dan kelompok penerima manfaat ;
- Mempersiapkan pelaksanaan sesuai petunjuk pelaksanaan dan jadwal kegiatan di tingkat lapangan;
- Mensosialisasikan Program P2KP melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan bagi Pelaksana tingkat Kabupaten/ Kota dan kelompok penerima manfaat;
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan;

2). Sasaran

Sasaran penyelenggaraan apresiasi kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA yaitu sebanyak 20 orang setiap kabupaten/Kota yang terdiri dari Petugas

kabupaten/Kota, Penyuluh Pendamping tingkat desa, Ketua dan Pengurus kelompok sasaran.

3). Pelaksanaan

Pelaksanaan apresiasi ditingkat kabupaten /kota lokasi diselenggarakan dimasing-masing kabupaten/kota lokasi kegiatan dengan perincian :

- Membentuk panitia penyelenggara (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Menunjuk narasumber (dari SKPD teknis terkait tingkat kabupaten sebagai tim teknis)
- Kepesertaan apresiasi mengundang SKPD terkait lainnya tingkat Kabupaten/Kota dan pengurus kelompok penerima manfaat sebanyak 20 orang.

4). In Put

In put pelaksanaan Apresiasi tingkat kabupaten/kota kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 142.400.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

5). Out Put yang diharapkan

Out put apresiasi tingkat kabupaten/kota lokasi kegiatan antara lain :

- Agar program kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dikenal dan secara teknis didukung SKPD lainnya.
- Agar kelompok penerima manfaat memahami dan mempersiapkan diri serta menerapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

6). Out Come

- Meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga yang B2SA;
- Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam gerakan P2KP; dan
- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penghitungan skor PPH.

d. Stimulan Kelompok Penerima Manfaat.

Stimulan dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangantahun 2015 berupa hibah barang dan jasa bagi 105 kelompok penerima manfaat yang tersebar di 35 Kabupaten/ Kota lokasi kegiatan.

1). Tujuan

Tujuan pemberian Stimulan antara lain :

- Untuk memperkuat permodalan kelompok dalam memanfaatkan pekarangan.

- Memberikan sarana prasarana dalam mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan agar dapat menjadi lumbung hidup dan sumber pangan keluarga serta dapat sebagai penyangga ekonomi keluarga.
- Untuk meningkatkan penganekaragaman pangan bersumber dari pekarangan.

2). Jenis stimulan

Jenis stimulan yang disampaikan kepada penerima manfaat adalah :

- Stimulan pemanfaatan pekarangan berupa sarana pertanian untuk pengembangan buah dan sayur;
- Prasarana pemanfaatan pekarangan berupa fasilitas untuk pengembangan usaha pertanian di pekarangan.
- Pengembangan perikanan di pekarangan berupa bibit dan sarannya.

3). Sasaran

Sasaran penerima stimulan adalah Kelompok penerima manfaat sebanyak 105 kelompok yang tersebar di 35 kabupaten/Kota

4). Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemberian stimulan bagi kelompok masyarakat penerima manfaat mengacu pada : Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pergub Nomor 19 tahun 2012. Sebagai persyaratan pelaksanaan pemberian stimulan kelompok diwajibkan :

- Menyusun proposal yang diketahui oleh Kepala Desa/Camat selaku penguasa wilayah,
- Usulan dari Kabupaten/Kota yang dilampiri proposal;
- Kelompok masyarakat yang diajukan memiliki kelembagaan yang jelas;
- Diverifikasi oleh tim teknis kabupaten dan tim pembina Provinsi ;
- Ditetapkan sebagai penerima melalui Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- Penerima manfaat bersama pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

5). In Put

In put pemberian stimulan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 840.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

6). Out Put yang diharapkan

- Kelompok penerima manfaat mendapatkan sarana dan prasarana dalam mengembangkan dan menerapkan optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- Konsumsi pangan sumber vitamin dan protein tersedia dan berkelanjutan

7). Out Come

Kelompok sasaran utamanya mampu mengoptimalkan pekarangan dengan membudidayakan aneka sayuran dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral, dan mengembangkan budidaya ikan sebagai sumber protein dengan memanfaatkan stimulan, serta mengembangkan berbagai tanaman sebagai lumbung hidup keluarga

e. Work Shop Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

Work Shop pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota penerima manfaat.

1). Tujuan

Tujuan pelaksanaan Work Shop Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan sebagai berikut :

- Untuk memasyarakatkan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada generasi muda melalui Perguruan tinggi;
- Mensosialisasikan Program P2KP melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan bagi generasi muda melalui perguruan tinggi;
- Memberikan gambaran nyata bagi generasi muda/mahasiswa dalam mendukung keberhasilan penerspsn program P2KP;
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan;

2). Sasaran

Sasaran work shop antara lain generasi muda khususnya mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata sebanyak 200 orang dari 2 perguruan tinggi yang ditunjuk

3). Pelaksanaan

Pelaksanaan Work Shop pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi diselenggarakan di 2 perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan dengan perincian :

- Membentuk panitia penyelenggara (Provinsi dan Perguruan tinggi yang ditunjuk)
- Menunjuk narasumber (dari SKPD teknis terkait sebagai tim teknis)

- Kepesertaan apresiasi mengundang SKPD terkait lainnya tingkat Kabupaten/Kota dan pengurus kelompok penerima manfaat sebanyak 20 orang.

4). In Put

In put work shop kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan kerjasama dengan perguruan tinggi berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 24.100.000,- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).

5). Out Put yang diharapkan

Out put Work Shop pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi kegiatan antara lain :

- Agar program kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dikenal dan secara teknis didukung SKPD lainnya.
- Agar kelompok penerima manfaat memahami dan mempersiapkan diri serta menerapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

6). Out Come

- Mahasiswa KKN mampu menyampaikan pesan tentang pentingnya konsumsi pangan yang B2SA
- Mahasiswa KKN mampu memberikan gambaran yang nyata dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan.

f. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Mendukung Pertanian Terpadu di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan merupakan bagian dari pedesaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi LMDH berada didesa hutan yaitu desa yang memangku dan berdekatan dengan wilayah perhutani. Di Jawa Tengah terdapat 1.900 desa hutan yang sampai saat ini belum semua desa tersebut memanfaatkan pekarangan secara optimal sebagai sumber pangan. Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di LMDH dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota penerima manfaat.

1). Tujuan

Tujuan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan mendukung pertanian terpadu di LMDH sebagai berikut :

- Untuk memberdayakan kelompok wanita tani didesa hutan agar mampu mengelola pekarangan secara optimal sebagai salah satu sumber pangan keluarga;

- Kelompok wanita tani didesa hutan mampu mengoptimalkan sumber dayanya dalam mengolah dan menyajikan pangan untuk keluarganya yang B2SA;
- Kelompok wanita tani didesa hutan mampu mengembangkan potensi dalam mengoptimalkan sumberdaya pangannya mulaaai dari budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran;

2). Sasaran

Sasaran optimalisasi pemanfaatan pekarangan mendukung pertanian terpadu di LMDH sebanyak 4 kelompok LMDH yang terletak di 3 kabupaten yaitu di Kendal, Cilacap, dan Grobogan.

3). Pelaksanaan

Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan mendukung pertanian terpadu di LMDH dengan kegiatan :

- Mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima manfaat
- Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kelompok sasaran melalui pelatihan
- Memberikan sarana dan prasarana dalam mengembangkan potensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan

4). In Put

In put pemberian optimalisasi pemanfaatan pekarangan mendukung pertanian terpadu di LMDH berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 163.490.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

5). Out Put yang diharapkan

Out put optimalisasi pemanfaatan pekarangan mendukung pertanian terpadu di LMDH kegiatan antara lain :

- Potensi desa hutan sebagai salah satu penyumbang pangan dapat dimanfaatkan dengan baik.
- Kelompok wanita tani didesa hutan mampu mengoptimalkan kemampuannya dalam mengembangkan sumberdaya yang dimiliki.

6). Out Come

- Desa hutan mampu menyediakan pangan untuk keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan
- Sumberdaya manusia masyarakat desa hutan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas konsumsi pangannya.

b. Analisa Konsumsi Pangan.

Secara periodik Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan survey konsumsi pangan. Selain itu dalam pengambilan data mencakup data SUSENAS dari Badan Pusat Statistik yang mencakup jenis dan jumlah pangan yang umum dikonsumsi oleh rumah tangga di tiap wilayah.

Pemanfaatan data konsumsi pangan dalam perencanaan penyediaan pangan menjadi sangat penting, mengingat data tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi permintaan pangan sebagai cerminan preferensi, ketersediaan dan daya beli aktual. Disamping itu data konsumsi pangan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi pencapaian ketahanan pangan rumah tangga dari sisi konsumsi (tingkat konsumsi, skor PPH/Skor mutu gizi konsumsi pangan dan prevalensi rumah tangga rawan pangan), serta evaluasi kemampuan produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan untuk konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat digambarkan melalui keragaman konsumsi pangan penduduk (gr/kap/hr dan Kg/Kap/Hr), konsumsi energi penduduk (Kkal/Kap/Hr), dan konsumsi protein penduduk (Gr/Kap/Hr). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Komposisi kelompok pangan tersebut mencakup : (1) Padi-padian, (2) Umbi-umbian, (3) Pangan hewani, (4) Minyak dan lemak, (5) Buah/biji berminyak, (6) Kacang-kacangan, (7) Gula, (8) Sayur dan buah, serta (9) Lain-lain.

Tingkat konsumsi pangan rata-rata orang Indonesia yang diukur dari konsumsi energi pada tahun 2010 mencapai 1.957 kkal/kap/hari mendekati anjuran WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Begitu pula dengan rata-rata konsumsi protein sebesar 59,98 gram/kapita/hari, telah melebihi angka anjuran sebesar 52 gram/kapita/hari. Meskipun demikian, pencapaian tersebut belum diiringi dengan pemenuhan kualitas konsumsi pangan penduduk yang ditandai dengan skor keragaman konsumsi pangan sebesar 80,6 pada tahun 2010 dari target skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 95 pada tahun 2015.

Secara ilmiah, menunjukkan semakin tinggi keragaman konsumsi pangan akan semakin tinggi pula pemenuhan gizinya karena tidak ada satu pun bahan pangan yang mengandung gizi lengkap. Sebaliknya konsumsi pangan yang tidak beragam dapat menurunkan mutu konsumsi, sehingga akan berdampak kepada kualitas sumberdaya manusia. Untuk menjawab tantangan kedepan perlu dibangun

sumberdaya manusia yang sehat, fisik tangguh dan mental kuat serta cerdas melalui pendekatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

upaya perbaikan konsumsi pangan dan gizi dilakukan, melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu (1) dimensi fisik berupa penyediaan pangan sumber karbohidrat non beras/non terigu, protein, vitamin dan mineral; (2) dimensi ekonomi berupa peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan; dan (3) dimensi kesadaran gizi berupa aspek edukasi/ pendidikan/promosi gizi khususnya sejak usia dini.

Kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh status gizi yang Pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Terkait dengan hal tersebut pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Merujuk Empat sukses bidang pertanian, yang salah satunya Peningkatan Diversifikasi Pangan (Penganekaragaman pangan) menjadi Salah satu kontrak kerja antara Mentan dengan Presiden RI Th. 2009-2014 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang ditindaklanjuti dengan Permentan No. 43 Tahun 2009, Pergub Nomor 41 Tahun 2009, dan dikabupaten/Kota ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Secara umum implementasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sangat penting untuk dilaksanakan secara massal mengingat permintaan beras terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim global, dampak pemberian Raskin mendorong masyarakat yang makanan pokoknya non beras menjadi beras, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal, serta merupakan salah satu upaya mendukung Pemerintah dalam mensukseskan surplus beras 10 Juta ton di tahun 2014 dengan semakin menurunkan konsumsi beras dan meningkatkan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi.

Menindaklanjuti visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, strategi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi pangan berpola B2SA melalui kegiatan pemberdayaan kelompok wanita / dasa wisma dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sebagai sumber pangan keluarga, juga dapat berperan positif dalam

upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sejak tahun 2010. Kegiatan ini diwujudkan melalui kegiatan: Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

Pekarangan sebagai sumber pangan keluarga mempunyai multi fungsi yaitu : sebagai lumbung hidup, warung hidup, sumber benih/bibit, dan keasrian serta keindahan bagi pemiliknya. Pekarangan sebagai penyangga ekonomi keluarga melalui pemanfaatannya dengan membangun kawasan sentra produksi suatu komoditas potensial spesifik lokasi.

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain (1). Semakin idealnya konsumsi 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain) dengan pendekatan penghitungan skor Pola Pangan Harapan yang semakin meningkat yaitu Th. 2010 skor PPH 86,02, dan Tahun 2011 88, 66, serta menuju sasaran Pola Pangan Harapan Ideal Tahun 2015 dengan skor 95, (2). Semakin banyaknya masyarakat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga sebagai wujud optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta makin bertambahnya usaha mikro kecil pengembangan bisnis pangan lokal, (3). Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan budaya makan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

a. Tujuan .

- Sebagai acuan dalam melaksanakan survei guna Mengidentifikasi karakteristik demografi, ekonomi, dan agroekolgi wilayah pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
- Sebagai acuan petugas dalam mengumpulkan data karakteristik demografi, ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat di kabupaten dan/atau provinsi.
- Sebagai acuan dalam menganalisis pola konsumsi, proyeksi kebutuhan dan target penyediaan pangan wilayah kabupaten dan/atau provinsi.
- Untuk menyajikan data indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan;
- Untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam menyajikan dan menginterpretasikan seluruh hasil analisis data yang relevan dengan tujuan pelaksanaan survey.

- Sebagai sarana menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, diperlukan ketersediaan dan hasil analisis data, khususnya data yang terkait dengan pola konsumsi dan kebutuhan pangan yang akurat dan up to date tingkat provinsi dan kabupaten.
- Agar dapat mengumpulkan, pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan yang sistematis dan berkesinambungan.

b. Sasaran

- Petugas menganmbil sampel kabupaten/ Kota se Jawa Tengah
- Tersusunnya laporan analisis pola konsumsi, proyeksi kebutuhan dan target penyediaan pangan wilayah kabupaten dan/atau provinsi sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan, strategi & program pangan dan gizi wilayah

c. Pelaksanaan kegiatan

Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahapan yaitu :

1). Koordinasi dan Sinkronisasi

Persiapan pelaksanaan kegiatan Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) dilaksanakan Koordinasi di tingkat provinsi dengan tujuan :

- Untuk memasyarakatkan kegiatan Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) bagi pelaksana tingkat kabupaten.
- Mempersiapkan pelaksanaan sesuai petunjuk pelaksanaan dan jadwal kegiatan.
- Mensosialisasikan menyamakan metode pelaksanaan ditingkat lapangan serta waktu pelaksanaan agar hasil pengambilan data dapat mewakili karakter dan gambaran wilayah setempat.

2). Persiapan Analisa Konsumsi Pangan.

Persiapan pelaksanaan analisa Pola Pangan Harapan diperlukan beberapa instrumen yang merupakan pembekalan bagi petugas pelaksana yang disiapkan ditingkat Provinsi. Hal tersebut untuk mendukung agar data yang diambil mampu memberikan gaambaran nyata pola konsumsi masyarakat diwilayahnya dan secara umum merupakan gaambaran konsumsi pangan wilayah. Persiapan yang dilaksanakan antara lain :

- Penyusunan jadwal pelaksanaan (Lampiran 1).
- Menyusun design survey konsumsi pangan tingkat wilayah (Lampiran 2);

- Penyusunan Panduan pelaksanaan survey konsumsi pangan bagi Petugas pengambil sampel (lampiran 3);
- Penyusunan formulir data survey konsumsi pangan tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah (lampiran 4);
- Penyusunan kuesioner data survey konsumsi pangan tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah (lampiran 5);

Lintasan kritis pelaksanaan kegiatan Penghitungan Pola Pangan Harapan yang perlu diantisipasi antara lain :

- Pelaksanaan di tingkat lapangan harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
- Penentuan metode dan titik sampel.
- Sampel yang mampu mewakili karakteristik wilayah.

3). Pelaksanaan Analisa Konsumsi Pangan.

Salah satu alat ukur kecukupan energi tingkat wilayah dan keanekaragamannya tercermin dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam rangka penghitungan skor Pola Pangan Harapan tingkat Jawa Tengah diperlukan antara lain :

- Data Survei Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah
- Petugas pengambil sampel
- Petugas Pengolah Data
- Petugas Entry Data
- Petugas Analisa Konsumsi Pangan

Pelaksanaan survei di rencanakan mulai bulan Februari – April 2014 yang dilanjutkan pengolahan data, semua petugas ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam pelaksanaan survei dilaksanakan rapat koordinasi analisis Pola Konsumsi Pangan yang di rencanakan pada bulan April 2015.

4). Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Th. 2015.

Dalam rangka Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Th. 2015 dilaksanakan sebagai berikut :

- Melaksanakan pengelolaan hasil survey konsumsi pangan, yang mencakup
 - 1) Data preparation, yang mencakup structuring, coding, dan editing data;
 - 2) Variabel manipulation, yang mencakup enterung, formulating, dan cleaning variable; dan
 - 3) File manipulation, yang mencakup sorting, splitting, dan merging table.
- Menganalisa angka-angka hasil konversi dengan metode komputerise yang sudah tersedia yaitu soft ware yang diterbitkan Kementerian Pertanian RI

dengan aplikasi Microsof excel yang dilengkapi dengan *command button* dan *drop-down menu* serta *hyperlink text* yg dapat diaktifkan dgn menggunakan perangkat mouse.

- Melaksanakan rekapitulasi dan penghitungan untuk memasukkan data-data hasil survey konsumsi pangan wilayah dan variabel-variabel formulasi dasar yang diperlukan untuk dapat menganalisis pola konsumsi pangan wilayah berdasarkan pola pangan harapan
- Menganalisis dan menyusun hasil perhitungan yang merupakan angka skor Pola Pangan Harapan (PPH) Th. 2015.
- Menyusun pelaporan hasil penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Th. 2015

d. In put

In put analisa pola konsumsi pangan berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 111.155.000,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

e. Out Put yang diharapkan

Hasil penghitungan skor Pola Pangan Harapan sesuai target karena merupakan salah satu Standart Pelayanan Minimal Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan sesuai RPJMD Th. 2013-2018 target yang ditetapkan 90,75. Hasil penghitungan Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan, semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

f. Out come

Dapat menentukan arah dan target dalam pembangunan konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah khususnya dan nasional pada umumnya.

c. Pengenalan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi seimbang dan Aman (B2SA) Pada Anak Sejak Usia Dini .

Widya Karya Pangan dan Gizi ke X tahun 2012, mengangkat banyak bahasan tentang upaya diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal. Rekomendasi terkait dengan ketahanan pangan antara lain : Angka Kecukupan Energi (AKE) di tingkat konsumsi sebesar 2150 Kkal/kapita/hari, Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kapita/hari. Sedangkan angka ketersediaan AKE adalah 2400 Kkal/kapita/hari, dan ketersediaan AKP 63 gram/kapita/hari. Target skor PPH 95 ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2025.

Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sangat terkait erat dengan kesehatan masyarakat. Hampir 100% penyakit degeneratif yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia ini berawal dari pola makan yang kurang tepat. Pangan yang tidak aman dapat mempunyai efek merugikan kesehatan baik yang bersifat akut (keracunan oleh mikroba), maupun yang bersifat kronis (kanker, gangguan fungsi ginjal, hepatitis, dll), sehingga pengawasan pangan yang aman menjadi penting.

Terpenuhinya kebutuhan zat gizi, baik gizi makro maupun gizi mikro dalam jumlah yang cukup, diperlukan untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kelompok zat gizi makro antara lain karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan kelompok zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Dinamakan zat gizi makro, karena kita membutuhkannya dalam jumlah yang cukup banyak. Zat gizi makro diperlukan tubuh sebagai sumber energi serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sedangkan zat gizi mikro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit (mg) namun sangat bermanfaat dan diperlukan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan (tulang, gigi, sel dll), pencernaan dan metabolisme, pembentukan imunitas, tekanan darah dan cairan tubuh serta pengendalian syaraf. Oleh karena itu kecukupan zat gizi mikro sangat penting terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita.

Ukuran zat gizi makro dan mikro yang dianjurkan untuk dikonsumsi tersebut diterjemahkan dalam bentuk skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam PPH, pangan dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok yakni (1) padi – padian yang terdiri dari beras, jagung, terigu dan padi – padian lainnya; (2) makanan berpati atau umbi – umbian yang terdiri dari kentang, ubi, sagu, talas, dan umbi – umbian lainnya; (3) pangan hewani, yang terdiri dari ikan, daging, telur, susu dan lemak hewani; (4) lemak dan minyak yang terdiri dari kelapa, kemiri, kenari, mete dan coklat; (5) kacang – kacangan yang terdiri dari kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang – kacangan lainnya; (6) gula yang terdiri dari gula pasir, gula merah dan gula lainnya; (7) sayur dan buah, yakni seluruh jenis sayur dan buah; dan (8) lain – lain terdiri dari teh, kopi, bumbu makanan dan minuman beralkohol.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif bagi anak usia dini.

Beberapa hal tentang keanekaragaman pangan yang perlu menjadi perhatian adalah:

- Makin banyak jenis bahan pangan yang dikonsumsi, makin lengkap perolehan zat gizinya karena tidak ada satupun di dunia ini makanan tunggal yg memiliki semua unsur gizi yg diperlukan tubuh dalam jumlah dan komposisi gizi yg ideal.

- Diversifikasi konsumsi pangan dimulai dari keluarga khususnya ibu rumah tangga.
- Langkah awal adalah memperkenalkan beragam bahan pangan sedini mungkin. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kegiatan B2SA ini diutamakan dilaksanakan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah (SD/MI).

a. Tujuan .

Intervensi Pengenalan konsumsi pangan B2SA pada anak usia dini secara umum bertujuan antara lain :

- Untuk mengenalkan konsumsi Pangan yang beragam dan bergizi seimbang dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Diversifikasi Konsumsi Pangan kepada anak-anak sejak usia dini dalam membangun Diversifikasi Konsumsi Pangan keluarga.
- Mensosialisasikan dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, bagi anak SD/MI;
- Meningkatkan pemahaman anak Didik dan Guru tentang Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.
- Mendorong minat dan kemampuan belajar anak SD/MI dalam meningkatkan prestasi;
- Meningkatkan motivasi, partisipasi, dan aktivitas keluarga dan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengenalan konsumsi makan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

b. Sasaran

Mendorong pengembangan pemberdayaan SD/MI melalui kegiatan pengenalan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan bagi keluarga, untuk tahun 2014 kegiatan dimaksud dialokasikan di 10 (sepuluh) Kabupaten (Semarang, Banjarnegara, Jepara, Cilacap, Boyolali, Magelang, Wonosobo, Kebumen, Pemalang, Pati)

c. Pelaksanaan Kegiatan

1). Koordinasi dan Sosialisasi

Persiapan pelaksanaan kegiatan Intervensi Pengenalan konsumsi pangan B2SA pada SD/MI dilaksanakan Koordinasi di tingkat Kabupaten dengan tujuan :

- Untuk memasyarakatkan kegiatan Intervensi Pengenalan konsumsi pangan B2SA pada SD/MI antar instansi terkait maupun pelaksana tingkat kabupaten.
- Mempersiapkan pelaksanaan sesuai petunjuk pelaksanaan dan jadwal kegiatan.
- Mensosialisasikan Program P2KP melalui kegiatan Intervensi pengenalan konsumsi pangan B2SA pada SD/MI antar Stake Holder dan Pelaksana tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan ditingkat kabupaten pelaksana kegiatan yaitu di 10 Kabupaten/Kota. Koordinasi dan Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan beberapa stake holder antara lain : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkup Pertanian, Penyuluh, dan sekolah penerima kegiatan.

2). Pemberian stimulan percontohan pengembangan kebun sekolah

Stimulan dalam rangka Intervensi Pengenalan konsumsi pangan B2SA pada SD/MI tahun 2014 untuk 10 SD/MI yang tersebar di 10 Kabupaten lokasi kegiatan. Tujuan pemberian Stimulan antara lain :

- Mensosialisasikan dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, bagi anak SD/MI dengan membiasakan /membudayakan mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman bagi anak didik disekolah penerima kegiatan;
- Sebagai media pembelajaran bagi anak didik sejak usia dini dalam memanfaatkan dan mengembangkan pekarangan disekitar rumah sebagai sumber pangan keluarga;
- Meningkatkan pemahaman anak Didik dan Guru tentang Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.
- Mendorong minat dan kemampuan belajar anak SD/MI dalam meningkatkan dan memberdayakan potensi lokal sebagai sumber pangan untuk membangkitkan semangat nasionalisme bagi anak agar cinta potensi yang ada disekitarnya termasuk potensi pangan.
- Meningkatkan motivasi, partisipasi, dan aktivitas keluarga dan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengenalan konsumsi makan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

- Memberikan sarana prasarana dalam mengoptimalkan pemanfaatan kebun sekolah agar dapat menjadi lumbung hidup dan sumber pangan siswa serta dapat sebagai penyangga ekonomi sekolah.

Pelaksanaan pemberian percontohan pengembangan kebun sekolah sebagai sumber pangan sebagai berikut :

- Sarana prasarana, benih sayuran dan bibit buah sebagai sumber vitamin
- Sarana prasarana budidaya ikan dan benih ikan sebagai sumber protein.

Output kegiatan ini antara lain :

- Anak-anak mengenal dan berminat memanfaatkan pekarangan dirumah dengan mengembangkan aneka tanaman sebagai sumber pangan.

3). Pengenalan Menu B2SA pada anak usia dini

Pengenalan konsumsi pangan B2SA pada anak usia dini disekolah penerima manfaat dengan tujuan antara lain :

- Mengenalkan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) pada anak usia dini
- Membiasakan mengkonsumsi pangan yang B2SA
- Menanamkan pemahaman akan pentingnya konsumsi pangan B2SA pada anak sejak usia dini

Pelaksanaan disetiap sekolah penerima manfaat mengenalkan dan memberikan konsumsi pangan B2SA sebanyak 150 anak dengan volume 10 kali makan.

Output yang diharapkan antara lain setiap anak terbiasa mengkonsumsi pangan B2SA setiap hari agar dapat tumbuh sehat, aktif dan produktif.

4). Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan dan perkembangan di tingkat lapangan maka secara berkala dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang direncanakan setiap triwulan.

Hal tersebut bertujuan antara lain :

- Untuk mengetahui perkembangan kegiatan di tingkat lapangan
- Untuk mengevaluasi keberhasilan ditingkat lapangan sesuai indikator yang ditetapkan.

d. Input

Input pengenalan konsumsi pangan B2SA pada anak usia dini berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa

Tengah Th. 2015 sebesar Rp 118.380.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

e. Out Put

Keberhasilan Pelaksanaan Intervensi Pengenalan konsumsi pangan B2SA pada SD/MI sebagai berikut :

- Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan di SD/MI.
- Memasyarakatnya kegiatan Intervensi pengenalan konsumsi pangan berbasis B2SA.
- Terselenggaranya pembelajaran dalam mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman dilingkungan kebun sekolah.
- Terselenggaranya pembelajaran dalam pemanfaatan potensi sumberdaya pangan di pekarangan dalam penganeekaragaman pangan sebagai percontohan SD/MI.

f. Out come

Out come Pelaksanaan Intervensi Pengenalan konsumsi pangan B2SA pada SD/MI sebagai berikut :

- Anak mengenal sumber pangan yang ada dilingkungannya.
- Anak mengenal dan mencintai dunia pertanian.
- Anak terbiasa mengkonsumsi pangan yang B2SA, dan mengerti akan pentingnya konsumsi sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral.

d. Preferensi Konsumsi Pangan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas suatu produk pangan dilaksanakan prefensi konsumsi pangan masyarakat.

a. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain ::

- Meningkatkan derajat kesukaan terhadap suatu produk makanan melalui sosialisasi dan pembinaan
- Meningkatkan kualitas suatu produk paangan olahan dimasyarakat melalui uji organoleptik
- Memasyarakatkan produk pangan olahan hasil industri rumah tangga.

b. Sasaran

Kelompok wanita tani yang sudah mampu mengolah dan memproduksi aneka jenis makanandengan bahan baku hasil optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang dapat dipasarkan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Meningkatkan derajat kesukaan suatu produk makanan melalui uji hedonik.
- Meningkatkan kualitas suatu pangan olahan dimasyarakat melalui uji organoleptik

d. In put

In put Preferensi konsumsi pangan masyarakat berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 25.700.000,- Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

e. Out put yang diharapkan

Out put yang diharapkan adalah produk paangan olahan hasil industri rumah tangga dapat disukai dimasyarakat.

f. Out come

- Berkembangnya kawasan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.
- Meningkatnya model pengembangan usaha pengolahan dari bahan pangan lokal sesuai karakteristik daerah.

e. Gerakan Konsumsi Pangan B2SA

Gerakan konsumsi pangan B2SA berupa peenyelenggaraan gerakan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) pada masyarakat terutama pada anak-anak dan pelaku penyedia pangan.

a. Tujuan

Tujuan gerakan konsumsi pangan B2SA antara lain :

- Sebagai media pengenalan akan pentingnya pangan B2SA bagi masyarakat.
- Sebagai sarana menumbuhkan kesadaran terhadap anak-anak sejak usia dini akan pentingnya pangan B2SA
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan pangan melalui konsumsi paangan B2SA.

b. Sasaran

Masyarakat dan anak-anak dalam gerakan pengenalan pangan yang B2SA sebanyak 500 anak.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan gerakan konsumsi pangan B2SA berupa gerakan konsumsi Pangan B2SA bagi anak sekolah, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- Menyusun menu B2SA untuk sekali makan (makan siang) diutamakan berbahan baku lokal
- Mensosialisasikan pentingnya konsumsi paangan B2SA melalui media cetak yang dibagikan pada peserta

- Memberikan dan mengenalkan konsumsi pangan B2SA pada peserta gerakan.

d. In Put

In put Partisipasi dalam gerakan pangan B2SA pada Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Tengah berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2015 sebesar Rp 23.850.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

e. Out put yang diharapkan

Out put yang diharapkan dalam partisipasi peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dikenal dan dipahami masyarakat.

f. Out come

- Masyarakat mengenal dan menyadari akan pentingnya pangan B2SA.
- Tumbuhnya kesadaran anak sejak usia dini akan pentingnya pangan B2SA
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan pangan melalui konsumsi pangan B2SA.

BAB. III PEMBIAYAAN

Sesuai penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 melalui DIPA Nomor3816/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan dengan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA nilai anggaran sebesar Rp 1.950.000.000,- (Satu Milliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah kelompok sasaran sebanyak 105 kelompok.

BAB IV. ANALISA RESIKO KEGAGALAN

Untuk dapat mengatasi kendala permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan perlu diperhitungan resiko kegagalan pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara intern untuk mengatasi resiko kegagalan. Untuk itu perlu dirumuskan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan, dari berbagai aspek yang mempengaruhi, antara lain :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Pelaksanaan	Dokumen Pendukung
1	Organisasi - Badan Ketahanan Pangan Prov Jateng	Penanggungjawab teknis - Pembinaan dan pengawasan - Pelaksanaan	- SK Kepala BKP Prov Jateng
2	Kebijakan - Gubernur - Kepala BKP Prov Jateng - Bupati -BKP/KKP Kab. /Kota	- Penetapan KPA/PPK dan Bendahara - Identifikasi CP/CL - Pengusulan CP/CL - Acuan pelaporan	- SK Gubernur - Buku Juklak
3	SDM - Tim Pembina Provinsi - Tim teknis kabupaten - Penyuluh pendamping	- Pengadaan Tim Pembina - Pengadaan Tim teknis - Pembinaan KWT/PKK/Dasa Wisma	- SK Kepala BKP
4	SOP Penyerahan Stimulan	Menyusun SOP penyaluran Bansos untuk pelaksanaan kegiatan	Juklak Proposal Rencana Kegiatan

2. Unsur Informasi dan Komunikasi

No	Sub Unsur	Pelaksanaan	Dokumen Pendukung
1	Pengelolaan, pengembangan sistem informasi secara terus-menerus	- Pertemuan kelp - Rapat koordinasi - Pelatihan - Studi banding - Pelaporan cepat	- Notulen rapat - Laporan kegiatan - Modul - Pelaporan
2	Penyediaan sarana informasi dan komunikasi	- Pembuatan leaflet - Membangun kerjasama	- Leaflet - Data luas pekarangan dan jenis komoditas yang diusahakan - Informasi harga dan pasar.

3. Unsur Pemantauan dan Pengendalian

No	Sub Unsur	Pelaksanaan	Dokumen Pendukung
----	-----------	-------------	-------------------

1	Pemberdayaan Kelompok (PKK/Dawis/KWT)	- Membangun budaya dan aturan organisasi - Perencanaan kegiatan - Membangun kerjasama antar anggota	- Buku Keanggotaan - Buku Notulen - Buku Simpan Pinjam anggota - Buku kas - Buku Kekayaan - Neraca - Buku penjualan dan pembelian
2	Pengelolaan Usaha kelompok	- Pengelolaan dana Bansos - Perencanaa teknis dan keuangan. - Pembelian /pemanfaatan dana bansos - Penjualan hasil pemanfaatan dana bansos	- Buku keuangan - Buku Inventaris barang - Buku bantu laporan - Dokumen rencana usaha
3	Pemantauan capaian kinerja	- Unit- unit usaha, sumber daya, dana, kerjasama	Laporan bulanan
4	Monitoring dan evaluasi	Laporan hasil supervisi	Laporan bulanan

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH) TAHUN 2015

NO	URAIAN	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyusunan Design Survey	VVV	VVV										
2	Penyusunan Panduan Pelaksanaan Survey		VVV										
3	Penyusunan Formulir survey		VVV	VVV									
4	Penyusunan kuesioner survey			VVV	VVV								
5	Pengelolaan dan konversi hasil Survey				VVV	VVV	VVV						
6	Input Data						VVV	VVV	VVV				

	dan Analisa hasil konversi												
7	Penyusunan Hasil Analisa								WWW	WWW	WWW		
8	Publikasi Hasil Penghitungan dan Penyusunan Perencanaan Konsumsi Pangan Wilayah											WWW	WWW

D.Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan

i. Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.

Keamanan Pangan adalah merupakan hak setiap orang, tidak terkecuali bagi anak-anak sekolah yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kejadian keracunan yang sering terjadi di sekolah-sekolah, maupun di masyarakat hal ini menandakan bahwa pengawasan keamanan pangan yang ada di sekolah dan di masyarakat sangat kurang sekali.

Makanan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena sudah basi atau rusak. Makanan menjadi basi karena tercemar mikroba hewan, manusia, atau benda-benda lain yang tumbuh dan berkembang biak. Apabila mikroba tersebut dari jenis yang berbahaya, maka ini biasa disebut kuman. Dan makanan bisa menjadi sumber penyakit. Jika jumlah kuman dalam makanan banyak, maka mengkonsumsi makanan tersebut dapat menyebabkan keracunan. Keracunan pangan pada anak dapat menjadi ancaman yang serius dimana tidak jarang anak meninggal dunia karena keracunan pangan. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi antar stakeholder dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan.

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Produk pangan secara luas baik pangan yang berasal dari

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ternak dan ikan akan mudah mengalami penurunan mutu dan keamanan pangan karena proses produksi yang tidak sesuai standart dalam satu system pangan yang diawali dari pra produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan dan teknis penanganan pemasaran (proses distribusi) sampai ketingkat konsumen yang menjadi pangan segar dan bahan pangan untuk proses pengolahan selanjutnya dan sampai penanganan asupan zat gizinya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari keadaan gizi masyarakat, sebab keadaan gizi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan seseorang, keadaan gizi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketrampilan anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang.

Tingkat Sumber Daya Manusia sebagai produsen pangan segar dan olahan pangan belum maksimal, kenyataan di lapangan banyak pengusaha pangan segar dan olahan tidak mengusahakan penanganan pengendalian mutu dengan membentuk bagian pengendalian mutu dan keamanan pangan sehingga tidak ada fungsi monitoring, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi mutu hasil dan aspek keamanan pangan maka hasil pangan yang diproduksi masih bermutu rendah karena tidak memenuhi standart pasar yang dapat memuaskan dan memberi kenyamanan bagi konsumen, serta produk yang dihasilkan tidak aman.

Hasil Uji pada jajanan anak sekolah masih banyak makanan yang tidak memenuhi syarat karena mengandung tambahan pangan kimia berbahaya seperti Rhodamin B, Methanil Yellow, Borak dan Formalin. Demikian pula di pasar-pasar tradisional dan Pasar modern seperti Swalayan banyak ditemui pedagang/pengusaha yang menjual pangan dengan pewarna pakaian serta daging glonggongan dan daging tiren. Kasus-kasus keracunan makanan dan pemenuhan pangan yang tidak memenuhi kriteria yang aman tersebut terjadi karena Sumber Daya Produsen pangan yang umumnya terbatas baik pengetahuan, ketrampilan dan modalnya. Dalam memproduksi pangan baik pangan segar maupun olahan, tidak pernah berfikir apakah makanan tersebut sehat dan aman dari bahan tambahan pangan yang berbahaya serta dengan harga yang relatif murah, bahkan dapat menyebabkan keracunan.

Penyediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan bergizi serta terjangkau daya belinya dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan mengevaluasi Sistem Pangan. Dalam hal ini peran Pemerintah, tokoh masyarakat, peneliti dan Perguruan Tinggi serta pebisnis sangat diperlukan dengan mengembangkan dan meningkatkan masing-masing serta perlu dibangun Jejaring, Koordinasi dan Kompetensi dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan

terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi. Sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pemenuhan pangan harus diproduksi dalam keadaan aman dan bermutu serta terjangkau penyediaannya merupakan tanggungjawab bersama antara produsen pangan dan pemerintah.

Pada era globalisasi terjadi peningkatan daya saing produk pangan dunia, perusahaan-perusahaan yang dulu hanya bersaing dengan tingkat lokal atau regional sekarang harus bersaing dengan seluruh perusahaan dunia.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan keamanan pangan, baik di masyarakat dan di sekolah-sekolah khususnya terhadap beredarnya produk pangan olahan yang dikonsumsi dan sering menyebabkan gangguan kesehatan baik keracunan dan sakit akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman tersebut, maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan kegiatan **Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan**.

ii. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan Peran Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan yang terjadi di masyarakat;
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan/pangan yang untuk dikonsumsi di Jawa Tengah;
- c. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pengawasan dan penanganan keamanan dan mutu pangan di provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan Koordinasi dalam Jejaring, Intelijen, Pengawasan, dan Promosi keamanan pangan;
- e. Melakukan pengkajian, pengolahan dan analisa hasil pelaksanaan, Pengawasan keamanan pangan;
- f. Memonitor dan mengendalikan Sistem Pangan dan Olahan yang aman dan bermutu di Jawa Tengah;
- g. Memberikan peringatan dini terhadap penyimpangan pangan yang beredar di masyarakat sesuai Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Pangan RI No 18 tahun 2012;
- h. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan produsen pangan sesuai Hazard Analysis Critical Control Point / HACCP (GMP, GHP) dan sesuai ISO 2000;
- i. Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan ditingkat produsen dan pengguna pangan;

- j. Memasyarakatkan produk pangan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dengan percontohan.
- k. Membangun koordinasi dan sinkronisasi antar Stakeholder terkait dalam menggerakkan Sadar Keamanan Pangan di masyarakat;
- l. Menilai dan menguji mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
- m. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengelola warung sekolah dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu bagi anak-anak sekolah.

iii. Sasaran

Petani, kelompok tani, pelaku usaha, komonitas sekolah, tokoh masyarakat dan petugas Kabupaten / Kota dan Provinsi Jawa Tengah.

iv. Rencana Pelaksanaan Kegiatan:

A. Rencana Pelaksanaan Kegiatan:

1. Koordinasi Jejaring Sistem Keamanan Pangan Terpadu dan Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan.

- a. AnggaranAnggaran : Rp 177.660.000,-
- b. Lokasi : Provinsi
- c. Waktu : Januari - Oktober 2015
- d. Peserta : 40 orang, 1 kl, dari Kab/
Kota Se Jawa Tengah
- e. Target : Petugas
yang tergabung dalam Tim SKPT
Provinsi serta Petugas yang
menangani keamanan serta
masyarakat produsen dan
konsumen di Jawa Tengah
- f. Tujuan:
 - Meningkatkan Peran Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan yang terjadi di masyarakat;
 - Meningkatkan kepercayaan masyarakat di Jawa Tengah, terhadap pangan yang aman dikonsumsi;
 - Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pengawasan dan penanganan keamanan dan mutu pangan di provinsi dan kabupaten/kota;

- Melaksanakan Koordinasi dalam Jejaring, Intelijen, Pengawasan, dan Promosi keamanan pangan;
- Melakukan pengkajian, pengolahan dan analisa hasil pelaksanaan Intelijen, Pengawasan dan promosi keamanan pangan;
- Meningkatnya pengetahuan, kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dikonsumsi;
- Memasyarakatkan konsumsi makanan olahan tidak menggunakan bahan tambahan makanan (pewarna, pengawet) yang dilarang seperti Rhodamin B, Methanyl Yellow, Formalin, Borax, dll);
- Mensosialisasikan program kerja penanganan mutu dan keamanan pangan di Jawa Tengah;
- Menginformasikan mutu hasil olahan pangan segar dan olahan kepada masyarakat;
- Menyebarkan teknik penanganan pasca panen yang aman dan bermutu kepada masyarakat;
- Menyebarkan dampak residu kimia yang berbahaya kepada masyarakat;
- Menyebarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) kepada masyarakat.

g. Sasaran:

- Tim SKPT Provinsi, Pejabat dan petugas yang membidangi keamanan pangan di kabupaten/kota;
- Produsen/kelompok usaha pengolahan pangan/petani/peternak serta masyarakat konsumen.

h. Output:

- Terselenggaranya Koordinasi dalam Jejaring Keamanan Pangan antar instansi terkait dan kabupaten/kota;
- Meningkatnya pengetahuan Kelompok Masyarakat, Petugas, dan kelompok usaha pangan / petani / peternak dalam penanganan produksi pangan yang dijamin mutu dan keamanannya
- Memasyarakatnya pangan yang aman dan bermutu se Jawa Tengah;

- Memasyarakatnya pengetahuan tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat;
- Memasyarakatnya batas waktu/masa pangan (expired) yang aman untuk dikonsumsi;
- Memasyarakatnya standart mutu pangan;
- Memasyarakatnya Cara Produksi Pangan yang Baik dan Aman.

i. Outcome:

- Tersedianya pangan yang aman dan bermutu di masyarakat, pasar tradisional maupun pasar modern serta tersusunnya rumusan implementasi jejaring keamanan pangan yang beredar di Jawa Tengah;
- Sadarnya masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu;
- Menurunnya kasus-kasus keracunan tingkat rumah tangga, sekolah maupun di masyarakat;
- Tidak adanya penggunaan Bahan Tambahan Non Pangan dan Pangan yang dilarang;

2. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

- a. Anggaran : Rp. 95.210.000,-
- b. Lokasi : Pertemuan: Provinsi
- Bantuan :

Berupa peralatan untuk penanganan keamanan pangan yang diberikan kepada kelompok pengolah pangan di 5 (lima) kabupaten/kelompok, yaitu:

1. KSM Karya Amanah, Desa Cawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten;
2. KWT Delima, Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
3. KWT Mina Lestari, Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
4. KUB Biso Mukti, Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
5. KWT Sinar Lestari, Desa Tepusan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang

Rapat/Pertemuan diselenggarakan di Provinsi, sedangkan Identifikasi dan pemberian peralatan paket sarana prasarana diselenggarakan di lokasi masing-masing. Analisa dan perumusan kegiatan diselenggarakan di Provinsi/Kabupaten. Penyusunan laporan setiap bulan dilaksanakan kabupaten untuk dilaporkan ke provinsi.

- c. Waktu : Bulan Mei 2015
- d. Peserta : Sejumlah 10 Orang yang terdiri dari Petugas yang membidangi Keamanan Pangan dan 5 (lima) kelompok pelaku usaha pengolah pangan lokal/produsen dari Kabupaten Klaten, Boyolali, Rembang, Temanggung dan Semarang.
- e. Jenis Bantuan: Spiner, Kontainer Plastik, Freezer, Blender, Pedal Sealer, Kompor Gas, tabung Gas, Selang Kompor Gas, Etalase, Wajan Besar, Pamarut Singkong, Mixer, Kompor Gas Komersiil, Perajang Ketela, Penepung.
- f. Kriteria lokasi yang mendapatkan bantuan sarana prasarana:
 - Merupakan sentra komoditas bahan baku olahan pangan lokal (kedelai, jagung, ubi kayu, ubi jalar, atau susu) terkait dengan pengolahan pangan yang aman
 - Masyarakat mempunyai skill dan potensi untuk melakukan pengolahan pangan lokal yang berada di wilayahnya
- g. Tujuan :
 - Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam pengolahan hasil pertanian/peternakan yang mempunyai nilai tambah;
 - Meningkatkan kemampuan petani dan pedagang di dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
 - Meningkatkan ketrampilan petani dan pedagang dalam pengembangan manajemen GAP, GHP, dan GMP – SSOP serta GDP.
 - Meningkatkan nilai tambah pangan yang aman dan bermutu

- Memasyarakatkan penanganan, pengolahan dan penyimpanan pangan yang aman dan bermutu.

h. Sasaran:

- Pelaku usaha pengolah pangan berbahan baku kedelai, jagung, umbi-umbian, susu, agar dapat menerapkan prinsip pengolahan pangan baik baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Hazart Analisis Critical Control Poin (HACCP)
- Terwujudnya percontohan penanganan pasca panen yang aman dan bermutu.

i. Output :

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha pangan dalam merencanakan produksi pangan yang memperhatikan keamanan pangan;
- Meningkatnya ketrampilan pelaku usaha pengolahan pangan berbahan lokal dari pertanian/peternakan dalam penerapan GMP;
- Meningkatnya kemampuan petani dan kelompok usaha pangan dalam menghasilkan pangan yang aman dan bermutu pada 5 (lima) kelompok petani / pelaku usaha / petugas dari 5 (lima) kabupaten lokasi kegiatan.
- Meningkatnya ketrampilan petani dan petugas dalam mengembangkan implementasi kebijakan penanganan produksi pangan yang aman dan bermutu.
- Meningkatnya mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat

j. Outcome :

- Daerah mampu mengembangkan potensi pangan di wilayahnya secara optimal;
- Pelaku usaha mampu mengembangkan usaha yang mendatangkan nilai tambah dengan memproduksi pangan yang aman dan bermutu;
- Terwujudnya kemampuan petani dan kelompok usaha yang mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan;

- Meningkatnya kemampuan petani dalam mengembangkan manajemen, GHP, dan GMP, serta SSOP dan GDP

3. Gelar Pangan Sehat Kantin Sekolah

- Anggaran : Rp 74.250.000,-
 - Lokasi : Kegiatan: Provinsi
 - Waktu : Bulan Oktober 2015
 - Peserta : Sejumlah 150 Orang yang terdiri dari Anak-anak sekolah dan pengelola kantin sekolah.
- e. Kriteria Lokasi Pelaksanaan Gelar Pangan Sehat Kantin Sekolah adalah:
- Wilayah tersebut belum mengenal adanya pangan jajanan anak sekolah yang aman dan bermutu;
 - Masyarakat khususnya komunitas sekolah masih banyak yang kurang dalam pengetahuan terhadap mutu dan keamanan pangan;
 - Banyak terjadi kasus-kasus keracunan yang sering dialami oleh anak-anak Sekolah Dasar;
 - Belum tersentuhnya lokasi tersebut dalam pembinaan mutu dan keamanan pangan;
- f. Tujuan:
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya komunitas sekolah (Guru, pengelola kantin sekolah, pedagang diluar sekolah, anak-anak sekolah, orang tua murid, dan komite sekolah) tentang pengolahan pangan yang mengikuti standar cara retail (GRP) yang baik;
 - Meningkatkan pengelolaan mutu dan keamanan pada pangan jajanan anak sekolah;
 - Memberikan stimulasi pada 1 (satu) sekolah sebagai kantin percontohan, agar bisa dikembangkan pada daerah-daerah yang lain agar mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan dalam penanganan pangan olahan
 - Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan;

- Memberikan jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan pada pangolahan pangan
- g. Sasaran:
- Komunitas Sekolah Dasar yang belum melaksanakan SSOP dan GRP dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan;
 - Petugas yang membidangi keamanan pangan di kabupaten/ kota
- h. Output:
- Meningkatnya pengetahuan produsen pangan dan pelaku retail pangan dalam penanganan pangan yang baik, aman, dan bermutu;
 - Meningkatkan kesadaran pengedar makanan untuk melaksanakan cara distribusi yang baik dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan;
 - Melindungi masyarakat terhadap kemungkinan beredarnya makanan yang tidak memenuhi syarat yang mungkin dapat merugikan atau membahayakan masyarakat;
 - Meningkatnya kemampuan komunitas sekolah dalam penanganan pangan yang aman dan bermutu
 - Tersedianya pangan yang beredar di sekolah yang aman dan bermutu
 - Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan sistem keamanan pangan terpadu.
- i. Outcome:
- Meningkatnya keamanan pangan di Kantin Sekolah;
 - Pangan yang beredar di masyarakat (di sekolah) terjamin mutu dan keamanannya;
 - Meningkatnya citra pangan di masyarakat Jawa Tengah

4. Pembinaan Pengelolaan Karung Sekolah Yang Aman dan Bermutu

- a. Anggaran : Rp 458.030.000,-
- b. Lokasi : Pertemuan :Provinsi
- Bantuan:

1. Banyumas (1 kantin)
2. Cilacap (2 kantin)
3. Purbalingga (1 kantin)
4. Wonogiri (2 kantin)
5. Kota Ska (2 kantin)
6. Purworejo (1 kantin)
7. Boyolali (1 kantin)
8. Bknegara (2 kantin)
9. Jepara (1 kantin)
10. Kudus (1 kantin)
11. Kr.anyar (1 kantin)
12. Wonosobo (1 kantin)
13. Brebes (1 kantin)
14. Semarang (1 kantin)
15. Grobogan (2 kantin)
16. Magelang (1 kantin)
17. Rembang (1 kantin)
18. Kendal (1 kantin)
19. Demak (1 kantin)
20. Pemalang (1 kantin)
21. Sragen (1 kantin)
22. Tegal (1 kantin)
23. Kebumen (1 kantin)
24. Pati (1 kantin)
25. Sukoharjo (1 kantin)
26. Klaten (1 kantin)
27. Blora (2 kantin)
28. Temanggung (1 kantin)
29. Batang (1 kantin)
30. Pekalongan (1 kantin)
31. Kota Salatiga(1 kantin)
32. Kota Smg (2 kantin)
33. Kota Mgl (1 kantin)
34. Kota Tegal (1 kantin)
35. Kota Pkl (1 kantin)

c. Waktu : Mei dan September 2015

- d. Peserta : Sejumlah 60 orang yang terdiri dari Petugas kantin, pedagang di sekitar sekolah dari 42 kantin sekolah dan petugas yang membidangi keamanan pangan di 35 kabupaten/kota.
- f. Jenis Bantuan: Etalase Makanan, Kontainer Plastik, Kulkas, Blender, Tempat Sampah, Gelas, Piring, Sendok, Garpu, Panci Dandang, Panci sayur, Kompor gas, Tabung gas, Selang Kompor Gas, Magic Com, Termos Nasi Stenless, Termos Es, Termos Air panas, Magic Drink, Panci Stenless, Kipas Angin, Panci Masak Soto, Mangkok Soto, Juicer, Wajan, Serok, Sodet, Rak Piring, Dispenser, Show Case, Tudung Saji Makanan, Tempat Makanan, Baki Stenlees, Rice Cooker.
- g. Kriteria yang mendapat bantuan / pembinaan:
- 1) SD yang sudah punya kantin sekolah
 - 2) Kantin berlantai / keramik
 - 3) Kantin di dalam lokasi sekolah
 - 4) Kantin dikelola oleh petugas sekolah
 - 5) Kantin merupakan ruangan sendiri
 - 6) Jajanan yang dijual masih sangat terbatas (belum mengarah kepada keamanan pangan / peralatan masih minim/ala kadarnya).
- h. Tujuan:
- Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengelola warung sekolah dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah
 - Meningkatkan penyediaan pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah
- i. Sasaran:
- Petugas kabupaten/kota yang membidangi keamanan pangan;

- Pelaku usaha dan pengelola Kantin Sekolah dalam memproduksi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan;
 - Tersosialisasinya bahaya/dampak akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia.
- j. Output:
- Meningkatnya ketrampilan pengelola kantin sekolah dalam mengembangkan dan menyediakan pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah.
- J. Outcome:
- Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan pengelola kantin sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan pengolahan dengan prinsip sanitasi higienitas pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah;
 - Tersedianya pangan yang aman dan bermutu di sekolah;
 - Berkurangnya kasus keracunan anak sekolah akibat jajanan tidak aman.

5. Pembinaan Menuju Pra Bintang:

- a. Anggaran : Rp 44.505.000,-
- b. Lokasi : Provinsi
- c. Waktu : Oktober dan Nopember 2015
- d. Peserta : Kantin Sekolah dari 3 Kab / Kota
- e. Kriteria Kantin Sekolah Pra Bintang:
 - SD yang memiliki Kantin sekolah di dalam lingkungan sekolah;
 - Kantin Sekolah merupakan ruangan tersendiri berlantai dan berplafon, bersih dan terang;
 - Menyediakan pangan lokal B2SA dan terjangkau;
 - Dikelola oleh petugas sekolah

- f. Tujuan:
 - Mempersiapkan peran Kantin Sekolah dalam perolehan Piagam Bintang untuk tingkat Provinsi maupun Nasional.
- g. Sasaran:
 - 3 Kantin Sekolah untuk mengikuti penilaian /seleksi lomba Piagam Bintang baik tingkat provinsi maupun nasional
- h. Output:
 - Terpilihnya 3 Kantin Sekolah sebagai usulan perolehan Piagam Bintang
- i. Outcome:
 - Peningkatan keberadaan Kantin Sekolah yang aman dan bermutu.

BAB. IV

PENUTUP

Dengan adanya kegiatan **Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan** tersebut sangat bermanfaat dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan motivasi petugas, kelompok usaha pangan maupun kelompok masyarakat lainnya dalam menyediakan pangan yang aman.

Selain dari pada itu para pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha pangan dalam menghadapi pasar bebas yang mampu memperhatikan tentang Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang diinginkan konsumen dan dunia perdagangan.

Bantuan Stimulan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Bantuan stimulan berupa sarana prasarana peningkatan mutu dan keamanan pangan sebanyak 5 paket (5 kabupaten) @ Rp. 5.000.000,-
- b. Pembinaan Pengelolaan Kantin Sekolah Yang Aman dan Bermutu. Bantuan stimulan berupa alat penanganan kantin sekolah sebanyak 42 paket/warung sekolah (35 kabupaten) masing-masing paket/kantin sekolah sebesar Rp. 5.000.000,-
- c. Penghargaan Menuju Pra Bintang. Bantuan Stimulan berupa hadiah untuk memotivasi kantin-kantin sekolah yang sudah berprestasi dalam menyajikan dan mengelola keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah dengan baik. Hadiah

masing-masing untuk juara I,II, dan III adalah sebesar Rp. 6.000.000,-, Rp. 4.000.000,- dan Rp. 3.000.000,-

2. Kegiatan Pengembangan Sertifikasi Dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar

Peranan pemerintah sangat besar dalam rangka melindungi masyarakat agar dapat mengkonsumsi pangan yang sehat aman dan bermutu, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan mutu pangan hasil pertanian. Untuk mendukung kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian telah dibentuk OKKP-P dan OKKP-D.

Efek positif dari era globalisasi bagi produk pertanian Indonesia adalah pembangunan pertanian ke depan harus diarahkan pada penguatan daya saing produk pertanian dengan memperhatikan dinamika preferensi konsumen yang terus mengalami pergeseran ke arah produk pertanian yang aman dan bermutu serta mengandung kepraktisan.

Kemampuan untuk menghasilkan produk pertanian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keunggulan kompetitif usaha agribisnis yang dikembangkan. Dalam kaitan ini maka pelaksanaan pembangunan pertanian harus menempuh upaya pengembangan usaha agribisnis yang terintegrasi secara vertikal dan upaya tersebut perlu didukung dengan pengembangan standarisasi untuk memberikan jaminan mutu produk pertanian yang sesuai dengan preferensi konsumen.

Kebutuhan terhadap buah-buahan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat dan makin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi. Kebutuhan buah-buahan juga cenderung meningkat dengan adanya kemajuan teknologi dan pengetahuan yang memungkinkan pengolahan buah-buahan lebih beragam. Hal ini berarti membuka peluang baik bagi buah-buahan.

Konsumsi masyarakat terhadap buah-buahan cenderung mengalami peningkatan, dan impor buah-buahan juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan gejala terjadinya pergeseran konsumsi buah, dari buah lokal menjadi buah impor. Perubahan gaya hidup (life style) masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi produk-produk agribisnis yang telah meluas pada dimensi psikologis dan kenikmatan. Perubahan ini menyebabkan meningkatnya tuntutan keragaman produk dan keragaman kepuasan. Minimnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi buah, membuat buah lokal kesulitan bersaing dengan buah impor. Serbuan buah-buahan impor yang membanjiri pasar di Indonesia menjadi tantangan berat bagi varietas buah lokal yang kian hari hilang dari peredaran. Selain pasar tradisional, serbuan tersebut juga membanjiri supermarket sampai gerai khusus buah.

Indonesia sebagai negara tropis, kaya akan sumber daya alam dan banyak menghasilkan buah-buahan terbaik. Terlebih iklim dan cuaca negeri ini sangat mendukung tumbuhnya buah khas tropis yang penuh nutrisi dan vitamin. Sayangnya, kebanyakan masyarakat kurang mengapresiasi kekayaan tersebut

karena lebih memilih untuk mengkonsumsi buah impor yang biasa diujakan dalam pasar swalayan.

Di tengah membanjirnya beragam produk pertanian impor di pasar dalam negeri, perlunya upaya pemerintah mendorong para petani lokal untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan peningkatan ekspor produk pertanian khususnya sayuran dan buah segar dipasar global. Kerja keras tentunya lebih ditingkatkan meningkatkan perannya melalui peningkatan nilai tambah, daya saing serta peningkatan ekspor buah segar dan sayuran. Dibukanya kran pasar bebas melalui perdagangan bebas ASEAN-China dan MEA tahun 2015, tentu tidak sepenuhnya merupakan ancaman produk pertanian khususnya buah lokal. Di satu sisi, masuknya produk pertanian (buah) impor, justru dapat memotivasi para petani dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Adanya ACFTA, memungkinkan petani maupun pengusaha lokal menjual berbagai produk ke luar negeri. Namun tentunya, kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan permintaan pasar global. Perlunya keyakinan bahwa perdagangan bebas dapat menguntungkan petani lokal, dengan catatan produk lokal juga dapat bersaing dengan produk impor.

Untuk menangkai gempuran buah impor, pemerintah telah bertekad untuk memperketat kriteria impor, melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemberlakuan SNI buah diperlukan untuk melindungi petani dan pelaku usaha buah nasional. Dalam rangka mengembangkan daya saing buah nasional, beberapa factor harus menjadi perhatian.

Terkait dengan daya saing produk pertanian, perlu kiranya upaya meningkatkan kemampuan untuk memasok barang dan jasa pertanian pada waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen baik lokal, nasional, maupun internasional dengan harga yang bersaing. Oleh karena itu, penting bagi kita pengetahuan yang menyeluruh mengenai perubahan preferensi konsumen.

Mencermati hal tersebut, muncul ide untuk membangkitkan gairah masyarakat dalam membeli dan mengkonsumsi buah lokal. Namun demikian, tidak serta merta secara frontal merubah sikap dan perilaku petani, yang berkesan memaksa petani untuk membalik pikiran. Untuk mendekatkan petani terhadap perilaku pertanian yang aman dikonsumsi, merupakan factor utama paling awal yang perlu ditanamkan dibenak para petani kita. Dengan demikian petani akan paham dan menyadari bahwa perilaku mereka sangat menentukan terhadap peredaran produk pertanian dipasaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan, Menteri Pertanian berwenang mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut dipandang perlu untuk membentuk lembaga yang menangani keamanan pangan produk segar pertanian di Indonesia dalam hal ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Jawa Tengah. Sehingga fungsi pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan terhadap peredaran produk segar pertanian, telah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian di masing masing sub sektor. Peraturan Permentan

Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya, meningkatkan daya saing produk pangan segar serta memberi jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar.

Berdasarkan Permentan Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian pada Pasal 25 ayat (3) menyatakan Ditjen PPHP sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) mengemban fungsi pengawasan melalui mekanisme sertifikasi dan pendaftaran bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai perpanjangan tangan OKKP-P, melalui surat edaran Mentan ditunjuklah OKKP-D untuk melaksanakan fungsi pengawasan keamanan produk segar pertanian di tingkat provinsi.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan yaitu UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang dijabarkan dalam ketentuan pelaksanaan berkaitan dengan keamanan pangan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, untuk menstimulir dinamika yang berkembang dalam menciptakan iklim perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran mentan tersebut Gubernur Jawa Tengah telah membentuk OKKP-D melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2009 Tanggal 29 Desember 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam permintaan produk pertanian tersebut adalah aspek mutu dan keamanan pangan dimana mutu dan keamanan menjadi syarat yang harus dipenuhi. Hal ini penting karena mutu dan keamanan pangan produk menentukan daya saing produk dalam perdagangan domestik maupun internasional.

Kemampuan untuk menghasilkan produk pertanian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keunggulan kompetitif usaha agribisnis yang dikembangkan. Dalam kaitan ini maka pelaksanaan pembangunan pertanian harus menempuh upaya pengembangan usaha agribisnis yang terintegrasi secara vertikal dan upaya tersebut perlu didukung dengan pengembangan standarisasi untuk memberikan jaminan mutu produk pertanian yang sesuai dengan preferensi konsumen.

Pemerintah telah mengeluarkan perundangan yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dijabarkan pada Bab VII antara lain bahwa Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.

Pengawasan terhadap peredaran produk pangan segar hasil pertanian telah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian di masing-masing sub sektor. Berdasarkan Permenatn Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem

Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian pada Pasal 25 ayat (3) menyatakan Ditjend PPHP sebagai Otoritas kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dan sebagai perpanjangan tangan OKKP-P, Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 97/2009 Tanggal 31 Januari 2009, Tentang Otoritas Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang mengemban fungsi pengawasan keamanan pangan melalui Sertifikasi Prima dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

A. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penanganan sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan batas minimum residu pestisida pada buah dan sayur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha produk pangan segar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dalam usaha memproduksi pangan segar sehingga pangan yang diproduksi mempunyai mutu yang baik dan aman dikonsumsi;
2. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk pangan segar yg tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya;
3. Meningkatkan kesadaran petani/pelaku usaha pangan segar terhadap pentingnya memproduksi pangan yang aman untuk dikonsumsi melalui Hazard Analysis Critical Control Point/ HACCP (GAP, GHP, GMP) dan sesuai ISO 22000 dengan memberikan sertifikat prima 3 dan registrasi pangan segar asal tumbuhan;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman untuk dikonsumsi dan bahaya dari pestisida pada bahan pangan yang melebihi Batas Maksimal Residu (BMR);
5. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan pelaku usaha/keompok tani untuk menerapkan standarisasi mutu dan keamanan hasil Pangan sesuai dengan HACCP (GAP, SOP, GHP dan GMP);
6. Meningkatkan daya saing produk pangan segar.

B. Sasaran

1. Petani/pelaku usaha komoditas unggulan di Kabupaten se Jawa Tengah yang telah menerapkan GAP;
2. Masyarakat sebagai konsumen pangan segar dan Petugas yang menangani Keamanan Pangan Segar Kabupaten/Kota.

C. Batasan Pengertian.

1. **Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)** adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-P.

2. **Sistem Jaminan Mutu**, adalah tatacara dalam bentuk tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menghasilkan produk sesuai standart dan atau regulasi teknis yang berlaku.
3. **Pangan Hasil Pertanian**, adalah pangan segar yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
4. **Pangan Segar** adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
5. **Pangan Olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. **Sertifikasi**, adalah pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian sebagai bukti pengakuan bahwa pelaku usaha pangan hasil pertanian tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.
7. **Verifikasi**, adalah serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh OKKP-P kepada OKKP-D melalui proses penilaian pemenuhan persyaratan OKKP-D terhadap pedoman BSN 401-2000.
8. **Mutu**, adalah nilai pangan yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standart perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
9. **Keamanan Pangan**, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. **Sertifikat Hasil Uji**, adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi atau ditunjuk untuk menyatakan bahwa produk yang diuji telah memenuhi standart yang dipersyaratkan.
11. **Sertifikasi Mutu Pangan**, adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikasi terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Penguji Mutu. Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, atau Lembaga Inspeksi Mutu Pertanian yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standart mutu pangan yang bersangkutan,
12. **Standart**, adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
13. **Inpektorat/Pengawas Mutu Hasil Pertanian**, adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKP untuk melakukan pengawasan dan penilaian

- terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan yang ditentukan.
14. **Verifikator**, adalah personel yang ditugaskan oleh OKKP-P dalam proses verifikasi OKKP-D
 15. **Surveilen**, adalah audit ulang untuk memeriksa konsistensi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat dalam memenuhi syarat-2 sebagaimana dimaksud dalam pedoman.
 16. **Petugas Pengambil Contoh (PPC)**, adalah personel yang ditugaskan oleh OKKP atau Laboratorium uji dalam proses pengambilan contoh produk untuk keperluan pengujian mutu.
 17. **Laboratorium Penguji**, adalah Laboratorium penguji mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.
 18. **Lembaga Sertifikasi** adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat jaminan mutu pangan hasil pertanian.
 19. **Prima Satu (P-1)**, adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
 20. **Prima Dua (P-2)**, adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
 21. **Prima Tiga (P-3)**, adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
 22. **Good Manufacturing Practices (GMP)**, adalah suatu pedoman yang menjelaskan **cara memproduksi** pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
 23. **Good Handling Practices (GHP)**, adalah suatu pedoman yang menjelaskan **cara penanganan** pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
 24. **Good Farming Practices (GFP)**, adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara **budidaya ternak** agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
 25. **Nomor Kontrol Veteriner (NKV)**, adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
 26. **Jaminan Varietas**, adalah jaminan terhadap produk yang menunjukkan kebenaran tentang keaslian varietas yang dinyatakan dalam label.
 27. **Label Pangan**, adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.
 28. **Pangan Organik**, adalah pangan yang berasal dari suatu pertanian organik yang menerapkan praktek-2 pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktifitas yang berkelanjutan dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit melalui berbagai cara seperti daur ulang sisa-sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman,

pengelolaan air, pengelolaan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan-bahan hayati.

29. **Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)**, adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan dari produk pangan. Suatu sistem yang telah dapat menjamin keamanan pangan dan mutu seperti yang direncanakan, memberikan efisiensi, iklim kerja yang kondusif dalam suatu usaha serta memberikan jaminan kepercayaan kepada mitra bisnis.

II. DASAR HUKUM

Dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap peredaran produk pangan segar hasil pertanian telah diatur melalui perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor: 881/MENKES/SKB/VII/1996,
711/Kpts/TP.120/8/96
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
11. ISO/IEC Guide 65 atau Pedoman BSN 401 – 1999, Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk dan Pelabelan Tanda SNI.
12. Pedoman BSN No.2 – 1994 , Istilah-istilah umum dan definisi-definisi yang terkait dengan standardisasi dan kegiatan terkait.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan;
15. Permenkes Nomor 329/Menkes/Per/XII/76 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
16. Permentan No.35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices);
17. Permentan Nomor 51/Permentan /OT.140/10/2008 Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
18. Peraturan Menteri Pertanian No.27/Permentan/ PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97/2009, Tentang Otoritas Keamanan Pangan Daerah;
20. Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP Buah dan Sayur);

21. Permentan No.20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Organisasi Pelaksana Kegiatan.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan penanganan sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan batas minimum residu pestisida pada buah dan sayur diperlukan adanya organisasi pelaksana kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah)

Pelaksanaan Teknis : Kepala Sub Bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan.

Anggota Pelaksana :- Staf Sub Bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan.

- Anggota Tim OKKP-D Provinsi Jawa Tengah.

B. Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

1. Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha Produk Pangan Segar menuju Sertifikasi Prima 3 & PSAT.

- a. Tujuan : - Mempersiapkan petani/pelaku usaha produk pangan segar untuk menerapkan jaminan mutu dalam penanganan usahanya mulai dari persiapan lahan, proses produksi, pasca panen, pengelolaan dan pemasaran untuk menuju proses mendapatkan sertifikat prima 3 dan resgitrasi pangan segar asal tumbuhan.
 - Meningkatkan ketrampilan, pengetahuan bagi para pelaku usaha dalam penanganan produk pangan segar melalui penerapan sistem jaminan mutu.
- b. Sasaran : - Kelompok tani dan pelaku usaha yang bergerak di bidang produk pangan segar.
 - Petugas kabupaten
- c. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan
 - Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis keamanan pangan kepada para pelaku usaha produk pangan segar akan dilaksanakan pertemuan di Provinsi dan bimbingan langsung ke lapangan/kelompok tani.
 - Pertemuan akan dilaksanakan di masing-masing kelompok tani pemohon sertifikasi prima 3.
- d. Out Put : - Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan kesadaran para pelaku usaha produk pangan segar untuk memproduksi

pangan yang aman dikonsumsi dengan mendapatkan sertifikat prima 3 dan Pendaftaran PSAT.

- Meningkatnya kesadaran para produsen akan tanggung jawab terhadap produk pangan segar yang dihasilkan/dipasarkan dengan mendapatkan registrasi produk pangan segar.

e. Out Come: Meningkatnya produk pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat dengan dibuktikan adanya sertifikat prima 3 dan registrasi pendaftaran pangan segar.

2. Sosialisasi Keamanan Produk Pangan Segar.

- a. Tujuan : Meningkatkan kesadaran masyarakat baik produsen maupun konsumen tentang pentingnya keamanan pangan.
- b. Sasaran :
 - Masyarakat luas khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah, para tokoh masyarakat dan petugas lapangan di 35 kabupaten/kota.
 - Para kelompok tani/pelaku usaha produk pangan segar yang telah mendapatkan sertifikat prima 3 dan registrasi pangan segar asal tumbuhan.
- c. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi keamanan produk pangan segar meliputi pertemuan di Provinsi yang diikuti oleh stakeholder yang akan dilakukan pada bulan Juli 2015.
- d. Out Put : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan.
- e. Out Come: Meningkatnya keamanan produk pangan segar yang dapat dikonsumsi.

3. Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing (NTDS) produk buah dan sayur dan buah bersertifikat prima 3.

- a. Tujuan :
 - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam pemasaran PPS sesuai kualitasnya.
 - Memasyarakatkan PPS sesuai dengan kualitasnya.
- b. Sasaran: Buah dan sayur bersertifikat prima 3 dan PSAT yang sudah mendapatkan nomor pendaftaran
- c. Output : Penyebar luasan Informasi PPS bersertifikat Prima 3 dan PSAT.
- d. Outcome : Peningkatan nilai jual produk pangan segar yang sudah bersertifikat prima 3 dan PSAT yang sudah ter Registrasi.

5. Fasilitas Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi PSAT

A. Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi PSAT

- a. Tujuan : Memfasilitasi pelaku produk pangan segar/kelompok tani dalam proses sertifikasi prima 3 dan Registrasi PSAT.
- b. Sasaran : Kelompok tani dan pelaku usaha produk pangan segar yang sudah menerapkan sistem jaminan mutu keamanan pangan.
- c. Pelaksanaan: Fasilitasi sertifikasi prima3 dan Registrasi PSAT tahun 2015 dengan target 6 kelompok tani atau pelaku usaha produk pangan segar untuk proses sertifikat prima3 untuk pemohon baru dan 5 Sertifikat Prima3 perpanjangan, serta 21 kelompok tani atau pelaku usaha produk pangan segar untuk proses Pendaftaran PSAT.
- d. Output : Pemberian sertifikat Prima 3 dan Registrasi PSAT kepada kelompok tani dan pelaku usaha produk pangan segar.
- e. Outcome : Semakin meningkatnya jumlah produk pangan segar yang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat.

B. Sidang Komisi Teknis OKKPD

- a. Tujuan : Penilaian terhadap pangan segar yang dihasilkan oleh para kelompok tani/pelaku usaha produk pangan segar yang telah menerapkan jaminan mutu dalam proses produksi sampai dengan proses distribusinya melalui pemberian sertifikat prima 3 dan registrasi pangan segar asal tumbuhan sebagai jaminan bahwa pangan tersebut aman dikonsumsi.
- b. Sasaran: Para kelompok tani/pelaku usaha produk pangan segar yang telah menerapkan GAP, SOP, GHP dan GHP, Registrasi dan SLPHT
- c. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan
 - Kegiatan sidang komisi teknis OKKP-D akan diawali melalui penilaian kecukupan dan inspeksi kesesuaian terhadap kelompok tani/pelaku usaha produk pangan segar yang akan mengajukan sertifikasi prima 3 dan registrasi pangan segar asal tumbuhan.
 - Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para kelompok tani/pelaku usaha produk pangan segar maka sidang komisi teknis OKKP-D adakan dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli dan Desember 2015.
- d. Out Put : - Pembeian Sertifikat Prima 3 kepada kelompok tani/pelaku usaha produk buah dan sayur yang telah memenuhi syarat penerapan jaminan mutu.
 - Pemberian registrasi pangan segar asal tumbuhan yang telah memenuhi syarat penerapan jaminan mutu.
- f. OutCame: Meningkatnya daya saing product pangan segar bersertifikat prima 3.

C. Survailen Kelompok Tani Oleh OKKP-D.

- a. Tujuan : Melakukan kajian sistem jaminan mutu dan audit ulang untuk memeriksa konsistensi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat dalam memenuhi syarat-2 sebagaimana dimaksud dalam pedoman sistem jaminan mutu.
- b. Sasaran: Kelompok tani/Pelaku usaha produk pangan segar yang telah memperoleh Sertifikat Prima 3.
- c. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan Survailen terhadap kelompok tani/pelaku usaha produk pangan segar penerima sertifikat prima 3 yang sudah 2 tahun.
- e. Out Put: Konsistensi penerapan GAP, SOP dan HACCP dalam proses produksi pangan segar oleh para kelompok tani/pelaku usaha produk pangan segar.
- f. Out Came: Konsistensi penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk Prima 3

6. Uji Residu Produk Pangan Segar.

- a. Tujuan : Untuk mengetahui tingkat kandungan residu pada produk pangan segar khususnya komoditas yang akan di ajukan sertifikat prima 3 dan registrasi pangan segar asal tumbuhan.
- b. Sasaran: - Produk pangan segar khususnya komoditas buah, sayur segar berikut tanah dan air dari lahan produksinya untuk mendapatkan sertifikat prima 3 sebanyak 6 kelompok tani/pelaku usaha.
 - Produk pangan segar khususnya beras untuk mendapatkan registrasi pangan segar asal tumbuhan sebanyak 21 kelompok tani/pelaku usaha.
 - Pengujian laboratorium dalam rangka pengawasan keamanan pangan yang beredar di pasar sebanyak 14 sampel.
- c. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan
 - Uji residu pestisida terhadap produk pangan segar bekerjasama dengan Laboratorium yang telah terakreditasi dalam hal ini adalah LPPT UGM. Sebelum pengujian akan dilakukan pengambilan contoh ke lapangan.
- d. Out Put : - Hasil uji tingkat kandungan pestisida.
 - Terdeteksinya tingkat kandungan residu pestisida terhadap produk pangan segar khususnya komoditas buah, sayur, beras berikut tanah dan air dari lahan produksi.
- e. Out Came: - Diketahuinya tingkat keamanan buah dan sayur/produk Pangan Segar untuk layak dikonsumsi.

- Berkurangnya kasus keracunan Logam Berat pestisida akibat mengkonsumsi produk segar.

7. Koordinasi Pengawasan Keamanan Produk Pangan Segar.

- Tujuan : Meningkatkan koordinasi dalam penanganan pengawasan keamanan produk pangan segar untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
- Sasaran: - Petugas yang menangani keamanan pangan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Para pelaku produk pangan segar.
- Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan.
Koordinasi kegiatan pengawasan keamanan produk pangan segar akan dilakukan pertemuan di tingkat Provinsi dan pengawasan langsung ke lapangan baik di tingkat produsen maupun di tingkat pemasaran.
- Out Put : Terselenggaranya koordinasi dalam pengawasan keamanan produk pangan segar antar instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
- Out Come : Berkurangnya peredaran produk pangan segar yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

8. Launching Produk Bersertifikat Prima 3.

- Tujuan: Meningkatkan penanganan/penerapan system jaminan mutu pada setiap proses produksi pangan segar sesuai dengan standart keamanan pangan.
- Sasaran: Pelaku produk pangan segar yang telah mampu menerapkan system jaminan mutu dan keamanan pangan.
- Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan.
Launching produk pangan segar bersertifikat dilaksanakan di tempat yang memungkinkan untuk dikunjungi para konsumen, sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk pangan segar yang aman dan bermutu.
- Out Put : Terselenggaranya kegiatan launching produk pangan segar bersertifikat tahun 2015.
- Out Come: Meningkatnya pemasaran dan nilai tawar daya saing produk pangan segar bersertifikat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan kelompok tani.

IV. KEBIJAKSANAAN, STRATEGI DAN PROGRAM
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Untuk implementasi sistem mutu dan keamanan pangan nasional telah dilakukan analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi. **Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Dalam Sistem Mutu dan Keamanan Pangan.**

Dari hasil analisis tersebut ditetapkan kebijakan yang harus ditempuh, serta disusun strategi, program, dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk perdagangan domestik maupun global, yaitu melalui pendekatan HACCP untuk menghasilkan produk yang aman, serta mengacu pada ISO 9000 (QMS) untuk menghasilkan produk yang konsisten dan ISO 14000 (EMS) untuk menjamin produk pangan yang berwawasan lingkungan.

Dampak penyimpangan mutu dan keamanan pangan terhadap pemerintah, industri dan konsumen.

PENYIMPANGAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN		
PEMERINTAH	INDUSTRI	KONSUMEN
▪ Penyelidikan dan penyidikan kasus • Biaya penyelidikan dan analisis • Kehilangan Produktivitas • Penurunan ekspor • Biaya sosial sekuriti • Penganguran	• Penarikan produk • Penutupan pabrik • Kerugian • Penelusuran penyebab • Kehilangan pasar dan pelanggan • Kehilangan kepercayaan konsumen (domestik dan internasional) • Administrasi asuransi • Biaya legalitas • Biaya dan waktu rehabilitasi (pengambilan kepercayaan konsumen) • Penuntutan konsumen	• Biaya pengobatan dan rehabilitasi • Kehilangan pendapatan dan produktivitas • Sakit, penderitaan dan mungkin kematian • Kehilangan waktu • Biaya penuntutan/pelaporan

Konsep Implementasi *Quality System* dan *Safety*

SISTEM MUTU DAN KEAMANAN PANGAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
• Perkembangan industri pangan yang semakin pesat • Tersedianya UU Pangan dan Peraturan • Tersedianya sistem manajemen mutu dan keamanan GAP/GFP, GHP, GMP, GDP, GRP, ISO 9000, ISO 14000 ,dll)	• Produk pangan didominasi oleh industri kecil/rumah tangga • Kualitas SDM belum memadai • Kelembagaan koordinasi belum terpadu • Penguasaan Iptek yang masih lemah • Keterbatasan dan sumber dana • Kepedulian produsen dan konsumen masih rendah • Keterbatasan infrastruktur (lab, peraturan, pedoman, standar)	Globalisasi produk agroindustri	• Persaingan internasional yang semakin ketat • Peraturan dan kesepakatan internasional (WTO/TBT, SPS, dll)
KEBIJAKSANAAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (Mengacu pada konsep HACCP, ISO 9000 dan ISO 14000)			
IMPLEMENTASI PROGRAM DAN PENGAWASAN			

Tanggung Jawab Implementasi Sistem Mutu dan Keamanan Pangan

Pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri yang meliputi produsen bahan baku, industri pangan dan distributor, serta konsumen (WHO, 1998). Keterlibatan ketiga sektor tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan.

Berikut tanggung jawab dalam implementasi sistem dan keamanan pangan.

IMPLEMENTASI SISTEM MUTU DAN KEAMANAN PANGAN		
PEMERINTAH	INDUSTRI (Industri Pengolahan, Distributor, Pengecer)	KONSUMEN MASYARAKAT
▪ Penyusunan kebijaksanaan strategi, program dan peraturan • Pelakasanaan program • Sosialisasi UU Pangan dan peraturan • Pengawasan dan low enforcement • Pengumpulan informasi • Pengembangan Iptek dan penelitian • Pengembangan SDM (pengawas pangan, penyuluh pangan, industri) • Penyuluhan dan penyebaran informasi kepada konsumen • Penyelidikan & penyediaan kasus pe nyimpangan mutu & keamanan pangan	• Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan (GAP/GFP, GHP, GMP, GDP, GR, HACCP, ISO 9000, ISO 14000 dll) • Pengawasan mutu dan keamanan produk • Penerapan teknologi yang tepat (aman, ramah lingkungan, dll) • Pengembangan SDM (manager, supervisor, pekerja pengolah pangan)	▪ Pengembangan SDM (pelatihan, penyuluhan dan penyebaran informasi kepada konsumen) tentang keamanan pangan ▪ Praktek penanganan dan pengolahan pangan yang baik (GCP) ▪ Partisipasi dan kepedulian masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan
TANGGUNG JAWAB BERSAMA		

Secara teknis dalam rangka upaya mempertahankan kualitas produk pangan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. *Dokumentasi Sistem Mutu.*

Perusahaan harus membangun dan mempertahankan suatu sistem mutu tertulis (terdokumentasi), dengan pengertian hal ini akan menjamin produk-produknya sesuai dengan persyaratan tertentu. Sistem mutu tertulis ini membuat jaminan mutu bersifat lebih melembaga sebab dokumentasi ini dilakukan menyeluruh terhadap pedoman, prosedur dan instruksi kerja.

Sistem mutu tertulis bukan sekedar merupakan sesuatu yang diinginkan saja tetapi harus dikerjakan di lapangan. Sistem mutu terdiri dari manual, prosedur, instruksi kerja, format-format dan record. Penulisan sistem mutu sebaiknya melibatkan semua karyawan karena mereka nantinya yang akan mengerjakan dan hasil kerjanya mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan perusahaan.

2. *Pengendalian Rancangan*

Mutu produk sejak awal tergantung kepada rancangan produk tersebut. Tanpa merancang mutu kedalam suatu produk, akan sulit mencapai mutu tersebut selama produksi. Tujuan utama seorang perancang adalah menciptakan suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara penuh yang dapat diproduksi pada tingkat harga yang bersaing. Dengan demikian, proses perancangan yang meliputi perencanaan, verifikasi, kaji ulang, perubahan dan dokumentasi menjadi sangat penting, terutama untuk produk-produk yang mempunyai rancangan rumit dan memerlukan ketelitian.

3. *Pengendalian Dokumen*

Dalam penerapan sistem standar jaminan mutu, perusahaan dituntut untuk menyusun dan memelihara prosedur pengendalian semua dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem mutu. Tujuan pengendalian dokumen adalah untuk memastikan bahwa para pelaksana tugas sadar akan adanya dokumen-dokumen yang mengatur tugas mereka. Perusahaan harus menjamin seluruh dokumen tersedia pada titik-titik dimana mereka dibutuhkan.

4. *Pengendalian Pembelian*

Pembelian bahan hampir seluruhnya berdampak kepada mutu produk akhir sehingga harus dikendalikan dengan baik. Perusahaan harus memastikan bahwa semua bahan dan jasa yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

5. *Pengendalian Produk yang Dipasok Pembeli*

Adakalanya pembeli produk kita, mensyaratkan penggunaan produknya untuk diguna-kan dalam rangka memenuhi persyaratan kontrak. Perusahaan bertanggung jawab terhadap pencegahan kerusakan pemeliharaan, penyimpangan, penanganan dan penggunaannya selama barang tersebut dalam tanggung jawabnya.

6. *Identifikasi Produk dan Kemampuan Telusur*

Identifikasi suatu produk dan prosedur penelusuran produk merupakan persyaratan penting sistem mutu untuk keperluan identifikasi produk dan mencegah tercampur selama proses, menjamin hanya bahan yang memenuhi syarat yang digunakan, membantu analisis kegagalan dan melakukan tindakan koreksi, memungkinkan penarikan produk cacat/rusak dari pasar serta untuk memungkinkan penggunaan bahan yang tidak tahan lama digunakan dengan prinsip FIFO (First In First Out).

7. *Pengendalian Proses*

Pengendalian proses dalam sistem standar jaminan mutu mencakup seluruh faktor yang berdampak terhadap proses seperti parameter proses, peralatan, bahan, personil dan kondisi lingkungan proses.

8. *Inspeksi dan Pengujian*

Meskipun penekanan pengendalian mutu telah beralih pada kegiatan-kegiatan pencegahan dalam tahap sebelum produksi (perancangan, rekayasa proses dan pembelian) inspeksi dengan intensitas tertentu tidak dapat dihindari dalam sistem mutu.

9. *Inspeksi, Pengukuran dan Peralatan Uji*

Pengukuran atau kegiatan pengujian bermanfaat jika hasil pengukuran dapat diandalkan. Untuk itu alat pengukur atau alat uji harus memenuhi kecermatan dan konsistensi jika dioperasikan pada kondisi yang biasa digunakan.

10. *Inspeksi dan Status Pengujian*

Tujuan utama sistem mutu adalah untuk memastikan hanya produk-produk yang memenuhi spesifikasi sesuai kesepakatan yang dikirim ke pelanggan. Sering dalam suatu pabrik yang besar, produk yang memenuhi spesifikasi, yang belum diperiksa dan yang tidak memenuhi spesifikasi berada pada tempat yang berdekatan sehingga mungkin bercampur. Dengan demikian status inspeksi suatu produk harus jelas yaitu:

- produk belum diperiksa
- produk sudah diperiksa dan diterima
- produk sudah diperiksa tetapi ditolak

11. *Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai*

Dalam sistem produksi harus dapat disingkirkan produk-produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai prosedur tertulis untuk mencegah terkirimnya produk-produk yang tidak sesuai kepada konsumen. Jika produk yang tidak sesuai terdeteksi pada tahap produksi, prosedur yang ada harus tidak membiarkan produk tersebut diproses lebih lanjut.

12. *Tindakan Koreksi*

Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari kondisi operasi standar (prosedur) karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai sistem institusional untuk memonitor kegiatan produksi atau proses. Jika ketidaksesuaian diketahui, tindakan koreksi harus dilakukan segera agar sistem operasi kembali kepada standar.

13. *Penanganan, Penyimpanan, Pengemasan dan Pengiriman*

Perusahaan manufaktur terlibat dengan berbagai bahan dan produk, baik dalam bentuk bahan mentah, produk antara untuk di proses lagi maupun produk jadi. Adalah sangat penting menjamin bahwa mutu dari semua bahan dan produk tersebut tidak terpengaruh oleh penyimpanan yang kondisinya kurang baik, penanganan yang tidak tepat, pengemasan yang tidak memadai dan prosedur pengiriman yang salah.

14. *Catatan-Catatan Mutu*

Perusahaan harus menyusun dan memelihara prosedur untuk identifikasi pengumpulan, pembuatan indeks, pengarsipan, penyimpanan dan disposisi catatan mutu. Catatan mutu memberikan bukti obyektif bahwa mutu produk yang disyaratkan telah dicapai dan berbagai unsur sistem mutu telah dilaksanakan dengan efektif.

15. *Audit Mutu Internal*

Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan suatu perusahaan untuk melembagakan suatu audit sistematis terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan mutu, untuk mengetahui apakah prosedur dan instruksi memenuhi persyaratan standar. Perusahaan juga harus bisa mendemonstrasikan bahwa semua operasi dan kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur tertulis dan semua tujuan sistem mutu telah dicapai.

16. *Pelatihan dan Motivasi*

Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan kebutuhan pelatihan harus diidentifikasi dengan cermat dan menyiapkan prosedur untuk melaksanakan pelatihan semua personil yang kegiatannya berkaitan dengan mutu.

V. PENILAIAN RESIKO KEGAGALAN

Kegiatan Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur segar adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka memasyarakatkan pangan yang aman untuk dikonsumsi dan meningkatkan kesadaran petani/pelaku usaha pangan segar terhadap pentingnya memproduksi pangan yang aman untuk dikonsumsi menuju masyarakat yang sehat.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka kegiatan Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur segar harus berjalan dan perlu terus dikembangkan serta dimasyarakatkan. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan/berjalan maka tujuan untuk memasyarakatkan pangan yang aman untuk dikonsumsi dan meningkatkan kesadaran petani/pelaku usaha pangan segar terhadap pentingnya memproduksi pangan yang aman tidak dapat diwujudkan. Apabila kegiatan ini tidak berjalan maka akan berdampak pada tidak konsistennya petani/pelaku usaha pangan segar dalam melaksanakan proses menuju Sertifikat Prima 3, dapat berakibat terhadap pembatalan penerbitan Sertifikat Prima 3. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur segar harus tetap berjalan. Kegagalan juga bisa diakibatkan oleh perlakuan dari para anggota kelompok tani atau pelaku usaha produk pangan segar yang tidak konsisten menerapkan sistem jaminan mutu serta di sebabkan adanya bencana alam yang dapat merusak pertanaman dan berakibat menurunnya mutu produk pangan segar.

VII.

PENUTUP

Salah satu tujuan dari penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah untuk sebagai petunjuk, arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik secara teknis maupun administratif serta untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah pelaksanaan di lapangan. Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administratif sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang telah ditetapkan.

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan salah satu acuan dan akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan ketahanan pangan pada setiap aspek. Selanjutnya dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari input sampai dengan output agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan ini serta disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.